

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 250
20 Muharram - 4 Shafar 1441 H
20 September - 3 Oktober 2019

m Media ^{t a b l o i d} umat

m e d i a u m a t . n e w s

Memperjuangkan Kehidupan Islam

BAU KONSPIRASI DI BALIK REVISI UU KPK

■ KISAH

Menentang Kewajiban Khilafah,
Gelar 'Ulama' Raziq Dicotot

■ KELUARGA

Mencegah Zina
dalam Keluarga

■ WAWANCARA

Novel Baswedan,
Penyidik Senior KPK
Ada Persekongkolan
Membunuh KPK

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali ke ruang baca Anda. Semoga Anda dalam lindungan Allah SWT, Dzat Yang Maha Perkasa, dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai warnanya. Aamiin.

Pembaca yang dirahmati Allah, kita sangat prihatin dan bersedih atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan. Mereka tak bisa beraktivitas dengan leluasa karena kabut asap yang masih pekat. Banyak di antara mereka harus ke ruang perawatan karena bencana asap. Penerbangan terganggu. Ekonomi mandeg. Sementara, kita belum melihat tindakan negara yang sangat signifikan untuk menghentikan sumber-sumber api.

Publik kini menagih janji Jokowi dalam kampanyenya beberapa bulan lalu. Saat itu ia mengatakan untuk membebaskan Indonesia dari kebakaran hutan. Sebab, kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan selalu terulang setiap tahunnya.

Namun belum juga setahun berlalu, kabut asap kembali melanda. Janji Jokowi untuk mencopot Pangdam maupun Kapolda yang daerahnya menjadi titik api, baru sekadar ucapan yang belum terbukti.

Terlihat rezim Jokowi sudah tak punya solusi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kebakaran hutan ini adalah musibah dari Tuhan. Rezim seolah mau cuci tangan karena gagal mencegah pembakaran hutan. Padahal, pembakaran hutan bisa diantisipasi karena hutan-hutan yang ada kini milik para kapitalis besar. Sedikit yang punya rakyat kecil.

Pembaca yang dirahmati Allah, dalam situasi

negeri yang karut marut setelah Papua rusuh, dan kabut asap melanda, kini DPR mengesahkan UU KPK yang baru. Pemerintah pun menyetujuinya. Meski bukan prioritas pembahasan, tiba-tiba UU itu dibahas dan disahkan. Ada apa? Benarkah ada yang takut dengan sepak terjang KPK? Mengapa pembahasannya terkesan terburu-buru? Sementara kita tahu banyak RUU lainnya yang masih mandeg di tengah jalan, belum dijamah. Ikuti pembahasannya dalam rubrik Media Utama kali ini.

Anda juga bisa mengikuti kajian kami soal disertasi Abdul Aziz, doktor lulusan UIN Sunan Kalijaga yang menentang hukum Allah tentang zina. Dengan berlindung di balik pendapat Muhammad Syahrur, ia membolehkan hubungan intim di luar nikah alias zina alias kumpul kebo. Seperti apa? Fokus mengupasnya.

Pembaca yang dirahmati Allah, kami menunggu opini Anda untuk kami muat di rubrik pembaca. Banyak hal yang bisa Anda tuangkan dalam tulisan itu dan tak perlu panjang-panjang. Cukup 1.000 karakter saja. Ayo gerakkan jari jemari Anda melalui *smartphone* Anda!

Dan jangan lupa, mari terus ikut menyebarkan media ini kepada saudara-saudara, teman-teman, tetangga, tokoh, dan siapa pun, agar mereka mendapatkan pencerahan dari media ini. Sungguh, makin cerdasnya umat akan membuat kebangkitan Islam lebih dekat.

Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami! Semoga sajian kami senantiasa memberikan warna yang berbeda dibandingkan media yang ada.

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Menentang Allah SWT

Sangat miris, melalui Menkopolhukan Wiranto, pemerintah saat ini hendak membuat aturan yang melarang individu Muslim untuk mendakwahkan kembalinya penegakan khilafah. Padahal, sejatinya dakwah mengembalikan kehidupan Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum Muslim. Yakinlah, ini adalah perintah Allah. Jika dilanggar, itu artinya menentang Allah SWT.

Jika menentang Allah pastilah mereka berada dalam kehinaan. Lihatlah bagaimana Mustafa Kamal Pasha Attaturk laknatullah, kaki tangan Inggris yang jelas-jelas dengan sengaja sekuat tenaga menghancurkan pilar-pilar Daulah Islam sampai hancur berkeping-keping menjadi serpihan negara bangsa. Ketidadaan khilafah berlanjut sampai saat ini. Maka, siapa yang menentang tegaknya khilafah, berarti mereka termasuk anak buahnya Mustafa Kamal Pasha Attaturk laknatullah dan sudah pasti tempat yang layak ada di nerakanya Allah. Semoga kita terhindar dari semua itu. **Siti Aisyah. Cipayung, Depok. 085211103xxx**

Khilafah Makin Dirindu

Pernyataan Wiranto yang akan memberantas dakwah khilafah, seakan menantang Allah SWT. Bagaimana tidak, khilafah adalah ajaran Islam.

Lihatlah, semakin khilafah dikriminalkan, *bi idznillah* semakin banyak umat membuka mata dan hati akan kebenaran janji Allah akan tegaknya khilafah. Sungguh, pertolongan Allah sedikit demi sedikit telah tampak. Oleh karena itu, tetaplah berjuang mendakwahkan khilafah, tak perlu khawatir dan takut. Karena ada Allah yang akan senantiasa menjaga para pejuangnya. Allahu Akbar! **Ummu Muflih. Kota Pasuruan. +62 857-9090-6xxx**

Mantera Demokrasi

'Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.'

Merasa familiar dengan *quote* tersebut?

Quote atau kutipan yang berasal dari seorang filsuf Romawi kuno yang bernama Marcus Tullius Cicero namun dipopulerkan oleh John F Kennedy. Digunakan sebagai pembuktian cinta tanah air semasa perang.

Bagaikan mantra, seperti kutipan kalimat tersebut kini dipakai oleh banyak negara demokrasi sebagai tameng dari abainya menjalankan kewajiban sebagai pelayan rakyat, sekaligus membungkam ketika rakyatnya menuntut hak-hak mereka. Melalui berbagai macam pungutan pajak, rakyat terpaksa memperjuangkan sendiri hajat hidupnya. Mulai dari mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik, dan hak-hak lainnya.

Dalam Islam, negara benar-benar berlaku sebagai pelayan rakyat. Dengan pengelolaan SDM dan SDA yang ada secara tepat, negara menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Adapun pajak, ia menjadi pilihan terakhir, untuk keadaan darurat dan membahayakan kehidupan rakyat, seperti jika terjadi bencana alam sementara kas negara tidak mencukupi. **Ummu Abu Dzar. Bogor. +62 858-1151-1xxx**

Islam di Balik Tabir

Islam kini hanya sekadar ibadah shalat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Sementara di luar itu kita tidak memperhatikan tentang haramnya riba, tentang pentingnya menutup aurat, tentang haramnya memilih pemimpin zalim dan lainnya. Bahkan mereka mengubah nama riba menjadi bunga, pacaran menjadi *ta'aruf*, kafir menjadi non Muslim, orang Muslim yang taat dibilang radikal, kitab fikh jihad dibilang kitab para teroris, bendera tauhid dibilang teroris, atau mungkin nanti Dajjal mereka bilang kstatria dari langit pembawa keberkahan,



Sebagai bentuk solidaritas terhadap Hikma Sanggala yang di-DO dari IAIN Kendari lantaran dakwah syariah dan khilafah, Forum Mahasiswa Muslim Peduli Bangsa (FMM-PB) gelar aksi damai, Senin (9/9) di depan DPRD dan Balai Kota Malang.[]

MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN



SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

neraka mereka bilang wisata air panas dan sebagainya. Dari itu kita sebagai orang yang melanjutkan dakwah Nabi, kita harus memperjuangkan dan menyebarkan syariat Islam sampai ke penjuru alam hingga khilafah tegak berdiri kokoh. Allahu Akbar!!! **Marsani, Kota Pagatan. 083141097xxx**

Saatnya Umat Bangkit

Ketika umat Islam benar-benar terpisah dari kekuasaannya terbukti saat ini umat Islam tercerai berai, Islam pun menjadi agama ritual saja. Kemaksiatan merajalela kerusakan di mana-mana. Barat menguasai negeri-negeri Muslim sumber daya alam dieksploitasi hingga habis tak tersisa. Serangan budaya Barat pun kian merusak generasi Muslim. Umat Islam kian terlelap dengan tidur panjangnya. Mereka dininabobokkan dengan sistem rusak buatan Barat. Itulah kapitalisme-sekularisme yang semakin menjauhkan Islam dari kehidupan.

Problematisasi umat Islam semakin tak ada ujungnya, tak ada satu solusi pun yang ditawarkan benar-benar mampu menyelesaikannya. Mulai dari kezaliman yang dirasakan umat Islam di Palestina, Afghanistan, Suriah, Rohingya, Xinjiang, Kasmir dan lainnya. Penderitaan mereka hanya menjadi tontonan dunia saja.

Untuk itu tidak ada solusi lain selain mengembalikan kehidupan yang islami dengan itu semua problematisasi umat Islam dan umat manusia seluruhnya akan bisa diselesaikan dengan sempurna dalam naungan khilafah '*ala minhaj nubuwwah*'. **Neni S. Baleendah. +62 822-1607-9xxx**

Tak Menjamin

Luar biasa, di saat rakyat sangat membutuhkan sarana kesehatan, pemerintah akan menaikkan iuran peserta BPJS menjadi dua kali lipat, dengan alasan keuangan BPJS defisit dan selalu defisit. Oleh sebab itu agar tidak terkuras tekor dan bisa untung, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menguras kantong rakyat lebih dalam lagi, dengan dalih untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. Bahkan menurut Menteri Keuangan pun untuk menaikkan iuran tidak perlu persetujuan DPR, hal ini dikemukakan di ruang rapat Komisi X DPR (27/8/2019).

Ternyata dia tidak peduli betapa suatu kebijakan yang tidak bijak, yang justru akan menambah beban rakyat ditengah kesulitan ekonomi yang terus merata akibat cengkeraman sistem yang hanya menguntungkan kelompok kapital saja.

Sungguh memanfaatkan ratusan juta rakyat Indonesia hanya sekadar untuk membantu rekanan negara, ini merupakan langkah cerdik dari seorang Menteri Keuangan.

Sudah saatnya kita buang sistem kapitalisme neoliberalisme dan kembali pada sistem Islam yang pastinya akan menjamin kesehatan rakyat secara keseluruhan tanpa pandang bulu. **Ummi Fidho. Ciparay. +62 812-1448-9xxx**

Pemalakan Rakyat

Awalnya kita dibujuk agar mau bayar BPJS dengan sistem subsidi silang, pembayaran ringan, dengan jaminan kesehatan menyeluruh, ramailah yang daftar BPJS dan bayar per bulan, walau banyak yang nunggak alias tidak bayar.

Berikutnya beberapa penyakit dinyatakan tidak masuk dalam tanggungan BPJS. Lalu, yang sudah daftar BPJS tidak boleh berhenti, dan setiap orang wajib daftar BPJS.

Sekarang iuran BPJS naik enggak ketulungan, dicanangkan yang nunggak bayar bakal kena pasal perdata.

Ya Allah...urut dada....urut dada... tenggelamkan ya Allah bagi kami segala kesusahan dan kezaliman ini, leher serasa dicekik. Kemarin tarif listrik naik, cabe enggak turun-turun, sekarang iuran BPJS menggila. **Rhyanti. Baleendah.**



Penulis dan kader PDIP Kanti W Janis menyebut penyebar khilafah adalah sekte sesat. Menurutnya, sekte dalam sosiologi agama, umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Karena itu, tambahnya, para penyebar khilafah itu lebih tepat disebut sekte sesat.

Pernyataan kader PDIP yang menempuh SMP dan SMU-nya di ST Theresia Jakarta dan alumni Universitas Katolik Atmajaya Jakarta ini, sungguh merupakan penghinaan terhadap ajaran Islam. Menyebut sekte sesat kaum Muslimin yang menyerukan khilafah, berarti sama dengan menyebut khilafah *ala minhajin nubuwwah* adalah sesat. Pernyataan ini sungguh lancang dan keji. Kanti mengikuti jejak Victor Laiskodat, orang kafir, yang juga secara terang-terangan menghina ajaran khilafah Islam.

Perlu ditegaskan lagi dan lagi, bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang mulia, bagian dari syaria Islam yang mengatur masalah kepemimpinan dan kenegaraan. Khilafah Islam *ala minhajin nubuwwah* inilah yang diterapkan para Khulafaur-rasyidin saat menjalankan pemerintahan Islam. Diterapkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, mulai dari Khalifah Abu Bakar ra, Umar bin Khaththab ra, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ra. Tidak berhenti sampai di sana, sistem khilafah ini dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya.

Di samping ijma' sahabat, kewajiban penegakan khilafah ini, ditegaskan oleh para ulama kewajibannya. Syekh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan, "Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib..." [Lihat, Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V/416]. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, "Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal." [Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, Juz XII/205].

Pertanyaannya, kenapa saat ini orang-orang kafir, liberal, sekuler, musuh-musuh Islam demikian beraninya menghina dan menyerang ajaran Islam seperti khilafah ini? Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap ajaran khilafah. Khilafah Islam diposisikan sebagai ancaman. Padahal bagaimana mungkin khilafah yang akan menerapkan syariah Islam yang *rahmatan lil alamin*, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dianggap mengancam?

Rezim sekarang pun terus menunjukkan sikap anti Islam kaffahnya. Tidak puas dengan mencabut status BHP dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memang paling gigih menyerukan khilafah, saat ini Wiranto berencana menggodok aturan yang mengkriminalkan setiap individu yang menyerukan khilafah. Inilah yang memberikan legitimasi bagi pihak-pihak yang kebenciannya terhadap Islam sangat akut kemudian menyerang khilafah ajaran Islam.

Tanggung jawab kedua tidak bisa dilepaskan dari diamnya terutama para pemuka agama yang dianggap ulama di saat ajaran khilafah diserang. Padahal seharusnya ulama berada di garis terdepan saat ajaran Islam dihina. Yang lebih bertanggung jawab lagi adalah para pemuka agama yang justru ikut-ikutan menyerang ajaran khilafah, mengkriminalkannya. Orang-orang kafir, mereka yang memusuhi Islam pun menjadi berani dan semakin beringas menghina ajaran Islam.

Karena itu kita ingatkan, siapa pun yang melakukan ini untuk mendapatkan bayaran dari musuh-musuh Islam, berarti mereka telah menjual agama ini dengan harga yang rendah. Peringatan Allah sungguh sangatlah keras. "*Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.*" (TQS al-Maidah: 44). Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: "Maknanya, janganlah kalian mengambil dunia, dengan sengaja menyembunyikan penjelasan, informasi, dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, serta membuat samar kebenaran. Agar kalian bisa mempertahankan posisi kepemimpinan kalian di dunia yang murah, rendah, dan sebentar lagi akan binasa." (Tafsir Ibnu Katsir, 1/244).

Rasulullah juga mengingatkan para ulama *suu'*, ulama buruk, yang menjerumuskan umat. Inilah bencana bagi umat Islam. Al Allamah Al-Minawi dalam *Faydh al-Qadîr Syarah Jami' Shogir* dari Imam Syuyuthi mengatakan: "Bencana bagi umatku (datang) dari ulama *suu'*, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat; mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui." (*Faydh al-Qadîr*, VI/369.) Allahu Akbar![] **farid wadji**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



ADA APA, KOK TERGESA-GESA?

Luar biasa!!! Mungkin inilah revisi sebuah undang-undang tercepat di Indonesia. Diusulkan pada Kamis (5/9) dan disetujui menjadi UU pada Selasa (17/9). Hanya butuh waktu kurang dari dua pekan. Wajar bila banyak pegiat antikorupsi bertanya-tanya? Ada apa ini, kok tergesa-gesa?

Bukankah tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan pembahasan begitu cepat? Lagi pula, revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini. Ini yang disebut beberapa kalangan sebagai cacat formil, karena bukan prioritas untuk dibahas tapi diprioritaskan.

Usulan revisi sebagai inisiatif DPR itu sendiri disahkan oleh 70 anggota DPR, dan kemudian disahkan menjadi UU hanya oleh 80 orang anggota DPR dari jumlah total 560. Yang lain dianggap hadir karena telah mengisi daftar hadir yang memenuhi kuorum.

Dan yang lebih aneh pula, pimpinan KPK tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Padahal, mereka yang akan melaksanakan UU itu sekaligus mengetahui bagaimana seluk beluk pemberantasan korupsi itu selama ini.

Yang pasti, publik menolak revisi ini. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, pegiat antikorupsi, hingga pimpinan KPK dan pegawai KPK. Mereka semua beralasan, revisi ini akan melemahkan KPK.

KPK yang sementara ini sudah dinilai lemah karena adanya campur tangan kekuasaan, bisa bertambah lemah dengan aturan yang baru. Keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat presiden dianggap melemahkan KPK karena memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK. Keberadaannya bisa membosai pimpinan KPK dan menjadi alat kekuasaan.

Bila saat ini masyarakat melihat KPK terlihat terbang pilih terhadap kasus korupsi, bisa jadi ke depan akan lebih mandul lagi. Kasus-kasus yang menyangkut elite kekuasaan akan tenggelam karena adanya unsur kepentingan kekuasaan melalui tangan Dewan Pengawas dengan kewenangannya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, keberadaan Dewan Pengawas rawan konflik kepentingan. Hal ini tercermin dalam perebutan jumlah anggota Dewan Pengawas dari pemerintah dan DPR RI. Sangat mungkin penyadapan akan bocor.

Namun pemerintah dan DPR meyakinkan bahwa revisi UU KPK ini akan menguatkan institusi itu, bukan sebaliknya. Sayangnya, mereka tak pernah meyakinkan bahwa UU yang baru ini akan menjamin korupsi akan hilang atau berkurang.

Fakta menunjukkan, keberadaan KPK tak membuat kasus korupsi terhenti. Justru banyak orang yang terlibat korupsi. Elite-elite kekuasaan pun tak jera dengan penangkapan oleh KPK. Jerat hukum pun seperti berlalu begitu saja.

Ini sebenarnya sebagai tanda, korupsi bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah masalah sistemik. Korupsi merajalela karena sistem demokrasi sekuler yang mengharuskan sistem politik berbiaya tinggi. Semua harus pakai uang. Sementara, ketakwaan tak pernah ditanamkan dan jadi pijakan.

Maka, sekuat apapun KPK, kalau sistemnya tetap mendorong orang untuk korupsi dan memisahkan agama dari pengaturan negeri ini, selama itu pula korupsi akan hidup.

Jalan satu-satunya menghentikan korupsi adalah ganti dengan sistem Islam. Belum dicoba *kan?* **mujiyanto**



ADA REVISI, ADA KONSPIRASI?

Publik bertanya-tanya, mengapa UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibahas secara tertutup dan kemudian tiba-tiba disetujui oleh DPR untuk direvisi. Dalam waktu sekejap, rezim Joko Widodo pun segera mengirimkan surat persetujuan terhadap revisi tersebut.

Pertanyaan pun kian melebar, benarkah itu terkait dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru? Sebab, usulan revisi UU KPK ini bisa dikatakan bersamaan dengan selesainya pemilihan pimpinan KPK.

Pro dan kontra terhadap revisi UU itu kian menganga. Hampir semua elemen masyarakat sipil dan akademisi menentang keras revisi itu. Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) menyatakan sikap menolak revisi UU KPK yang dibahas di DPR. Mereka mendatangi KPK untuk menolak revisi UU KPK tersebut. "Kami sangat prihatin atas adanya kasus-lah dikatakan karena Undang-Undang KPK akan direvisi, sudah terlihat sampai sekarang," kata

Ketua Umum Pergubi Prof Gimbal Doloksaribu di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (13/9).

Suatu yang jarang terjadi di era Jokowi ada kalangan kampus, apalagi ini para profesor, sampai ikut turun gunung menentang kebijakan pemerintah. Biasanya, selama ini kalangan kampus diam seribu bahasa.

Di Universitas Gajah Mada, dosen dan civitas akademika menolak RUU KPK yang baru. Guru Besar Fakultas Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo pun membacakan puisi. Inti puisi tersebut adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mau dimanfaatkan pihak tertentu dalam menghancurkan KPK.

Ia mengatakan, langkah para legislator itu bertujuan untuk memperlemah KPK demi menyelamatkan kursi politiknya masing-masing. "Kita saat ini bersedih, andai kata Presiden sudah jadi bagian dari yang ada di bawah ketiak DPR (RI) untuk kemudian melemahkan KPK," ucapnya saat menghadiri acara deklarasi UGM tolak pelemahan KPK di Balairung, Ge-

dung Pusat UGM, Yogyakarta, Ahad (15/9).

Sebelumnya, pimpinan KPK mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat, (13/9). Penyerahan kekuasaan itu merespons revisi UU KPK yang mereka merasa tidak dilibatkan sama sekali.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama dua wakilnya, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif, mengumumkan pengembalian mandat di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara dua pimpinan lainnya, Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan, tak terlihat.

"Kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati, pada hari ini, Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah," kata Agus.

Namun sesuai perkembangan politik, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Senin (16/9) menyatakan, "Pimpinan KPK tidak ada satu pun yang me-



"Kita saat ini bersedih, andai kata Presiden sudah jadi bagian dari yang ada di bawah ketiak DPR (RI) untuk kemudian melemahkan KPK."

ngundurkan diri," ujar Erry dalam konferensi pers di Gedung KPK. Ini sekaligus meralat pernyataan komisioner KPK Saut Situmorang yang menyatakan mundur pada pekan sebelumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai pembahasan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tampak tertutup dan dilakukan buru-buru.

"Mengapa UU KPK itu seakan-akan tertutup dan dikebut diselesaikan? Ada kepentingan apa sehingga tertutup antara pemerintah dan parlemen? Contohnya diusulkan oleh badan legislatif dimasukkan ke paripurna, pendapat para fraksi pun tidak terbuka tapi ditulis dan langsung diketok dikirim ke pemerintah. Presiden seharusnya punya waktu 60 hari untuk memikirkan itu tapi tidak lama surat persetujuan dikirim lagi ke DPR," kata Laode di gedung KPK Jakarta, Kamis (12/9).

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam keterangannya mencium bau kepentingan politik di balik revisi ini. Sebab, banyak anggota Dewan yang terja-

ring oleh KPK. Selama lima tahun terakhir ada 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Maka, ICW menegaskan, agar DPR segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Karena akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi.

Tak Didengar

Meski suara penolakan terhadap revisi UU KPK ini begitu kencang, DPR dan pemerintah bergeming. Mereka terus saja membahas revisi itu dengan sangat cepat. Senin (16/9) hingga larut malam, DPR bersama pemerintah mengebut pembahasan revisi itu.

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin menyepakati poin-poin revisi.

Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya mengejar waktu jelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2014-2019 pada akhir September. "Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini. Jadi masa periode ini kita selesaikan karena dalam sejarah DPR tidak pernah, jarang sekali, *carry over*," jelasnya seraya meyakinkan tidak ada agenda pelemahan KPK dalam revisi kedua.

Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu, *pertama*, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. *Ketiga*, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. *Keempat*, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. *Kelima*, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai de-

Aspirasi Siapa?

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/9). Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Massa terdiri atas kaum remaja, ibu, dan anak-anak.

Di atas mobil bak terbuka, orator meneriakkan jargon seperti "Dukung revisi UU KPK", "Pecat komisioner KPK", dan "Bubarkan WP KPK". Sementara massa seperti tak serius mengikuti aksi itu. Sebagian malah duduk-duduk dan ngobrol. Sebagian terus mengisap rokoknya.

Seorang pengunjung rasa mengaku datang ke tempat itu karena diajak oleh seorang koordinator bernama Sari. Warga dari kampung di Cipinang itu datang menggunakan Metromini bersama dengan tetangganya.

Dengan polos wanita ini mengaku mendapat bayaran Rp 50 ribu. "Dapat *snack-snack* juga. Per jam [hitungannya]. Sampai magrib," katanya. Namun, ia mengaku tak tahu apa pun mengenai isu yang dibawa untuk aksi. "Enggak tahu apa-apa saya. Saya *mah* ikut meramaikan saja. Diajak doang. Enggak tahu apa-apa," katanya sambil senyum.

Tidak hanya wanita ini, wanita lainnya yang juga datang ke depan gedung KPK dan mengaku dari Tanah Tinggi, Senen, pun mengaku tak tahu apa-apa soal aksi itu. Yang penting datang dan dapat uang.

Esok harinya aksi serupa lagi-lagi terjadi di KPK. Kali ini massanya didominasi para pemuda dengan menyebut dirinya *alliansi*. Di sela-sela itu ada yang mengaku masih duduk di bangku SMA membentangkan poster: 'Presiden bekukan aktivitas pimpinan KPK'. Ia mengaku diajak tetangganya.

Remaja yang lain mengaku mendapatkan uang Rp 50.000 untuk ikut unjuk rasa di depan gedung KPK. "Yang anak-anak dapat Rp 50.000, kalau yang lain enggak tahu Bang," katanya.

Yang jadi pertanyaan, aspirasi siapa yang mereka sampaikan? [] **emje**

ngan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. *Keenam*, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. *Ketujuh*, terkait sistem kepegawaian KPK.

Pembahasan revisi UU KPK ini pun tak melibatkan KPK. Senin (11/9) KPK sendiri baru berkitik surat kepada DPR. "KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima *CNNIndonesia.com*, Senin (16/9).

Ia menambahkan DPR sebaiknya tidak lupa untuk membuka pintu bagi masukan masyarakat dan akademisi demi kebaikan bersama. Febri juga meminta agar pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

Namun suara KPK itu sepeertinya hanya dianggap sebagai angin lalu. Selasa (17/9) siang, sidang paripurna DPR RI mengesahkan UU KPK yang baru. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.

Pemerintah yang diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU. Setelah itu, Fahri kembali mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota Dewan apakah menyetujui revisi itu menjadi UU? Mereka serempak menjawab: "Setuju".

Dengan UU KPK yang baru ini akan ada Dewan Pengawas KPK. Dewan ini akan diangkat oleh presiden.

"Berarti dugaan kita dari awal bahwa ini adalah *grand design* dari DPR dan pemerintah untuk melemahkan KPK sudah terkonfirmasi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (17/9).

Dihiasi Teror

Revisi UU KPK pun terjadi. Secepat kilat. Tak sampai satu bulan kelar. Suara para intelektual dikesampingkan. Ini tidak biasa dalam sebuah penyusunan sebuah undang-undang. Proses itu biasanya melibatkan para akademisi, bahkan harus ada naskah akademik terlebih dahulu.

Bahkan yang menyedihkan, ada teror di baliknya. Ahli hukum tata negara dari UGM Arifin Mochtar mengaku mendapatkan teror setelah banyak bicara menolak revisi UU KPK itu. Ia menceritakan, beberapa hari mendapatkan ratusan panggilan telepon dari nomor tak dikenal, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Teman-teman hari ini mengalami gangguan telepon yang luar biasa," katanya dalam diskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Bukan cuma dirinya yang mengalami teror tersebut, lanjutnya, sedikitnya ada 10 akademisi yang juga mendapatkan teror dari nomor tak dikenal. Semua akademisi yang diteror itu punya satu kesamaan sikap, yakni menolak revisi UU KPK. [] **mujiyanto**



Ada Konspirasi Lemahkan KPK?

Bukan tidak mungkin kasus-kasus besar seperti e-KTP, BLBI, Bank Century, dan kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan, perkebunan atau tambang akan dihentikan.

Ketika opini publik sedang dipenuhi wacana pemindahan ibu kota dan kasus kerusuhan Papua, tiba-tiba sidang paripurna DPR RI menyepakati untuk merevisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang yang berlangsung Kamis (5/9) itu sepi. Dari 560 anggota DPR, yang hadir hanya 70 orang. Padahal, namanya saja rapat paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto itu berjalan lancar. Tak ada perdebatan alot. Dan, pandangan fraksi-fraksi pun cukup disampaikan secara tertulis.

Seolah sudah tahu sama tahu, mereka semua setuju menjadikan revisi UU KPK sebagai RUU inisiatif DPR. Hanya butuh sekitar 20 menit, kesepakatan itu terjadi.

Ini lah yang membuat publik kaget serta heran. Bagaimana

mungkin sebuah revisi UU diproses sedemikian cepat?

Konon, pengusul revisi ini ada enam orang, yakni Masinton Pasaribu (PDI-P), Risa Mariska (PDI-P), Taufiqulhadi (NasDem), Achmad Baidowi (Partai Persatuan Pembangunan), Ibnu Multazam (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Saiful Bahri Ruray (Golkar).

Sehari berikutnya, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan agar DPR tak melemahkan KPK. "Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Jokowi di Solo, seperi dikutip dari *Antara*, Jumat (6/9).

Tapi, beberapa hari kemudian, publik kaget dengan pernyataan Istana bahwa Presiden Jokowi resmi mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UU tersebut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, surpres ini dikirim Rabu (11/9). Ia

menjelaskan, pemerintah telah merevisi draf daftar isian masalah (DIM) RUU KPK yang diterima dari DPR RI.

Ini lah yang membuat heran banyak pihak. Dalam diskusi bertema: 'Pelemahan KPK 4.0', Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai penandatanganan surpres mengenai revisi UU KPK ini penuh dengan kejanggalan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk berpikir sebelum mengeluarkan surpres.

"Kenapa 60 hari? Kalau Anda buka [UU] 12 [Tahun] 2011 [adalah] supaya presiden berhati-hati dan paham substansi undang-undang. Jadi, kalau dipikir buru-buru sekarang, masa diburu-buru? Ada waktu 60 hari untuk berpikir," kata Zainal dalam diskusi bertajuk 'Pelemahan KPK 4.0' yang

berlangsung di Gedung Dwiwarana KPK, Rabu (11/9).

Namun, usut punya usut, pemerintah sendiri sebenarnya sudah lama menyetujui revisi itu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, dalam beberapa kali rapat konsultasi DPR dan Presiden, revisi UU KPK itu masuk dalam pembahasan dan pemerintah memberikan lampu hijau.

Pelemahan KPK

Dalam *draft* revisi UU KPK, ada beberapa hal krusial yang menjadikan banyak kalangan menilai hal itu sebagai upaya melemahkan KPK. Di antaranya yakni:

Status Pegawai KPK. Seluruh pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ini dinilai akan berdampak pada independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara. Sebab, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pengawasan akan melibatkan kementerian terkait.

Selain itu, berdasarkan *draft* itu pula nantinya wadah pegawai KPK akan digantikan oleh Korpri.

Dewan Pengawas. Dewan ini dipilih oleh DPR. Proses hukum KPK seperti penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan, memerlukan izin Dewan Pengawas. Ini dinilai berpotensi memiliki konflik kepentingan dalam melakukan tugasnya. Sehingga, proses hukum yang dilakukan KPK rentan bocor.

Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3). Kewenangan itu dinilai akan membuat penanganan kasus menjadi rawan untuk diintervensi. Hal itu juga dinilai akan memengaruhi menurunnya standar KPK dalam penanganan kasus. Sebab, penanganan kasus besar dan lintas negara dipandang akan sangat sulit diselesaikan dalam

waktu setahun.

Tak Ada Lagi Kasus yang Meresahkan Masyarakat. Penanganan kasus oleh KPK dibatasi hanya pada: *pertama*, kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara. *Kedua*, kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Tak ada lagi kategori kasus yang meresahkan masyarakat. Hal itu dinilai membatasi kewenangan KPK.

Penyelidik KPK Hanya Berasal dari Kepolisian. KPK hanya dibolehkan untuk merekrut penyelidik dari pihak Kepolisian. Ini dinilai bisa mengganggu independensi penyelidikan yang dilakukan KPK. Sebab saat ini, penyelidik KPK direkrut secara independen sebagai Pegawai Tetap dari berbagai keahlian. Aturan itu membuat penyelidik independen tidak akan ada lagi. Serta, nantinya penyelidik tidak punya kapasitas beragam dalam menghadapi kerumitan kasus.

Dengan *draft* revisi UU yang baru ini, bukan tidak mungkin kasus-kasus besar seperti e-KTP, BLBI, Bank Century, dan kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan, perkebunan atau tambang akan dihentikan. Sebab, waktu kewenangan KPK dibatasi waktu. Padahal, kasus tersebut membutuhkan waktu lama karena perlu audit yang memakan waktu untuk menemukan potensi kerugian keuangan negara sebagai salah satu petunjuk pengusutan kasus.

Ujung-ujungnya, bila revisi itu jadi, elite-elite kekuasaan yang selama ini diduga terlibat dalam kasus-kasus tersebut bisa tersenyum gembira karena KPK kehabisan waktu untuk mengungkap kasusnya. **emje**

Isu Taliban dari Istana

Beberapa kalangan menyebut ada kelompok Taliban di KPK. Mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas menduga narasi polisi atau kelompok Taliban berasal dari pihak Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk mempolitisasi dan melemahkan KPK.

Meski demikian, Busyro tidak menyebut secara gamblang siapa orang di Istana yang mencuatkan isu tersebut hingga muncul ke permukaan.

"Ini dipolitisir, dan dipolitisasi itu ada indikasi dari Istana, orang Istana," kata Busyro, saat ditemui di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (14/9).

Ia menceritakan bahwa sebenarnya istilah polisi Taliban itu sudah ada sejak lama di internal KPK. Bahkan, sebelum ia menjabat sebagai wakil ketua pada periode 2011-2015.

Mulanya, ia mengaku sempat heran terhadap istilah Taliban tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pun mengerti bahwa istilah itu hanyalah

kiasan dan digunakan untuk menggambarkan militansi para penyidik.

"Pak ini enggak ada konotasi agama, memang apa? Karena ini *icon*. Taliban itu menggambarkan militansi orang-orang Afghanistan, dan banyak penyidik KPK itu militan," katanya.

Ia juga menampik istilah polisi Taliban dikaitkan dengan agama tertentu. Apalagi, jika istilah itu diidentikan dengan radikalisme.

"Ini ada (penyidik) kristian (beragama) Kristen, ini (penyidik) Kadek (beragama Hindu), ini Novel cs dari Islam, jadi mereka biasa-biasa saja, jadi Taliban itu enggak ada istilahnya dalam konteks radikal," ujarnya.

Dalam *draft* revisi UU KPK, nantinya semua pegawai KPK adalah ASN. Konsekuensinya, tidak ada lagi penyidik independen. Jadi kelompok Taliban akan dihilangkan. Sebab, ASN harus tunduk pada atasan. Bukan begitu? **emje**

KPK Tak Buat Koruptor Jera

Justru sistem demokrasi itu sendiri yang memicu terjadinya korupsi. Terlebih lagi, demokrasi menggunakan prinsip sekularisme yakni memisahkan agama dari kehidupan.



Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak membuat jera para pelaku korupsi. Buktinya, sejak lembaga itu didirikan tahun 2003, kasus korupsi bukannya berkurang, tapi terus bertambah.

Hingga akhir 2018, ada 887 perkara yang ditangani KPK. Yang paling banyak adalah perkara suap menyuap, mencapai 564 perkara. Perkara-perkara itu melibatkan lebih dari seribu orang.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun membeberkan data lembaganya. "Kalau kita lihat data di website KPK saat ini, lebih dari seribu perkara korupsi sudah ditangani. Tapi ini bukan hanya soal jumlah orang yang ditangkap dan diproses hingga divonis bersalah melakukan korupsi saja. Jabatan pelaku korupsi juga terbaca jelas," kata Agus kepada wartawan, Jumat (6/9).

Ia membeberkan, pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian Kepala Daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ini berdasarkan data sampai Juni 2019.

Selain anggota DPR, DPRD, kepala daerah, ada 27 menteri dan kepala lembaga yang dijerat, dan 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat eselon I, II, dan III. Bahkan yang memakai baju oranye adalah Ketua DPR RI, Ketua DPD R, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Agus menampik pihaknya terbang pilih dalam menjerat para tersangka korupsi. Dengan UU KPK yang saat ini berlaku, Agus menganggap kinerja KPK tidak pandang bulu. Bila revisi UU KPK mulus terjadi di DPR, ia menyebut ada pasal-pasal yang bisa mematikan kinerja KPK selama ini.

Namun kalangan pegiat antikorupsi masih belum puas

dengan kinerja KPK ini. Mereka menilai KPK hanya menangani kasus-kasus minor alias kasus-kasus kecil. Sementara kasus-kasus kakap dan melibatkan elite-elite kekuasaan belum dituntaskan. Sebut saja kasus BLBI, Century, e-KTP, Buku Merah, Bus Transjakarta, skandal RS Sumber Waras, dll.

KPK pun dinilai menjadi kepanjangan tangan elite-elite kekuasaan. Ini terlihat dari gamangnya KPK menangani kasus-kasus yang melibatkan elite kekuasaan. Indikasi lainnya adalah tokoh-tokoh yang menjadi tim seleksi calon pimpinan KPK. Tokoh tersebut dianggap sebagai cermin oligarki politik yang ada.

Meski tak sesuai harapan, yang pasti KPK masih menjadi momok bagi politikus dan pejabat yang ingin melakukan korupsi. Komisi antikorupsi ini telah membongkar berbagai modus korupsi, dari *mark-up* anggaran, suap perizinan, kuota impor, hingga jual-beli jabatan, bahkan korupsi di sektor pertambangan dan perkebunan. Inilah yang mengusik kepentingan elite penguasa dan para politikus.

Sistem Rusak

Korupsi bukanlah sekadar penyakit individual. Terbukti, justru para pelaku korupsi bukanlah orang yang miskin. Banyak di antara mereka adalah orang kaya dan memiliki kedudukan. Suap-menyuap—sebagai bagian korupsi—pun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar kepada pejabat/aparat negara.

Muncul pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Sejak awal politik demokrasi adalah 'politik transaksional'. Sudah menjadi rahasia umum, demokrasi identik dengan uang. Siapa yang ingin meraih atau mempertahankan kekuasaan harus memiliki uang. Tak heran, demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi. Mahal.

Hanya saja, tidak semua orang yang berambisi mengambil

kursi kekuasaan dan mempertahankannya memiliki cukup uang untuk itu. Terjadilah simbiosis [kerja sama] dengan para pemilik modal. Sebagai konsekuensinya, para pemilik modal mendapatkan berbagai 'kue kekuasaan' yang diwujudkan dalam wujud kebijakan dan perlindungan. Tidak ada sesuatu yang gratis.

Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa justru sistem demokrasi itu sendiri yang memicu terjadinya korupsi. Terlebih lagi, demokrasi menggunakan prinsip sekularisme yakni memisahkan agama dari kehidupan. Tidak ada landasan ketakwaan. Yang terjadi, aturan Tuhan disingkirkan ketika mereka menjalani kehidupan, kecuali saat ibadah saja. Lahirlah orang-orang munafik. Mengaku Muslim, tapi korupsi.

Dengan prinsip itu, suap-menyuap, menyalahgunakan kekuasaan, gratifikasi, dan sejenisnya menjadi hal yang dianggap wajar. Dianggap tak berdosa karena tidak boleh ada campur tangan

Tuhan di dalamnya. Akhirnya, prinsip ini melahirkan gaya hidup permisif alias serba boleh.

Wajar bila mengatasi korupsi dalam sistem demokrasi ini menjadi sangat sulit, bahkan mungkin mustahil. Bagaimana mau dicegah sementara sistemnya sendiri mendorong orang untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan secara ilegal? Biaya politik yang mahal harus ditutupi, sementara gaji yang didapatkan tak mencukupi, akhirnya ya korupsi.

Sistem Islam

Mengingat korupsi adalah persoalan sistemik, maka penanganannya pun harus sistemik. Selama negeri ini tetap menerapkan sekularisme dengan demokrasi sebagai salah satu pilarnya, maka selamanya korupsi akan terus eksis dan bahkan bisa makin canggih. Tidak akan hilang, apalagi lagi menghilang.

Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mengganti sistem ter-

sebut dengan Islam. Dengan syaria Islam, masyarakat dan pejabat maupun birokrat terikat dirinya dengan keimanan. Ketakwaan menjadi landasan dalam setiap langkah kehidupan. Tidak ada kebebasan berdasarkan hawa nafsu, yang ada adalah keterikatan dengan syaria Allah SWT.

Bisa dibayangkan bila ini yang terjadi, kehidupan akan dipenuhi keimanan. Siapa pun dia akan merasa diawasi oleh Allah SWT. Inilah benteng pertama untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tidak cukup di situ, Islam memberikan seperangkat aturan untuk mencegah secara faktual agar para pejabat dan birokrat tidak tergiur dengan korupsi. Caranya dengan mencukupi kebutuhan mereka dengan layak. Dan, pada ujungnya, Islam memiliki seperangkat aturan untuk menindak mereka yang korupsi agar jera. **emje**

Cegah Korupsi dengan Aturan Ilahi

Pernahkah Anda mendengar, bagaimana cara sistem sekuler demokrasi mencegah korupsi? Mungkin tak ada, kecuali mengingatkan dengan agama. Tapi, secara prinsip demokrasi, sebenarnya agama ini tak boleh diikutkan dalam urusan seperti ini. Apa mau dikata, tak ada jalannya.

Inilah yang membedakan dengan Islam. Sejak awal, prinsip ketakwaan menjadi pedoman. Sistem Islam mendidik rakyatnya agar menjaga diri dari memakan harta haram. Dilarang mengambil harta milik orang lain. Suap menyuap adalah tindakan dosa. Menyalahgunakan kekuasaan bisa mengantarkan pelakunya ke neraka. Dengan penanaman yang kuat, prinsip-prinsip ini akan mencegah rakyat untuk berbuat maksiat, termasuk korupsi.

Selain itu, Islam pun memiliki langkah preventif.

Di antaranya adalah, pertama, rekrutmen SDM aparat negara yang wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (*syakhshiyah islamiyah*). *Kedua*, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. *Ketiga*, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. *Keempat*, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. *Kelima*, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. *Keenam*, adanya teladan dari pimpinan. Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. *Ketujuh*, pengawasan penuh oleh negara dan masyarakat. **emje**

**Novel Baswedan,
Penyidik Senior KPK**

Ada Persekongkolan Membunuh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di persimpangan jalan. Tetap seperti semula atau tenggelam tinggal nama. Benarkah ada pihak-pihak yang ingin melemahkan lembaga tersebut? Lalu kenapa KPK menjadi sasarannya? Siapa yang punya kepentingan? Ikuti perbincangan wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Berikut petikannya.

Tetiba pemerintah dan DPR mau merevisi UU KPK. Tanggapan Anda?

Jelas revisi ini untuk mematikan KPK. Jadi saya lihat pemerintah tampak sekali sikapnya tidak mendukung pada upaya pemberantasan korupsi.

Indikasinya?

Banyak! Kita melihat bahwa RUU ini dibuat dengan terburu-buru, RUU ini tidak melibatkan KPK. Semua poin-poin perubahannya itu melemahkan KPK. Tidak ada satu pun yang menguatkan, tidak ada satu pun yang KPK perlukan. Yang ada justru untuk menghadang apa yang KPK lakukan selama ini.

Apa saja poin yang melemahkan KPK itu?

Yang pertama SP3. SP3 itu dibuat dengan alasan hak asasi manusia. Sekarang masalahnya dari seribu tersangka KPK yang pernah diajukan yang terkait hak asasi manusia yang mana? Kalaupun ada paling hanya satu dari seribu.

Kalau kita lihat sebaliknya, mengapa sih dulu pembuat UU membuat UU agar KPK tidak berwenang membuat SP3? Itu setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, tidak dikehendaki KPK menetapkan tersangka dengan terburu-buru atau karena suatu kepentingan tertentu tetapi harus *prudent* dengan pembuktian. Itu *kan* bagus sekali! *Kedua*, ketika KPK menjalankan penyidikan maka KPK harus menguji pembuktiannya di persidangan, tidak diberhentikan di tengah jalan, sehingga itu sebagai pertanggungjawaban hukum yang jelas. Ini juga bagus sekali.

Ketiga, ketika suatu saat KPK terintervensi atau apa pun yang serupa dengan itu tetapi tidak

ada SP3 maka pengintervensi tidak bisa *ngapa-ngapain* lagi. Mengapa? Karena sudah jalan dan harus menuju ke persidangan, tetapi kalau ada SP3, peluang untuk KPK mengakomodir atau mengikuti perintah dari siapa pun yang melakukan intervensi itu justru malah terbuka.

Kalau soal penyadapan bagaimana?

Dikatakan bahwa penyadapan ini nantinya hanya boleh ketika penyidikan dan harus izin dewan pengawas. Kita lihat, KPK itu sering kali menggunakan penyadapan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dan itu hanya bisa dilakukan kalau KPK berwenang menyadap di tahapan penyelidikan.

Jadi, kalau hanya boleh menyadap setelah di penyidikan maka si pembuat usulan revisi ini menghendaki KPK tidak OTT lagi.

Lalu kita lihat lagi, harus dapat izin dewan pengawas. Hakim saja banyak tertangkap KPK dan tanpa melalui proses itu ada saja penyadapan di KPK yang bocor. Kalau melalui dewan pengawas, bukankah itu membuka peluang kebocoran semakin besar dan lebar?

Yang berwenang melakukan penyadapan kan bukan hanya KPK. Penyadapan juga dilakukan penegak hukum lain dan lembaga-lembaga lain. Dan mereka tidak pernah tuh direcoki terkait dengan hal itu. Sama sekali tidak ada.

Jadi kalau KPK dipertanyakan menurut saya aneh. Justru KPK-lah satu-satunya lembaga yang meminta dirinya diaudit ketika melakukan penyadapan. Dan lembaga lain tidak ada. Dan KPK melakukan semua proses tersebut dengan

lawfull, dengan mengikuti peraturan hukum acara maupun hal-hal yang berhubungan dengan penyadapan yang berlaku internasional.

Kalau kemudian KPK dipermasalahkan, lucu. Kalau alasannya adalah ini ada orang ngomong privasi *didengerin*, saya juga yakin kok omongan saya sekarang juga sedang disadap, tapi saya ngomong biasa-biasa saja karena saya tidak sedang berencana berbuat jahat.

Hal-hal ini tampak sekali menunjukkan bahwa itu alasan yang mengada-ada.

Kalau Dewan Pengawas-nya sendiri bagaimana?

Dewan Pengawas dibuat untuk mengawasi KPK. Memang KPK berlaku apa sehingga harus diawasi? Apakah ada masalah serius sebelumnya yang membuat KPK itu harus diawasi? Dan pertanyaannya apakah selama ini KPK tidak diawasi?

Coba kita lihat! KPK diawasi oleh BPK dalam masalah keuangannya. KPK diawasi oleh lembaga peradilan dalam memproses penegakan hukumnya. KPK diawasi oleh DPR dan tentu saja presiden terkait dengan apa yang dilakukan dalam mekanisme kerjanya sehari-hari. KPK juga menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik.

Kan itu sudah merupakan pengawasan! Mau pengawasan yang bagaimana lagi?

Bagaimana dengan revisi yang menyebut penyidik dan penyidik di KPK itu harus dari Polri?

Mengapa harus direvisi seperti itu? Bukankah MK sudah menetapkan bahwa kewenangan KPK mengangkat penyidik

sendiri itu sah dan tidak bertentangan dengan UU. Sudah berkali-kali diuji terkait hal itu dan tidak ada masalah.

Nah, membuat kebijakan atau usulan agar penyidik dan penyidik KPK harus dari Polri semua ini maksudnya apa? Apakah pengusul ini berpikir penyidik dan penyidik dari Polri ini sukses memberantas korupsi selama ini dan KPK disuruh meniru Polri? Ini kan menurut saya hal yang konyol.

Bagaimana pula dengan usulan pegawai KPK harus ASN?

Di Indonesia itu tidak semua pegawai lembaga negara sebagai ASN. Bahkan yang saya dengar, Kejaksaan juga sedang meminta keluar dari ASN. Polri juga bukan ASN. Jadi ketika dikatakan pegawai KPK harus ASN, itu maksudnya apa?

Apakah maksudnya agar pegawai KPK itu menurut ketika disuruh-suruh tertentu? Apakah maksudnya agar pegawai KPK itu bisa dipindahkan ke lembaga-lembaga lain? Ini menurut saya tidak pas. Mengapa? Kepentingan menjaga pegawai KPK agar tetap *independent* haruslah menjadi hal yang sangat penting.

Bahkan kalau kita lihat di konvensi-konvensi yang Indonesia juga mengikutinya, itu dikatakan lembaga dan pegawai pemberantasan korupsi itu harus *independent*. Dalam RUU ini yang terjadi malah sebaliknya! Hal-hal begini yang saya katakan janggal dan aneh.

Kejanggalan dan keanehan lainnya?

Belakangan ini banyak demo bayaran, yang demonya sengaja memojokkan KPK, menyerang KPK bahkan kemarin

sempat melempari kantor KPK. Kan lucu!

Ditambah lagi kita lihat kelompok tertentu atau orang-orang tertentu sengaja *mem-framing* berita-berita yang saya yakini bohong, tentang KPK. Misalnya, dikatakan di KPK itu ada kelompok radikal, ada kelompok Taliban, pegawai KPK itu bisa menangani perkara sendiri tanpa izin pimpinan. Itu semua *kan* bohong dan omong kosong.

Jadi poin-poin ini menggambarkan memang ini seperti ada desain yang dibuat oleh kelompok tertentu untuk kepentingan koruptor.

Ditambah lagi kalau dilihat orang-orang yang berjuang untuk menentang ini, baik itu pegawai KPK, tokoh, aktivis, dosen, mahasiswa, banyak di antara mereka yang ponselnya *di-hack*.

Dari situ tampak sekali bahwa ini bukan suatu hal yang normal, bukan suatu yang biasa-biasa saja, tetapi ini ada suatu persekongkolan di belakang itu. Karena tidak mungkin semua itu terjadi kebetulan.

Dengan kata lain ini ada bau konspirasi untuk melemahkan KPK?

Tepat! Tepatnya membunuh KPK! Bukan melemahkan tetapi membunuh KPK.

Siapa mereka itu?

Yang pasti mereka itu adalah pelaku-pelaku korupsi atau orang-orang yang sedang ingin membuat korupsi ke depan.[]



Wahyudi Almaroky,
Ketua Pembina LBH Pelita Umat

Demokrasi Alat Reproduksi Korupsi

Selama penentuan akar masalahnya keliru, selama itu pula solusi yang diberikan tidak menyelesaikan masalah. Begitu juga ketika keliru menentukan apa akar masalahnya sehingga terjadi korupsi. Lantas apa akar masalahnya dan bagaimana solusinya? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi Almaroky. Berikut petikannya.



Sebenarnya KPK itu perlu ada enggak sih?

Sesungguhnya jika keadaan negara ini normal dan baik-baik saja KPK tidak perlu ada. Jika semua institusi negara itu bekerja dengan normal dan ketika aparat penegak hukum yakni polisi dan jaksa yang bekerja dengan normal semestinya lembaga KPK tidak diperlukan.

KPK diperlukan ketika aparat penegak hukum yakni polisi dan jaksa yang semestinya memberantas korupsi, tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya dibentuk KPK. Padahal hadirnya KPK dalam tata negara ini termasuk pemborosan dan juga termasuk pembengkakan struktur kenegaraan "elephantiasis".

Dengan kata lain, didirikannya KPK lantaran lembaga kepolisian dan kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi?

Itu latar belakangnya. Dulu ada jaksa yang ditangkap KPK. Ada juga polisi yang ditangkap KPK. Ini menandakan dua lembaga tersebut memang bermasalah dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kok bisa lembaga yang seharusnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi malah diduduki pejabat-pejabat yang seolah melindungi koruptor?

Ya, ini dilakukan secara sistematis sehingga persoalan utama dalam pengisian jabatan itu dibangun melewati proses yang tidak gratis. Permasalahan utamanya adalah mekanisme pengisian jabatan tersebut yang melibatkan pihak-pihak yang selama ini banyak ditangkap KPK karena tindak korupsi.

Bisa kita lihat berapa

banyak anggota dewan yang ditangkap oleh KPK, juga berapa banyak pihak eksekutif yang ditangkap KPK. Sehingga ketika mereka yang menentukan pengisian jabatan itu dapat diduga merekalah yang punya kepentingan untuk melemahkan KPK. Atau mereka ingin menurut menempatkan orang-orang yang bisa mengamankan kepentingan mereka.

Jadi akar masalahnya di mana nih?

Akar masalahnya adalah pada sistem demokrasi yang begitu mahal dalam pengisian jabatan publik. Pesta demokrasi yang begitu mahal menghasilkan para pemimpin yang berutang. Silakan dibayangkan, seorang yang ingin menduduki jabatan anggota dewan, untuk mengikuti pesta demokrasi menghabiskan berapa milyar?

Demikian juga orang yang ingin dipilih jadi menteri tentu harus punya akses kekuasaan baik dari anggota dewan tersebut atau pihak eksekutif atau timses presiden, sehingga membutuhkan biaya yang begitu mahal.

Dengan proses yang seperti ini maka yang bisa menduduki jabatan publik adalah mereka yang memiliki modal atau yang didukung oleh orang-orang yang memiliki uang. Merekalah yang menentukan terpilihnya pengisian jabatan publik itu, tentu yang mendukung kepentingan mereka atau minimal tidak mengganggu kepentingan mereka.

Sekali lagi, jadi akar masalahnya adalah sistem demokrasi dengan biaya begitu mahal, terus menerus memproduksi para pejabat yang berwatak koruptor. Bukan hanya memproduksi para koruptor,

bahkan sistem demokrasi yang mahal ini mereproduksi para koruptor sehingga yang terjadi adalah para koruptor lahir terus untuk mengisi jabatan publik dan membuat aturan-aturan publik yang kelak akan mengatur dan menentukan nasib negeri ini.

Oleh karena itu solusinya bukan mendirikan KPK kan?

Tentu solusi harus cerdas. Cara yang cerdas itu dengan membangun sistem anti korupsi. Harus ada perbaikan sistem mekanisme pengisian jabatan publik yang memakan biaya mahal. Hal-hal yang menjadi sumber masalah terjadinya praktek-praktek korupsi ini yang harus diubah.

Jadi harus memperbaiki sistem atau mengganti sistem yang sudah ada ini dengan sistem yang lebih baik. Bukan malah mendirikan lembaga baru yang justru membebani anggaran negara.

Apalagi dengan penambahan itu justru secara kelembagaan malah terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan. Urusan pemberantasan korupsi ini baiknya diserahkan kembali kepada lembaga yang sudah berwenang menanganinya yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Justru mestinya kita memperbaiki dua lembaga itu untuk membersihkannya dari praktek korupsi. Sehingga negara ini tidak melakukan pemborosan anggaran.

Memang pengisian jabatan dalam sistem demokrasi itu sulit menghindari pembengkakan jabatan. Para politisi selalu ingin menduduki jabatan publik. Jika belum kebagian kursi maka ia akan usulkan ada jabatan baru atau bahkan membentuk lembaga baru agar ada pos

jabatannya.

Peristiwa penambahan jumlah pimpinan MPR RI menjadi 10 kursi itu menjadi bukti nyata dalam sistem demokrasi memerlukan jabatan baru.

Bagaimanakah solusi Islam dalam memberantas korupsi?

Solusi Islam dalam memberantas korupsi justru bermula dari sistem hukum yang diterapkan. Dengan tegaknya hukum Islam maka terbentuk individu bertakwa yang sangat takut melanggar hukum Allah juga takut korupsi.

Selain itu, dengan hukum Islam akan terbentuk lingkungan masyarakat bertakwa yang saling menjaga dan saling koreksi antar masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah langkah terakhir setelah sistem pencegahan.

Islam juga memberikan hukuman sangat berat bisa sampai hukuman mati. Masalahnya sekarang, kalau kita usulkan untuk diterapkan hukum-hukum Allah, para politisi dan pejabat hasil dari pesta demokrasi itu menolaknya.

Misalnya kalau kita usulkan untuk menerapkan hukum potong tangan maka mereka akan menolak dengan alasan masih banyak pencuri sehingga mereka beranggapan akan banyak orang yang dipotong tangannya. Kalau diusulkan hukuman mati atau tembak mati bagi koruptor tentu mereka menolak karena khawatir akan banyak yang ditembak mati.

Kongkretnya bagaimana?

Jauh sebelum terjadi praktek korupsi, Islam sudah mengharamkan terjadinya suap menyuap. Islam juga menutup pintu-pintu maupun celah untuk korupsi. Sumber terjadinya korupsi adalah biaya meraih

jabatan publik yang mahal. Islam sudah menutup celah itu.

Sistem hukum dalam Islam sudah sejak dini dirancang mencegah terjadinya korupsi. Sebagai contoh, dalam hal pengisian jabatan publik, Islam menggunakan sistem yang sangat murah. Jabatan khalifah tidak harus dipilih setiap 5 tahun, ini saja sangat murah. Selain itu, pengisian jabatan gubernur (*wali*) juga tidak harus ada pemilihan. Cukup diusulkan oleh majelis umat atau majelis wilayah di daerah itu kemudian disahkan oleh khalifah.

Model ini tentu sangat murah. Silakan dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah saat ini yang sangat mahal namun menghasilkan pemimpin yang tidak dijamin berkualitas bahkan tidak dijamin bebas korupsi. Ini yang membedakan dengan sistem demokrasi.

Apa keunggulan memberantas korupsi dengan menggunakan solusi Islam?

Keunggulannya solusi Islam adalah mencegah dan menutup celah terjadinya peluang korupsi. Dengan hukum Islam maka terbentuk individu takwa dan masyarakat takwa yang takut korupsi dan saling kontrol agar tidak korupsi.

Penegakan hukum pun hanya dilakukan jika memang terjadi orang bandel atau yang nekat untuk korupsi. Hukuman bagi koruptor pun akan berdampak pada dua hal yang menguntungkan pelaku dan negara. Ada pencegahan bagi negara dan ada pembersihan diri sebagai penghapusan dosa khusus kesalahan yang dihukum itu bagi pelakunya.[]



Mereka Bicara Upaya Pelemahan KPK



Prof Suteki,
Akademisi

Akan Tangani Kasus Recehan

Madesu, masa depan suram.

Itulah gambaran yang akan terjadi apabila revisi disetujui dan ketika perkara besar tidak tuntas ditangani bahkan justru terkesan ada keberpihakan penanganannya. *Downward law is greater upward law*. Berikut beberapa fakta yang diperkirakan akan muncul pasca buruknya penanganan perkara kelas kakap dan revisi UU.

Rakyat menjadi kurang atau bahkan tidak percaya lagi kepada KPK dan pengadilan.

Penetapan tersangka an SN dan istri oleh KPK akan bermasalah karena perkara pokoknya telah diputus sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) bukan pidana. Bisa juga yang bersangkutan lepas dari kasus ini.

Putusan MA menjadi mimpi buruk rakyat pencari keadilan khususnya bila berhadapan dengan para politisi dan pejabat besar yang terlibat dalam penerbitan SKL BLBI yang merugikan negara. KPK bisa lebih dipermalukan lagi.

Putusan ini akan menjadi preseden buruk di era Jokowi, di mana terjadi untuk pertama kalinya KPK dipecundangi, pesakitan KPK kelas kakap lepas dari jerat pidana. Kasus ini berpotensi mempersulit KPK untuk menangani kasus korupsi yg terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan/PMH.

KPK berpotensi hanya akan fokus menangani kasus recehan yang mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sedangkan untuk kasus besar lebih baik dihindari.

Korupsi berpotensi menjadi *evolutionary crime* yang sulit diungkap dan makin membuka peluang dilakukannya Tipikor di masa depan. Kejahatan ini makin lama makin "pintar" karena telah terjadi proses pembelajaran yang panjang sehingga menjadikan kejahatan ini bermutasi, bermetamorfosis terus sehingga sulit untuk diungkap.[]



Fahri Hamzah,
Wakil Ketua DPR RI

Anomali KPK

KPK menganggap sukses pemberantasan korupsi, yang tidak saja gagal tetapi mulai merusak kepastian hukum dan keselamatan sistem presidensialisme kita. KPK dengan serikat pegawai yang bagai perusahaan swasta itu sibuk berburu di kebun binatang. Tidak membantu presiden dalam pencegahan.

Dalam UUD 1945 Konstitusi Negara, politik legislasi hanya diserahkan kepada Presiden dan DPR dan sedikit DPD. Jadi Presiden Jokowi berhak punya politik legislasi. DPR berhak punya politik legislasi. Dan DPD terkait daerah. Tapi KPK tidak punya hak legislasi.

Presiden sudah mengingatkan bahwa orientasi pemberantasan korupsi itu bukan penangkapan tapi pencegahan. Tapi KPK sibuk dengan pengintaian, pengintipan dan penangkapan yang dalam UU KPK dan niat pembentukan KPK tidak pernah ada. Wajar kalau ini perlu dikoreksi.

Adakah cara pemberantasan korupsi yang senyap? Justru cara pemberantasan korupsi yang bising itu hanya ada di sini. Saya usulkan sejak awal agar KPK lebih baik sibuk mengurus audit daripada intip. Sibukkan diri dengan BPK supaya modus menyelamatkan kerugian negara diutamakan.

Saya kritik KPK sudah belasan tahun. Menulis dan melakukan penelitian yang saya terbitkan didiskusikan di kampus-kampus dan di tengah masyarakat. Saya tidak pernah berubah. Dan sekarang puncak keyakinan saya bahwa sistemnya bergoncang akibat anomali KPK. Ini soal sistem.

Saya terbiasa memikirkan sistem. Mungkin karena saya melihat dari dekat perubahan arah bangsa dari otoritarianisme ke demokrasi. Muncul KPK yang diniatkan untuk mengharmoni sistem yang membutuhkan "bimbingan transisi" tapi dikacaukan dengan penindakan yang sembrono tambah kacau.

UU 30/2002 dibuat dengan niat baik. Tapi Setelah jadi orang-orang berbisik, apa tidak bahaya kalau ini jatuh ke tangan orang yang salah. Dan kisah ini dibaca ulang oleh semua pembuat UU ini di pihak pemerintah dan DPR. Semua menyesal karena UU super ini telah disalahgunakan.

Saya minta Presiden Jokowi dan DPR enggak usah khawatir dengan kampanye negatif, ini berulang dan hanya emosi tanpa akal. Ini kampanye hitam yang gak pernah ada pikiran jernih di belakangnya, hanya nafsu menggunakan kekuasaan tanpa batas yang sudah jadi penyakit.[]



Bambang Widjojanto,
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Periode 2011-2015

Kekuatan Koruptor Dahsyat

KPK diluluh-lantakan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan capim KPK terasa menyengat. Parade kepongghahan dipertontonkan secara seronok. Calon yang oleh KPK dituduh nirintegritas dan tak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden.

Sinyalemen koruptif dengan adanya transaksi kepentingan beredar dan diyakini publik tak direspon secara memuaskan. Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan capim KPK yang perlu diklarifikasi. Pertanyaannya, *fit and proper* capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?

Ada pernyataan yang sering dilontarkan dan diikrarkan bahwa *Save KPK* adalah *Save Indonesia*. Jika kini KPK sudah tidak di-save lagi, apakah itu pertanda, Indonesia pun dipastikan sudah tidak akan dapat di-save lagi. Kalau begitu bisa kita ucapkan, selamat datang otoritarianisme?

Saat ini KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik di republik tapi tengah di porak-porandakan secara semena-mena. Karena itu, siapapun yang jadi bagian dari proses "penghancuran" KPK, dapat dituduh dan dipastikan, mereka adalah pihak & lembaga yang memang sudah tidak bisa dan tidak pantas lagi untuk dipercaya di republik ini.

Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang "meluluhlantakkan" KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya.

Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengorupsi Indonesia?[]



Prof Musni Umar,
Akademisi

Di Persimpangan Jalan

Jadi, KPK ini berada di persimpangan jalan karena pada awalnya didirikan KPK itu sebenarnya

untuk menegakkan hukum pada lembaga-lembaga yang selama ini sulit dijangkau oleh penegak hukum yang sudah ada. Dengan kondisi sekarang itu timbul persepsi masyarakat bahwa revisi UU KPK dalam rangka melemahkan peran KPK.

Kenapa publik akan menilai seperti itu karena yang mengusulkan revisi tersebut adalah teman-teman di DPR yang selama ini banyak mengalami OTT dan mereka tidak berdaya untuk melawan itu.

Lalu dipandang bahwa Presiden Jokowi mengikuti saja apa maunya para politisi, lagi-lagi persepsi publik seperti itu. Publik justru meminta agar presiden tidak begitu saja mengikuti kemauan para politisi yaitu revisi UU KPK, karena pasti akan mengaborsi kekuatan KPK selama ini, seperti tidak ada surat pemberhentian perkara, SP3 dan berbagai macam kekuatan KPK sebelum ini.

Keinginan untuk menjadikan pegawai KPK itu ASN itu akan dinilai sebagai cara untuk melemahkan KPK. Kalau mereka sudah jadi ASN, mereka tidak bisa lagi menggunakan kewenangan dan independensi. Karena itu dibutuhkan sebenarnya dalam penyelidikan KPK. Saat ini situasi sangat rumit dalam penegakan hukum.

Lalu ditambah saat ini hampir habis masa jabatan DPR yang saat ini, ditakutkan tanpa diketahui publik revisi itu diselesaikan. Dan publik tidak bisa mendapat tempat untuk kritik dan saran.

Jadi betul-betul KPK ini berada di persimpangan jalan.[]



Marwan Batubara,
Direktur IRESS

Penyelenggara Negara Rusak

Kita jelas kalau dibilang kecewa pasti, memang saat ini rakyat ini tidak perlu berharap banyak untuk sesuatu kehidupan bernegara yang lebih baik, yang ada siap-siap lah kondisi bernegara kita akan semakin runyam, semakin rusak.

Jadi bisa dibenarkan revisi undang-undang KPK ini melemahkan, meski mereka bilang tujuannya untuk memperkuat tapi dari caranya saja sudah terlihat, jadi ada undang-undang yang sebenarnya mereka langgar dalam hal merevisi undang-undang lebih detailnya tata caranya, dan itu mereka langgar, cara membentuk undang-undangnya sudah mereka langgar, kalau dituntut dari sana juga bisa sebenarnya.

Tapi undang-undang itu mereka langgar dan mereka pertontokan kepada publik, tapi tanpa melibatkan publik, seperti kejar tayang menjelang 30 hari masa jabatan habis, dan faktanya saat ini kita tidak ada keadaan memaksa yang harus merevisi Undang-Undang KPK kan?

Jadi fakta-fakta di lapangan ini sudah menunjukkan rusaknya penyelenggaraan negara dalam membentuk Undang-Undang KPK ini.[] **fs-ghi**



Nasib Orang yang Sangat Ingkar

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku"; Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala; Yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu; Yang menyembah sembah yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat" (TQS Qaf [50]: 23-26).

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang dua peristiwa besar yang akan dialami manusia. Yakni, datangnya sakaratul maut dan ditiupnya sangkakala oleh Israfil. Kedua peristiwa akan membuat manusia benar-benar melihat Hari Kebangkitan dan pembalasan yang disampaikan kepada mereka.

Ayat ini masih memberitakan tentang peristiwa yang terjadi pada Hari Kiamat.

Tersedia Catatan Amal

Allah SWT berfirman: *Wa qâla qarînuhu hadzâ mâ ladayya 'atîd* (dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku"). Secara bahasa, kata *qarîn* bermakna *mushâb wa mulâzim* (yang mene-mani dan menyertai). Oleh karena itu, istri juga bisa disebut sebagai *qarîn*. Lafadz *qarîn* merupakan *ism jins* (kata jenis yang menunjukkan makna umum), sehingga malaikat penggiringnya ada *qarîn*. Demikian juga malaikat Zabaniyyah dan orang yang menemani berjalan kaki di jalan juga *qarîn*.

Dalam konteks ayat ini, ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada sebagian yang mengatakan bahwa *qarîn* di sini adalah setan. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Zamakhshari. Menurutny, itu didasarkan pada firman-Nya: *Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Alquran), kami adakan ba-*

ginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya (QS al-Zukhruf [43]: 36). Juga QS Qaf [50]: 19-27 dan al-Zukhruf [43]: 38).

Sehingga ini mengisyaratkan bahwa yang digiring itu adalah pelaku kejahatan, orang fajir, dan orang fasik. Sedangkan kata *al-'atîd* bermakna *al-mu'add li al-nâr* (orang yang disiapkan ke neraka). Secara keseluruhan, ayat ini bermakna: Sesungguhnya setan berkata, "Ini adalah pelaku mak-siat, dia di sisiku sesuatu telah disiapkan untuk neraka Jahanam. Aku menyiapkannya dengan mengge-lincirkan dan menyesatkannya."

Dijelaskan juga oleh al-Zamakhshari, makna ayat ini adalah malaikat menggiringnya, malaikat satunya menjadi saksi, dan setan disertakan kepadanya seraya berkata, "Sungguh aku telah menyediakan dan menyiapkannya untuk neraka Jahanam disebabkan oleh penyimpangan dan penyesatanku." Penafsiran ini juga dipilih oleh Wahbah al-Zuhaili.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qarîn* di sini adalah malaikat. Menurut Abu Hayyan al-Andalusi, malaikat Zabaniyyah penjaga neraka Jahanam. Sedangkan menurut al-Hasan, Qatadah, dan al-Dhahhak malaikat diberikan tugas untuk mendampingi manusia.

Ibnu Zaid menafsirkannya malaikat yang ditugaskan sebagai *sâiq* (penggiring manusia). Dasarnya, firman Allah SWT dalam ayat 21. Sedangkan menurut Ibnu Ka-

tsir, malaikat yang ditugaskan Allah SWT untuk mencatat amal perbuatan anak Adam. Malaikat itu akan menjadi saksi pada Hari Kiamat atas perbuatan manusia.

Malaikat tersebut berkata: *hadzâ mâ ladayya 'atîd* (inilah [catatan amalnya] yang tersedia pada sisiku). Kata penunjuk *hadzâ* menunjuk kepada catatan atau kitab yang berisi semua amal manusia selama di dunia yang baik maupun yang buruk. Sedangkan kata *'atîd* bermakna yang disediakan dan didatangkan tanpa ada penambahan dan pengurangan.

Diberitakan ayat ini, malaikat tersebut berkata, "Ini catatan amalmu yang ada padaku dan tersedia padaku. Aku telah menyediakan." Mujahid menafsirkan perkataan malaikat tersebut: "Inilah yang Engkau tugaskan kepadaku terhadap anak Adam, sungguh kami telah menghadirkan catatan amalmu."

Dilemparkan ke Neraka

Setelah mendapat laporan malaikat, kemudian diberitakan Allah SWT berfirman: *Alqiya fî Jahannam kulla kaffâr 'anîd* (Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala). Huruf *al-alif* pada kata *Alqiya* merupakan *dhamîr al-itsnayni* (kata ganti yang menunjukkan dua). Menurut al-Farra' ini merupakan *khithâb* atau seruan untuk satu orang dengan *khithâb* dua orang. Dijelaskan al-Khalil dan al-Akhfasy, penggunaan bentuk *tatsniyah* (yang menunjukkan dua) itu merupakan bentuk bahasa Arab yang fasih yang memerintahkan satu orang dengan lafadz dua orang.

Menurut al-Mazini, firman-Nya: *alqiya* (lemparkanlah) bukan bermakna kata perintah untuk dua orang. Akan tetapi kata perintah bermakna dua kali, yakni: lemparkan, lemparkan.

Ada juga yang memahami dengan makna sebenarnya. Yakni, Allah SWT memerintahkan kepada dua malaikat untuk melemparkannya. Dikatakan bahwa dua malaikat itu adalah *al-sâiq* (malaikat penggiring) dan *al-hâfîz* (malaikat penjaga amalan).

Menurut Ibnu Katsir, lahiriah lafaz ini ditujukan kepada *al-sâiq* (malaikat penggiring) dan *al-syahîd* (malaikat penyaksi). Malaikat

penggiringlah yang menghadirkannya ke tempat penghisan. Setelah malaikat penyaksi menyampaikan kesaksian tentangnya, lalu Allah SWT memerintahkan kepada keduanya agar mencampakkannya ke dalam neraka Jahanam, tempat kembali yang paling buruk.

Yang diperintahkan Allah SWT kepada malaikat untuk dilemparkan ke dalam neraka Jahanam adalah orang-orang yang memiliki sifat *kaffâr* (orang yang sangat ingkar dan keras kepala). Kata tersebut merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata *al-kufr* (kekufuran). Maknanya *syadîd al-kufr* (sangat kufur). Ibnu Katsir memaknainya sangat ingkar dan mendustakan kebenaran.

Bisa juga berasal *al-kufrân* (ingkar). Maknanya, mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT dengan sangat banyak.

Sedangkan *'anîd* merupakan bentuk *fa'il* yang bermakna *fâ'il* dari kata *anada unûd[an]* (keras kepala, keras hati). Menurut Qatadah, kata tersebut bermakna menyimpang dari kesesatan). Al-Hasan menafsirkannya yang ingkar lagi membangkang.

Kemudian dalam ayat berikutnya, Allah SWT berfirman: *mannâ' li al-khayr mu'tad[în] murîb* (yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu). Kata *mannâ'* merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata *mana'a* (mencegah, menghalangi) yang bermakna banyak mencegah atau menghalangi.

Sedangkan *al-khayr*, menurut Fakhruddin al-Razi, penafsiran-nya terkait dengan makna kata *kaffâr* dalam ayat sebelumnya. Jika kata tersebut berasal dari kata *al-kufrân* yang berarti mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT, maka makna *mannâ' li al-khayr* di sini adalah banyak menolak menunaikan kewajiban harta. Seolah dikatakan: "Dia mengingkari nikmat-nikmat Allah dan tidak memberikan sedikit pun darinya untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya."

Akan tetapi jika kata *kaffâr* dalam ayat sebelumnya berasal dari *al-kufr* yang berarti mengingkari bukti-bukti keesaan Allah SWT yang sangat kuat dan jelas, maka *mannâ' li al-khayr* di sini bermakna orang yang sangat keras menghalangi keimanan.

Sedangkan *mu'tad[în]* adalah yang melanggar batas dalam

IKHTISAR:

1. Nasib orang-orang yang sangat ingkar dan keras kepala, mereka menghalangi kebajikan, melanggar batas, dan ragu-ragu yang menyekutukan Allah SWT.
2. Pada Hari Kiamat mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam.

membelanjakannya dan juga dalam mempergunakannya hingga melampaui garis yang ditentukan. Fakhruddin al-Razi, juga mengaitkan penafsiran kata tersebut dengan kata *mannâ'* dalam ayat sebelumnya. Jika bermakna *mannâ' al-zakâh* yang berarti tidak menunaikan kewajiban, dan lebih dari itu adalah mengambil harta haram dengan riba, mencuri, dan semacamnya sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik.

Namun jika bermakna *man' al-îmân* (menghalangi keimanan), seolah dikatakan: "Menghalangi keimanan dan tidak hanya puas dengannya hingga lebih dari itu dia menghinakan dan menyakiti orang yang beriman serta membantu dan menolong orang yang ingkar."

Sifat lainnya adalah *murîb*. Menurut al-Hasan dan Qatadah, *murîb* adalah orang yang ragu dalam tauhid. Ibnu Jarir al-Thabari menafsirkannya orang yang ragu terhadap keesaan Allah SWT dan kudrat-Nya atas segala sesuatu.

Kemudian Allah SWT: *Alladzî ja'ala ma'al-Lâh ilâh[an] âkhar* (yang menyembah sembah yang lain beserta Allah). Artinya, menyekutukan Allah, sehingga dia menyembah selain Allah di samping Dia.

Lalu diakhiri dengan firman-Nya: *Fa alqiya'hu fî al-adzâb al-saydîd* (maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat"). Menurut al-Qurthubi, al-Syaukani, dan al-Zuhaili ini merupakan *ta'kid* (penegasan) terhadap perintah sebelumnya.

Demikianlah. Orang-orang kafir dengan segala sifat buruk mereka akan dibangkitkan pada Hari Kiamat. Semua catatan amalnya akan diserahkan kepada Allah SWT. Tak ada yang terlewat dari amal perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam Jahanam. *Wal-Lâh a'lam bial-shawâb*.[]

Kemenag Akan Hapus Materi Perang Pengamat: Manipulasi Terang-Terangan

Ada pihak terkait secara serius dan sadar sedang berusaha melakukan upaya mendistorsi bahkan memanipulasi sejarah.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menyatakan, tidak ada lagi materi tentang perang dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah. Hal itu diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2020.

"Kita akan hapuskan materi tentang perang-perang di pelajaran SKI tahun depan. Berlaku untuk semua jenjang, mulai dari MI (madrasah ibtidaiyah) sampai MA (madrasah aliyah)," kata Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Umar, di Jakarta, Jumat, (13/9) sebagaimana dikutip *republika.co.id*.

Alasannya, agar Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang selalu dihubungkan dengan perang. "Kami ingin menghapuskan pandangan-pandangan orang yang selalu saja mengaitkan Islam itu dengan perang. Kita juga ingin mendidik anak-anak kita sebagai orang-orang yang punya toleransi tinggi kepada penganut agama-agama lainnya," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut pengamat sosial dan politik Iwan Januar menilai, itu artinya ada pihak terkait secara serius dan

sadar sedang berusaha melakukan upaya mendistorsi bahkan memanipulasi sejarah. Langkah ini ambigu. Bagaimana membahas ayat-ayat jihad, hadits-hadits peperangan, *sirah nabawiyah*?

"Jadi Kemenag sedang melakukan manipulasi secara terang-terangan terhadap ajaran dan sejarah Islam," ujarnya di Jakarta, Ahad (15/9).

Menurutnya, ini tanda pejabat Kemenag sudah mengidap *inferior complex* sekaligus fobia Islam. Di satu sisi mereka tidak percaya diri dengan agama sendiri, di sisi lain mereka juga punya 'ketakutan dan kebencian' pada agama sendiri.

"Inilah dampak kalau Muslim berislam tapi ingin menyenangkan orang lain, maka dia tidak akan sungkan mengacak-acak agama sendiri agar agama lain senang," sin-dirnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Fahmi Salim mempertanyakan rencana Kemenag tersebut, apakah kejayaan umat Islam pada zaman dahulu hanya didukung oleh iptek dan ekonomi tanpa adanya kekuatan dari militer?

"Apakah kejayaan Islam bisa diraih hanya dengan penguasaan iptek dan kemak-



■ Ahmad Umar

muran ekonomi dan perdagangan di dunia Islam tanpa ada kekuatan militer yang melindungi umat Islam dan capaian-capaiannya dari agresi dan gangguan negara-negara kafir?" katanya dalam rilisnya Senin (16/9).

Ia menegaskan, semua bangsa dan peradaban di dunia bangga dengan kekuatan militernya dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap kedaulatan mereka.

"Ini kok malah mau menghapus materi sejarah penaklukan Islam? Di mana dan

bagaimana bisa masa kejayaan Islam itu dapat dihadirkan secara utuh kepada peserta didik?" tanyanya.

'Serangan' atas rencana Kemenag itu membuat kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifudin itu segera mengeluarkan siaran pers. "Perang adalah bagian dari fakta sejarah umat Islam. Tidak benar kalau itu akan dihapus. *Review* lebih untuk menonjolkan bagaimana setiap fakta sejarah itu menjadi tonggak pembangunan peradaban," jelas Ahmad Umar Senin (16/9). []

ghifari

Sidang Lanjutan KH Heru Ahli Tak Punya Argumentasi

"Ketika saya tanyakan kekuatan bukti screenshot yang tidak pernah diakses oleh ahli berdasarkan pasal 6 UU ITE, ahli justru gelagapan."

Sidang lanjutan kasus KH Heru Ilyasa bergulir kembali Kamis (12/9) di Pengadilan Negeri Mojokerto. Jaksa menghadirkan dua ahli, yaitu ahli bahasa, dan ahli IT.

Dalam sidang tersebut, Ahmad Khozinudin, kuasa hukum KH Heru menilai ada keganjilan yang sama seperti sidang sebelumnya, yaitu adanya saksi yang tidak mengerti kasus yang menimpa Kyai Heru yang dipaksa diperiksa dan dihadirkan dipersidangan, dan tidak memiliki argumentasi yang kokoh.

"Ada masalah yang menurut saya fatal, karena ahli tidak memahami substansi penting UU ITE, khususnya dalam proses otorisasi legalitas bukti," jelasnya kepada *Media Umat*.

Ahli IT Diding Adi Prawoto, ketika diperiksa mengaku hanya menganalisis konten bukti berupa *print out screenshot* unggahan laman Facebook Kyai Heru. Ahli tidak melakukan proses verifikasi bukti dengan melakukan akses langsung ke sistem IT, atau minimal mengunjungi laman Facebook untuk mengecek kebenaran konten unggahan.

Padahal, menurut Ahmad, keterangan ahli ini penting untuk membuktikan apakah unsur 'mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik' terpenuhi.

"Seharusnya, ahli IT melakukan uji IT terhadap konten *print out* agar yakin atas validitas dan keabsahannya," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan, ahli wajib yakin bahwa konten unggahan yang ditunjukkan penyidik Polres Mojokerto dalam bentuk *print out* itu memang ada dalam sistem IT, sehingga bisa menyimpulkan ada tidaknya unsur mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik.

"Namun ahli tidak melakukan tindakan penting ini, ahli juga tidak menanyakan kepada penyidik Polres Mojokerto, apakah konten *print out screenshot* yang ditunjukkan telah melalui proses uji lab forensik sehingga ahli yakin konten ini memang ada dan berasal dari terdakwa," jelas Ahmad.

Lantas Ahmad mempertanyakan bagaimana jika ternyata konten itu tidak ada, bagaimana kalau konten itu hanya tuduhan, bukan fakta hukum, dan bagaimana ahli berani memberi pendapat dan pandangan terhadap suatu konten yang tidak dijamin keasliannya.

"Kemudian, ketika saya tanyakan kekuatan bukti *screenshot* yang tidak pernah diakses oleh ahli berdasarkan pasal 6 UU ITE, ahli justru gelagapan. Akhirnya ahli menyerahkan pandangan itu kepada majelis hakim," jelasnya.

Padahal, pasal 6 UU ITE menyatakan: Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Lantas, apa dasar absahnya bukti *screenshot* yang dihadirkan penyidik berupa tulisan status Kyai Heru, kalau konten dimaksud tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

"Ini penegakan hukum atau proses politik untuk menarget seseorang menjadi tersangka?" ungkap Ahmad heran.

Sementara itu ahli bahasa Endang Solihatin menyatakan bahwa untuk mengetahui maksud atau tujuan tulisan secara kebahasaan, selain memperhatikan konten bahasa juga perlu memperhatikan persepsi penulis yang mengunggah konten.

"Lagi-lagi, ahli membuat kesimpulan dan pendapat bahwa konten yang diunggah oleh Kyai Heru dengan menggunakan ungkapan 'tafsir yang paling relevan' dianggap mengandung kebencian," tegas Ahmad.

Bagaimana jika maksud dari penulis konten bukanlah ingin mengujar kebencian, tetapi ingin menyampaikan dakwah amar makruf nahi munkar.

Ahmad berkesimpulan, kasus Kyai Heru ini dipaksakan. Berbagai prosedur dalam membuktikan unsur pidana pasal, tidak dilalui secara menyeluruh dan komprehensif. []

fs

Film yang dijadwalkan rilis Oktober itu, membahayakan akidah umat Islam dan lebih berbahaya dari teroris.

Trending Topik Boikot Film The Santri



Lagi, Film *The Santri* yang disutradarai Livi Zheng, menuai kontroversi. Film inisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, tagar #BoikotFilmTheSantri menjadi trending topik di media sosial Twitter dengan 10,2 ribu *tweet* pada Senin (16/9) siang.

Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI) Habib Hanif Alathas menilai, film ini

tidak mencerminkan akhlak dan tradisi santri. Ia menolak penayangan film *The Santri* tersebut. "Karena tidak mencerminkan akhlak dan tradisi santri yang sebenarnya," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (15/9), di Jakarta.

Hanif menyatakan film yang menggambarkan kehidupan pesantren itu tidak memenuhi syariat Islam dan tidak mencerminkan akhlak serta tradisi pesantren ahlussunah wal jamaah. Hal tersebut ia

buktikan pada beberapa adegan adanya campur aduk laki-laki dan perempuan, akting pacaran dan membawa tumpeng ke gereja.

Ia menjelaskan hakikat santri sebagaimana dijelaskan oleh KH Hasani Nawawi Sidogiri adalah, "Santri berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat (Alquran) dan mengikuti Sunnah Rasul SAW serta teguh pendirian dalam setiap keadaan."

"Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya," ujarnya.

Sementara itu tokoh NU KH Luthi Bashori, pengasuh Pesantren Ribath Al Murtdla Al Islami Singosari, Malang, Jawa Timur mengimbau para santri dan jamaahnya agar tidak menonton film ini. Dalam pandangannya, film ini tidak mendidik dan cenderung liberal.

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Chaidir Hasan Bamukmin menilai film yang dijadwalkan rilis Oktober itu, membahayakan akidah

umat Islam dan lebih berbahaya dari teroris.

"Kami menolak film sesat tersebut karena mengusung paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang sudah difatwakan oleh MUI Pusat pada 2005 No 7, yang menyatakan bahwa (paham) sipilis (sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sosialisme) itu sesat," tegasnya

Selain tak sesuai akidah, kata Novel, film tersebut juga telah mencampurkan ajaran agama yang dilarang, apalagi hal itu oleh santri. "Film ini menegaskan kesesatan atas nama agama, lebih berbahaya dari film porno," imbuhnya.

Ia pun menyoroti pemilihan Livi Zheng sebagai sutradara film yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lantaran, Livi tidak memahami agama Islam. "Livi Zheng bukan sosok yang paham Islam, itu sudah jelas mengapa kami menolak film tersebut," tegasnya.

Dikutip dari laman PBNU, *The Santri* akan mengangkat nilai dan tradisi pembelajaran pondok pesantren yang berbasis kemandirian, kesederhanaan, toleransi, kecintaan terhadap tanah air, serta sikap anti terhadap radikalisme dan terorisme.[]

ghifari

Korupsi Menag Lukman Hakim Bersama Romi

Penyebutan nama tersebut bisa menjadi bukti penyelidikan tahap selanjutnya.

Nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin muncul dalam dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Romahurmuzy alias Romi, mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jaksa menyebut Romi menerima suap dari Haris Hasanuddin bersama Menag.

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Chandra Purna Irawan penyebutan nama tersebut bisa menjadi bukti penyelidikan tahap selanjutnya. Menag Lukman Hakim bisa menjadi tersangka apabila memenuhi dua alat bukti yang cukup.

"Terkait penetapan tersangka minimal memenuhi dua alat bukti yang cukup, apabila tidak ada maka tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Penyebutan di dalam surat dakwaan dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk melakukan tahap berikutnya," ungkapnya kepada *Media Umat*.

Penyebutan nama di dalam surat dakwaan jaksa KPK, harus dilihat dari proses persidangan. Misalnya, diproses pembuktian, apakah ditemukan keyakinan atau bukti Lukman terlibat atau tidak.

Chandra juga menambahkan tinggi-

nya korupsi di sebuah lembaga dikarenakan sistem dan biaya politik yang dinilai tinggi.

"Terkait korupsi di beberapa lembaga, saya berpendapat dipengaruhi oleh sistem dan biaya politik demokrasi yang tinggi," katanya.

Sebelumnya Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, yang membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menyebut, Romi menerima suap senilai total Rp 416,4 Juta pada perkara suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Pemberian suap berawal dari mantan Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur, senilai Rp 325 Juta Haris Hasanuddin dan Muh Muafiq Wirahadi, mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik memberi Rp 91,4 Juta.

"Terdakwa Romi telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin dan Muh Muafiq Wirahadi," kata Wawan Yunarwanto.

Pemberian suap dari Haris berawal dari Kemenag membuka lowongan jabatan, pada 13 Desember 2018.

Syarat mengikuti seleksi itu tidak per-



nah dijatuhi hukuman PNS tingkat sedang atau berat selama 5 tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman itu.

Haris, pada saat itu, menjabat Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Kanwil Kemenag Jawa Timur mendaftar. Padahal, berdasarkan catatan pada 2016, dia pernah diberi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan jabatan selama 1 tahun.

Sebagai upaya melancarkan proses seleksi, Haris berencana meminta bantuan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Mengingat sulit menemui Lukman, Ketua DPP PPP Jatim, Musyaffa Noer, menyarankan Haris menemui Romahurmuzy.

Haris meminta bantuan Romahurmu-

zy. Pada 26 Desember 2018, Haris memberitahu Romy, dia telah mendaftar seleksi. Berselang satu hari kemudian, Haris dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Romy meminta Lukman meloloskan Haris.

Lalu, Lukman disebut memerintahkan Sekjen Kemenag, Nur Cholis, untuk meloloskan Haris.

Nur Cholis meminta Ahmadi, panitia seleksi menambahkan nama Haris dan Anshori sebagai peserta lolos seleksi administrasi.

Akhirnya, Haris lolos seleksi administrasi serta seleksi-seleksi selanjutnya. Selama proses itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat dua kali menyurati Menag Lukman untuk membatalkan kelulusan Haris.[] fs

Khilafah Ajaran Islam Tak Boleh Dikriminalkan

"Islam itu punya ajaran, ada ajaran tentang ibadah ada juga ajaran tentang pernikahan, termasuk ajaran Islam dalam hal kepemimpinan."

Beralasan demi kestabilan politik dan keamanan Menko Polhukam Wiranto sedang merancang peraturan mengenai larangan bagi individu membas dan menyebarkan paham khilafah. Sebelumnya Wiranto mengatakan: "Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum," kata Wiranto.

Menanggapi rencana pemerintah itu, cendekiawan Muslim Rokhmat S Labib menyatakan bahwa khilafah bukanlah tindakan kriminal, karena khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam.

"Islam itu punya ajaran, ada ajaran tentang ibadah ada juga ajaran tentang pernikahan, termasuk ajaran Islam dalam hal kepemimpinan, dalam soal kepemimpinan itulah ada konsep hukum Islam mengenai Khilafah. Ada di mazhab fikih, hadist," ungkap Rokhmat kepada *Media Umat*.

Menurutnya, rencana pemerintah tersebut adalah sebuah bentuk kriminalisasi terhadap ajaran Islam, karena pada dasar-

nya khilafah bukan suatu bentuk kriminal yang bisa dipidana, namun malah mau dilarang dan dipidana.

"Jadi kalau kemudian khilafah itu dianggap sebagai kriminal maka mengkriminalkan ajaran Islam, sebagaimana mengkriminalkan ajaran shalat, zakat dan sebagainya. Apabila kriminalisasi itu terjadi berarti itu adalah sebuah gerakan yang menantang Allah, karena yang menurunkan Islam itu Allah," ungkapnya.

Ia mengaku heran, yang berencana melakukan pelanggaran adalah orang Islam. Ia mempertanyakan, kenapa mereka membenci ajaran agama mereka sendiri. Padahal mereka mengaku percaya terhadap Alquran, Allah dan Rasul.

"Mereka mengaku beriman, namun mengkriminalisasi apa yang diajarkan oleh agama. Kok bisa ada orang Islam ada yang memusuhi ajaran mereka sendiri secara terus menerus," kata Rokhmat.

Ia juga mengomentari alasan pemerintah melarang khilafah dianggap radikal dan mengancam NKRI. Menurutnya, itu adalah alasan yang tidak logis. Ia menilai bahwa tidak semua kekerasan lahir karena



■ Wiranto - Rokhmat S Labib

radikalisme. Bagaimana kalau penyampaian khilafah itu tanpa kekerasan, apakah tetap dilarang?

"Itu juga alasan yang tidak jelas, apa itu pengertian radikal? Kalau radikal diartikan sebagai kekerasan, itu juga salah, karena tidak semua kekerasan itu dilakukan karena radikal. Ini kan khilafah ajaran Islam, bagaimana apabila disampaikan tanpa kekerasan? Masa tidak boleh juga? Menyampaikan masa sebagai kejahatan, seperti menyampaikan hukum Islam ada ajaran ha-

rus menghukum pezina, cambuk," ungkapnya.

Rokhmat menyampaikan bahwa umat Islam jelas harus menolak rencana tersebut, karena seharusnya ketika ada ajaran Islam yang dikriminalisasi maka umat Islam harus melawan.

"Saat ini umat Islam harusnya menolak dan melawan, orang Islam mestinya tidak rela ajarannya dikriminalkan," pungkask Rokhmat. ■ fs

MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Investasi Kok Dosa?!

Majelis Abah terus berputar. Gak boleh rehat kayaknya. Pesertanya banyak. Ruangan tak cukup. Suasana santai tapi tetap fokus.

Abah cerita. Mari kita bicara investasi yang lain! 'Jasa' khusus yang tak pernah kita bayangkan. Juga bukan kita investornya. Tapi kita mendapat pengaruhnya. Sayangnya bukan benefit, tapi *nyelekit!* Hemmm.

Ya, ini investasi dosa! Bukan kita pelakunya tapi kita terus mendapat aliran dosa dari orang lain pelakunya. Kok bisa? Bisa banget!

Begini contohnya.

Jika ada orang yang meninggal, jenazahnya tidak diurus, yang berdosa seluruh umat Islam!

Jika ada orang yang membunuh, seluruh umat Islam berdosa! (QS. Al Baqarah: 178)

Jika ada orang yang mencuri, seluruh umat Islam berdosa! (QS. Al Maidah: 38)

Jika umat Islam tidak diatur dengan hukum Islam, seluruh umat Islam berdosa! (QS. Al Maidah: 44 & 48)

Masih ada lagi yang lain. Yang lain yang berbuat, tapi seluruh umat Islam yang berdosa. Seluruh umat Islam!

Bah, susah atuh, masalahnya itu semua menyangkut pengamalan syariat Islam. Kalau levelnya individu itu mah bisa banget dan tergantung orangnya juga. Semua contoh Abah itu berasal dari amal fardu kifayah! Masalahnya, kalau diprosentase, fardu kifayah ada 90 persen dari syariat! Hukum qishas misalnya, enggak bisa enggak itu harus negara. Nah, kalau levelnya sudah butuh keha-

diran negara, ini yang susah. Kan enggak bisa ujug-ujug begitu *aja* Abah! *Kumaha atuh?* Kenapa *kumaha?* Bukanlah dalam Islam, negara itu tugasnya memang begitu? Nah lho!

Selama negaranya tidak mau mengamalkan syariat Islam, maka akan terus muncul 'dosa investasi'. Inilah dosa yang muncul dari fardu kifayah yang tidak diamalkan! Jadi,



sama saja kita investasi dosa bersama-sama!

Jadi apa yang harus kita lakukan Abah?

Kita harus merasa terpaksa berada dalam kondisi ini. Karena ada tiga golongan Muslim yang tidak bisa dikenai sanksi alias tidak dikenakan dosa atas perbuatan yang dilakukan. Yaitu karena lupa, tidak tahu dan terpaksa. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Pertanyaannya, terpaksa yang seperti apa? Terpaksa yang diam menyerah pasrah ikut arus. Diam ketika melihat kemunkaran. Atau terpaksa yang tapi. Tapi apa? Tapi tidak diam menyerah pasrah. Terpaksa tapi bergerak berusaha berdakwah agar seluruh syariat Islam dapat diamalkan.

Oo ternyata yang dimaksud terpaksa itu adalah kita merasa terpaksa menerima kondisi seperti ini namun kita tidak tinggal diam, kita harus berdakwah agar Islam kaaffah kembali tegak! Karena dengan tegaknya Islam, negara bisa menyelesaikan semua dosa investasi ini. Ini bahasa kerennya.

Lho bukankah dakwah itu wajib Bah? Nah itu! Mungkin, dulu karena kudet alias kurang *apdet*, kita jadi gak mau dakwah sambil bilang, itu kan tugasnya para ustadz! Pengusaha *mah* tinggal kasih uang ke ustadz, biar ustadz yang dakwah! Semua itu sekarang enggak boleh lagi! Pengusaha, mau kelas kakap, paus, teri atau apa sajalah, harus bergerak ikut terlibat dakwah! Coz, dakwah akan menyelamatkan kita semua. Yess!

Baiklah. Hijrah total plus Dakwah! *Tagline*-nya jadi keren. Bisnis Ngaji Dakwah.

Sip, benar-benar Mantap jiwa!

Bismillah!

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) menuntut pemerintah agar segera menghentikan impor produk-produk TPT.

Lagi, PHK Massal Akibat Serbuan Impor

Satu persatu industri manufaktur mulai bertumbangan akibat derasnya impor. Salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (9/9/2019), dalam kurun waktu 2018-2019, setidaknya ada sembilan pabrik dilaporkan tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor. Penutupan tersebut kemudian merembet pada persoalan pengurangan jumlah tenaga kerja. Menurut Ade, dari jumlah perusahaan yang tutup tersebut hampir dua ribu orang pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Para pengusaha industri TPT mengeluhkan dengan derasnya produk impor terutama yang berasal dari China. Hal tersebut terjadi sejak Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No 64 tahun 2017. Aturan tersebut memberikan importir pemegang izin Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor berbagai produk TPT dengan sa-

ngat mudah termasuk sarung dan kain tenun yang diproduksi Industri Kecil dan Menengah di daerah-daerah.

Seperti diketahui industri TPT merupakan salah satu industri Indonesia yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan di Indonesia. Selain industri makanan, pakaian jadi, dan industri alas kaki. Menurut data terakhir BPS, pada tahun 2015 sebanyak 672 ribu orang bekerja pada industri ini. Industri ini juga menjadi sumber bahan baku industri pakaian jadi.

Oleh karena itu, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) menuntut pemerintah agar segera menghentikan impor produk-produk TPT. Jika tidak, kebangkrutan industri pertekstilan Indonesia tidak dapat dihindari. Dampaknya, PHK massal akan terjadi pada pekerja di industri ini. Selain itu, gabungan ahli tekstil tersebut meminta pemerintah untuk melakukan pengenaan penataan agar daya saing produk domestik dapat ditingkatkan.

Industri Baja

Sebelumnya, PT Krakatau Steel (KS) juga melakukan perampangan karyawan besar-besaran akibat sengitnya persaingan dengan baja impor dari Cina. Hingga tahun depan sebanyak 2.400 karyawan akan dihentikan. Selain itu, sejumlah pabrik besi baja juga telah gulung tikar.

Pasalnya, arus masih tingginya pasokan yang berasal dari impor. Tingginya pasokan impor itu terjadi akibat berbagai regulasi perdagangan yang dibuat pemerintah sangat longgar. Sementara itu, utilitas produksi industri besi dan baja nasional masih sangat rendah dan cenderung menurun.

Dalam kondisi demikian, pemerintah masih membuka lebar-lebar investasi asing untuk membangun pabrik baja. Perusahaan Cina yakni PT Dexin Steel Indonesia kini telah beroperasi di Morowali. Sementara Hebei Bishi Steel yang juga berasal dari Cina telah siap membangun pabriknya di Kendal. Dengan kehadiran kedua perusahaan ini membuat pro-



duksi baja domestik akan mengalami kelebihan pasokan. Peran PT KS yang dulu dikategorikan sebagai industri strategis nasional perlahan-lahan semakin tersisih.

Nasib pekerja di industri manufaktur tersebut hampir serupa dengan pekerja di sektor pertanian. Akibat kebijakan pemerintah yang gemar melakukan impor pangan minat petani untuk bercocok tanam semakin berkurang. Harga produk mereka kalah murah dengan produk impor. Wajar

saja, produk-produk impor lebih murah akibat mendapat dukungan besar-besaran dari pemerintah mereka. Bukan hanya tanah, energi murah, hingga kredit murah diperoleh dengan mudah. Sementara di Indonesia, para pelaku usaha dibiarkan berjuang sendiri. Bantuan pemerintah lewat subsidi dikurangi, sementara liberalisasi perdagangan dan investasi terus ditingkatkan. **ishak**

MUAMALAH

Hak Atas Kepemilikan Bersama [Syuf'ah]

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Syuf'ah, secara harfiah, adalah menggabungkan, seperti "Syafa'tu ar-rak'ata" [Aku menggabungkan rakaat, dari ganjil menjadi genap]. Dalam Q.s. al-Fajr: 3, "Demi shalat yang genap dan ganjil." Shalat Syaf'i [genap], lawannya Shalat Watr [ganjil].

Dalam konteks Fiqih Mu'amalah, istilah syuf'ah digunakan untuk sesuatu yang dijual, yang diperoleh oleh mitra kerja sama [syarik], atau tetangga, dengan paksa, dengan harga yang telah digunakan untuk membeli/menjualnya [al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz II/1166].

Syuf'ah ini disyariatkan berdasarkan hadits Nabi Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama, "Rasulullah Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama telah memutuskan terjadinya syuf'ah terhadap apa saja yang belum dibagi. Jika batasan sudah terjadi, dan jalan telah alihkan, maka tak ada syuf'ah." [HR Bukhari]

Syuf'ah terjadi, karena dua sebab. *Pertama*, kepemilikan bersama, karena adanya syarikah, baik karena syarikah amlak maupun 'uqud, atau kepemilikan bersama atas kepemilikan umum, atau hak menahan agunan. *Kedua*, hubungan pertetanggaan berdasarkan hadits di atas. Karena memang syuf'ah disyariatkan untuk menghindari terjadinya mudharat, baik dari maupun terhadap tetangga.

Karena itu, syuf'ah ini bisa berlaku untuk tanah,



rumah, sumur, penggilingan, hewan, dan lain-lain selama belum dibagi. Syuf'ah juga bisa berlaku untuk jalan, saluran air, tempat minum bersama, begitu juga tempat-tempat umum, seperti hutan, padang gembalaan, dan

lain-lain.

Dalam syuf'ah ini ada empat hal yang harus diperhatikan: *pertama*, masyfu' fih, yaitu properti yang ingin dimiliki oleh syafi'. *Kedua*, masyfu' bih, yaitu properti yang dengannya, syafi' berhak meminta hak syuf'ah-nya. *Ketiga*, masyfu' 'alaih, yaitu orang yang kepemilikannya atas masyfu' fih, berpindah darinya, melalui pembelian dan sejenisnya. *Keempat*, syafi', pihak yang meminta haknya, atas masyfu' fih sebagai bentuk pengembalian haknya.

Orang yang mempunyai hak syuf'ah, berhak menuntut haknya, jika mitranya menjual barang yang di situ ada haknya. Dengan syarat, tuntutan tersebut harus segera dilakukan, begitu mengetahui penjualan barang tersebut. Tetapi, jika mitranya tersebut berada di wilayah lain yang jauh, maka wajib memberikan kesaksian bahwa dia menuntut haknya atas kepemilikan tersebut, setelah itu dia bisa memberitahukan kepada penjualnya, bahwa dia menuntut hak Syuf'ah-nya dengan segera, tanpa ditunda lagi.

Orang yang berhak menuntut hak syuf'ah adalah orang yang mempunyai hak kepemilikan atas barang yang dijual mitranya. Barang yang dijual, sebagai milik bersama, itu bisa berupa barang bergerak [manqulat] dan tidak bergerak [ghair manqulat]. Hanya saja, untuk barang yang bergerak, disyaratkan kepemilikannya berdasarkan syarikah, bukan karena pertetanggaan. [Bersambung]

Abdul Aziz

Sebuah disertasi yang melegalkan perzinaan lahir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pantas kaum Muslim bereaksi atas kesimpulan disertasi tersebut. Mengapa? Siapa yang menjadi dasar pijakan bagi perzinaan ini? Ikuti kupasannya berikut ini.

LEGALISASI ZINA Mendompleng Karya Ilmiah

la mengaku gelisah dan prihatin, mengapa mereka yang melakukan hubungan intim di luar nikah alias kumpul kebo diperlakukan tidak baik oleh masyarakat.

"Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital", begitu judul disertasi yang disusun oleh mahasiswa program doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Aziz. Atas disertasinya itu, ia mendapat gelar doktor dengan predikat memuaskan, Rabu (28/8). Disertasi itu menyimpulkan bahwa hubungan intim di luar nikah tidak melanggar hukum Islam.

Kesimpulan Abdul ini pun diamini oleh tim pengujinya. Kalau tidak, pasti Abdul tidak akan diluluskan oleh lembaga tersebut. Tak main-main, pengujinya adalah para guru besar, bahkan rektor UIN sendiri Prof Yudian Wahyudi—tokoh yang anti khilafah.

Ia berharap disertasinya itu bermanfaat untuk pembaruan hukum perdata dan pidana Islam. Dalam pandangannya, kriminalisasi terhadap pelaku zina bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Melihat itu ia mengaku gelisah dan prihatin, mengapa mereka yang melakukan hubungan intim di luar nikah alias kumpul kebo diperlakukan tidak baik oleh masyarakat seperti penggerebekan dan penangkapan sewenang-wenang di ruang-ruang privat seperti di kamar hotel. Ia juga mengaku tidak setuju dengan hukuman rajam karena dianggapnya bertentangan dengan HAM.

Lalu, ia mencari hukum yang bisa dijadikan jalan keluar agar hubungan intim di luar nikah—disebut nonmarital—legal dan tidak melanggar hukum. Dalam penelusurannya itu, ia menemukan konsep *Milk Al-*

Yamin dari intelektual Muslim asal Suriah, Muhammad Syahrur. Konsep itu menyebutkan bahwa hubungan intim di luar nikah dalam batasan tertentu tak melanggar syariat Islam.

Menurut Abdul, konsep *milk al-yamin* klasik dimaknai sebagai hubungan seks laki-laki terhadap perempuan budak. Para pemikir atau ulama seperti Imam Asy Syafii dan Imam at Tabari memahami *milk al-yamin* sebagai hubungan intim nonmarital dengan budak perempuan melalui akad milik.

Abdul mengklaim, Muhammad Syahrur menolak konsep *milk al-yamin* pemikir klasik. Menurutnya, perbudakan telah dihapuskan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Islam mendukung penghapusan perbudakan itu.

Konsep itu kemudian dimaknai sebagai hubungan intim tanpa melalui perkawinan hanya untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan untuk memiliki keturunan atau berkeluarga. Syaratnya, hubungan intim dilakukan di ruang privat, berlandaskan suka sama suka, keduanya sudah dewasa, tidak ada penipuan, dan niatnya tulus maka tidak bisa disebut zina. Maka hubungan intim tersebut halal.

Ditolak Syahrur

Ternyata kesimpulan Abdul Aziz bahwa zina itu boleh dengan menyandarkan kepada konsep *milk al-yamin* milik Syahrur, ditolak sendiri oleh Muhammad Syahrur. Dalam penjelasannya di Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=KeS9Vy7Z63Q>, Syahrur malah

berbeda pandangan.

Ketika Syahrur ditanya, "Apakah Syahrur membolehkan zina?" Dengan tegas dia menjawab, "Sama sekali tidak. Semua itu adalah kebohongan." katanya. Syahrur juga mengakui, ada ayat-ayat *muhkam*, dan itu merupakan ayat-ayat yang tertutup, tidak ada ruang ijtihad di sana.

Mengenai zina dan *fakhisyah*, Syahrur menjelaskan, semua hubungan seksual yang tidak dibenarkan syara' (*ghaira syar'iyyah*), disebut *fakhisyah*. Semua perbuatan *fakhisyah*, baik yang terang-terangan maupun tidak, hukumnya haram. Di sini, Syahrur lalu merinci perbuatan *fakhisyah* itu menjadi enam kategori:

- 1) Zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan secara terbuka (di hadapan saksi), disaksikan minimal empat orang, baik pelakunya telah menikah (*muhshan*), maupun belum (*ghairu muhshan*). Dalam konteks ini, Allah mengizinkan negara dan masyarakat untuk menghukumnya, dengan 100 cambukan bagi yang belum menikah, dan rajam, bagi yang telah menikah.
- 2) Menikahi *mahram*, yaitu hubungan seksual dengan ibu, ayah, saudara atau anak perempuan.
- 3) Menikahi *muhshanah*, yaitu berhubungan seksual dengan wanita yang bersuami.
- 4) *Sifâh*, yaitu lelaki yang berhubungan seksual dengan sejumlah wanita, meskipun isteri-isterinya sah secara hukum. Atau, wanita yang berhubungan seksual dengan sejumlah pria. Atau, hubungan seksual sejumlah wanita, dengan sejumlah pria, dan begitu juga sebaliknya.
- 5) Hubungan sejenis (*gay*), sesama pria, yaitu hubungan seksual sejenis, antara dua pria atau lebih.
- 6) *Sahiqât*, yaitu hubungan seksual sejenis antara dua perempuan, atau lebih.

Menurut Syahrur, semuanya ini merupakan bentuk *fawâkhis*, jamak dari *fakhisyah*, dan hukumnya haram.

Karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Syahrur sendiri tidak menyatakan bahwa zina itu boleh. Syahrur menjelaskan, bahwa dari sekian perbuatan *fakhisyah* itu, zinalah satu-satunya perbuatan, yang Allah izinkan, bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat untuk menghukumnya. Ini memang ada benarnya, sebagaimana dalam kasus zina *muhshan*. Karena, pelaku zina dirajam, yaitu dilempari batu oleh masyarakat, hingga mati. Sedangkan yang lain, hanya negara yang berhak menghukum.

Dalam tayangan itu, sekali lagi Syahrur ditanya, "Apakah Syahrur membolehkan zina?" Dengan tegas dia menjawab, "Sama sekali tidak. Semua itu adalah kebohongan."

Muncul pertanyaan, jika Syahrur sendiri menolak zina, bagaimana mungkin Abdul Aziz menyimpulkan hal yang berbeda? Ada apa ini? **har**

Siapa Muhammad Syahrur?

Muhammad Syahrur tidak bergabung dengan kelompok Islam mana pun. Ia juga tak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman. Namun, Syahrur adalah profesor (emeritus) Universitas Damaskus di bidang Teknik Sipil yang sering menulis tentang Islam.

Abdul Aziz dalam disertasinya seperti dikutip *tirto.id* menyebut bahwa Syahrur adalah seorang hermeneut. Bernard Ramm dalam *Protestant Biblical Interpretation* (1950) mendefinisikan hermeneutika sebagai aliran filsafat yang mempelajari tentang interpretasi atau penafsiran makna suatu naskah, misalnya melalui percobaan.

Interpretasi makna ini bahkan bisa digunakan untuk menafsirkan kitab suci. Hermeneutika, sebut Abdul mengutip tulisan Peter Clark berjudul "The Shahrur's Phenomenon; A Liberal Islamic Voice From Syria" dalam *Islam and Christian-Muslim Relation* (Volume 7, Nomor 3, Oktober 1996) biasa

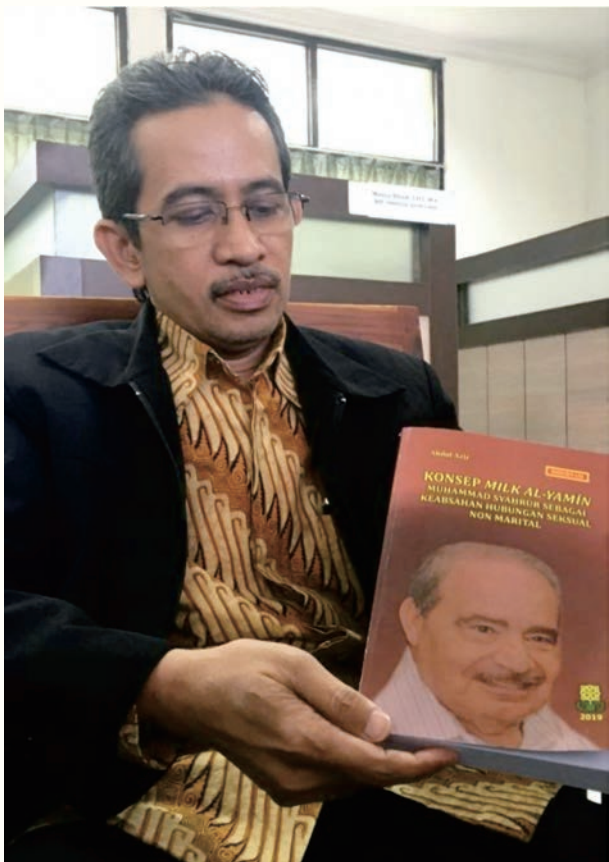
dipakai dalam studi kritik mengenai Al-Kitab.

Maka, kemungkinan besar, dari sinilah kontroversi atas pemikiran dan karya Muhammad Syahrur itu bermula. Syahrur, menurut Abdul, tidak seperti sebagian mufasirin yang menafsirkan Alquran dengan mengikuti makna literal dari bahasanya. Namun, Syahrur menafsirkan dengan menelisik lebih jauh makna semantik dan hermeneutis dari ayat tersebut dengan mempertautkan konteks yang mengitari Alquran pada abad ke-7 Masehi.

Beberapa karya Syahrur memantik kontroversi di dunia Islam, bahkan dilarang beredar di sejumlah negara. Bagi mereka yang memuja, Syahrur ibarat Immanuel Kant untuk bangsa Arab atau Martin Luther-nya umat Islam. Sebaliknya, bagi yang kontra terhadapnya, buku-buku hasil pemikiran Syahrur, khususnya *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, dianggap lebih berbahaya dari karya kontroversial Salman Rushdie yakni *The Satanic Verses* alias *Ayat-Ayat Setan*. **Its**

Kesalahan Disertasi PENENTANG SYARIAH

Batasan dan kriteria zina tersebut tidak ada kriteria zina itu harus dilakukan di tempat terbuka, atau tertutup, diketahui banyak orang atau tidak, dilakukan suka sama suka, atau tidak.



■ Abdul Aziz beserta disertasi yang berjudul *Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital*.

Disertasi Abdul Aziz lolos dari para guru besar UIN Sunan Kalijaga. Seolah, institusi pendidikan tinggi Islam itu memberi lampu hijau terhadap isi disertasi tersebut. Padahal, isinya jauh-jauh bertentangan dengan aturan Islam yang sudah sangat jelas dan gamblang.

Mudir Ma'had Syaraful Haramain Bogor KH Hafidz Abdurrahman, memerinci kesalahan disertasi tersebut.

Pertama, kesalahan kriteria zina, dan ketidakmampuan Abdul Aziz, dan tim penguji di UIN Sunan Kalijaga, membedakan kriteria zina (*ahkâm az-zinâ*) dan kriteria pembuktian (*ahkâm al-bayyinât*), yang menyebabkan pelakunya dijatuhi sanksi zina (*hadd az-zinâ*).

1) Mengenai kriteria zina, bahwa zina adalah tindakan kriminal yang dilakukan di hadapan orang, maksudnya di hadapan empat saksi, sebenarnya ini tidak menjelaskan kriteria zina, tetapi menjelaskan kriteria *nishâb* kesaksian, yang menjadikan pelakunya bisa dihukum. Artinya, meski *nishâb* kesaksiannya kurang, hubungan seksual non-marital, meski dilakukan suka sama suka, tetap disebut zina. Sekalipun dilakukan di tempat tertutup, tidak disaksikan empat saksi, hanya disaksikan oleh tiga, dua, satu saksi, atau bahkan tidak ada saksi. Semuanya ini tetap disebut zina. Karena zina tidak ada kaitannya dengan berapa saksi, dilakukan suka sama suka, atau tidak.

Sebab, definisi zina jelas. "Zina itu adalah persenggamaan pria dengan wanita pada kemaluannya (wanita) dengan persenggamaan yang tidak disertai kepemilikan (seperti budak), atau yang sejenis (seperti nikah)."

Inilah definisi yang dinyatakan para fuqaha'. Karena itu, status persenggamaan (*wath'i*), oleh para fuqaha' dipilah menjadi tiga, salah satunya zina,

yang merupakan persenggamaan yang diharamkan: "Persenggamaan itu bisa dibagi menjadi tiga: Mubah, yaitu persenggamaan dalam pernikahan yang sah, atau dengan budak (perempuan). Kedua, persenggamaan syubhat, yaitu persenggamaan dalam pernikahan yang fasid (akadnya tidak sah), pembelian (budak) yang fasid (akadnya tidak sah), atau persenggamaan dengan wanita, yang dikira isterinya atau budaknya (ternyata bukan), atau persenggamaan dengan budak perempuan yang dimiliki bersama, antara dia dengan yang lain. Ketiga, persenggamaan yang haram secara mutlak, yaitu zina.. Tidak ada perbedaan, sebagaimana yang telah kami sebutkan, antara zina di vagina maupun anus."

Inilah definisi, batasan dan kriteria zina. Dalam definisi, batasan dan kriteria zina tersebut tidak ada kriteria zina itu harus dilakukan di tempat terbuka, atau tertutup, diketahui banyak orang atau tidak, dilakukan suka sama suka, atau tidak. Semuanya itu tidak ada hubungannya dengan fakta zina.

2) Mengenai kriteria pembuktian (*ahkâm al-bayyinât*), sebenarnya ini masalah lain, di luar substansi zinanya itu sendiri. Artinya, ketika kriteria zina itu terbukti, maka perbuatan tersebut disebut zina. Mengenai, apakah perzinan tersebut harus dijatuhi sanksi zina (*hadd az-zina*), ini masalah lain. Dalam hal ini, harus dirinci:

- Kesaksian empat saksi: Empat saksi ini harus laki-laki semua. Jika ada tiga saksi wanita, satu laki-laki, maka *nishab* kesaksiannya kurang. Sebagaimana firman Allah QS an-Nur: 4. Selain adanya empat saksi, saksi harus bisa menyebutkan pelaku zina dan pasangannya, kapan waktunya, di mana tempatnya, cara mereka berzina (dengan menjelaskan masuknya penis ke dalam vagina atau anus). Jika salah satu, dari empat ini dia lupa, maka kesaksiannya tidak boleh diterima.
- Jika empat saksi tidak ada, kemudian pelakunya mengakui perbuatannya, sebanyak empat kali, di majelis yang berbeda.
- Hamil. Perempuan yang tidak mempunyai suami, tetapi hamil, tidak serta merta dihukumi berzina, jika dia tidak mengakui dirinya berzina. Karena itu, dalam konteks perzinan yang dilakukan suka sama suka, dan tidak ada saksi, tetapi ketika pelakunya mengakui, maka perbuatan tersebut tetap disebut zina, dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman. Ini seperti kasus Ma'iz al-Aslami dan al-Ghamidiyah, yang sama-sama telah melakukan zina, dan tidak ada saksi. Masing-masing kemudian dirajam oleh Nabi hingga mati.

Kedua, kesalahan dan ketidakmampuan Abdul Aziz, dan tim penguji di UIN Jogja dalam memahami fakta dan konsep *milk al-yamin*, sebagaimana yang dimaksud oleh nash syara'. "Dan mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali dari isteri-isteri mereka, atau budak-budak mereka. Sesungguhnya mereka tidaklah tercela." [TQS al-Mu'minun: 5-6]

Siapa *milk al-yamin*? Secara harfiah, *milk al-yamin* adalah milik tangan kanan. Secara umum, *milk al-yamin* bisa diartikan, "Perempuan yang berada di tangan pemiliknya, bisa karena pernikahan maupun perbudakan." Hanya saja, menurut al-'Allamah as-Syinqithi, istilah *milk al-yamin*, digunakan dalam Alquran, dengan satu kono-

tasi, yaitu budak perempuan.

Karena itu, pernikahan dan *milk al-yamin* menjadi sebab persenggamaan yang halal. Meski masing-masing berbeda sebabnya. Persenggamaan melalui pernikahan, dinyatakan, jika akadnya sah, tidak fasid, apalagi batil. Sedangkan *milk al-yamin*, diperoleh melalui jihad, dalam kondisi perempuan tersebut menjadi "sabi", atau jual-beli yang sah, bukan fasid, apalagi batil. Inilah perbedaan fakta di antara kedua hukum, pernikahan dan *milk al-yamin*, yang menjadi sebab diperbolehkannya persenggamaan.

Karena itu, dengan tidak adanya *milk al-yamin*, karena tidak adanya "sabi", karena tidak adanya jihad, maka sebab persenggamaan melalui *milk al-yamin* ini sebenarnya tertutup.

Ketiga, kesalahan lain, penulis maupun penguji, sama-sama tidak menguasai ushul fiqh, dan kaidah ushul fiqh dengan baik dan benar. Khususnya, masalah yang terkait dengan *dalalah* dan 'illat hukum.

Ketidakhahaman mereka tampak, ketika mencoba merekonstruksi *dalalah* tentang "zina", juga "*milk al-yamin*", yang secara *syar'i* mempunyai makna dan fakta yang jelas, sebagaimana dijelaskan pada poin pertama dan kedua, keharaman zina dinyatakan tanpa 'illat, begitu juga kehalalan "*milk al-yamin*", juga dinyatakan tanpa 'illat, maka menarik 'illat dari dua fakta dan hukum ini jelas keliru. Padahal, pada waktu yang sama, keduanya tidak mengandung 'illat.

Kesalahan Ushul Fiqh, Kaidah Ushul, dan metodologi berpikir ini bisa dirunut, pada poin-poin berikut:

- Lemahnya nalar akademis, karena tidak bisa membedakan antara "*Qiyas Aqli*, *Qiyas Mantiqi*" di satu sisi, dan "*Qiyas Syar'i*" di sisi lain.
- Membuktikan kesalahan metode berpikir "*Tasyri'i*", baik karena tidak bisa membedakan antara berpikir untuk memahami hukum (*fahm al-ahkam*), dengan berpikir untuk menggali hukum (*istimbat al-ahkam*).
- Karena tidak adanya metode berpikir *istimbat al-ahkam* pada peneliti, pengkaji dan penilai, pemikiran Syahrur yang mestinya diruntuhkan, karena jelas batil, karena menggunakan "*Qiyas Mantiqi*", bahkan menarik "illat" yang tidak ada 'illat-nya, justru digunakan untuk menjustifikasi zina yang secara *qath'i* hukumnya haram. Bahkan, kemudian dianggap sebagai terobosan baru dalam "mencegah kriminalisasi zina", atau lebih tepatnya, "legalisasi zina".
- Kesalahan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penggunaan "metode ilmiah" yang tidak pada tempatnya. Karena "metode ilmiah", sebagai metode berpikir, yang benar, jika digunakan dalam konteks meneliti benda mati, di laboratorium, telah digunakan untuk meneliti pemikiran, apalagi fiki, yang bukan benda mati.

Kelima, melegalisasi zina dengan justifikasi "*milk al-yamin*", selain menunjukkan peneliti, pengkaji dan penilainya tidak bisa membedakan perbedaan hukum keduanya, termasuk hukum-hukum yang terkait, seperti akad nikah, akad *ijarah*, akad *tamalluk wa tamlik*, *raqq wa istirqaq*, *ghanimah*, *asra*, dan *sabaya*, juga menunjukkan kesalahan nalar berpikirnya, akibat dari penggunaan logika mantik untuk menarik kesimpulan hukum. [] Its

Rindu Bertemu Allah Menjadi Spirit “Perang Total” Kaum Muslim

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Jika kaum kafir, setelah Bani Abdi ad-Dar, pemegang panji perang kaum kafir itu tewas semua, maka panji itu pun diambil oleh budak mereka. Setelah budak pembawa panji ini tewas, tak ada satu pun kaum kafir yang berani mengambil panji ini. Karena mental mereka bukan berperang untuk mati. Berbeda dengan kaum Muslim.

Iya, orang-orang Mukmin sangat rindu bertemu dengan Allah. Kapan? Pertama kali, saat mati. *“Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan penuh kerelaan dan diridhai-Nya.”* [TQS al-Fajr: 28]. Bagi seorang pejuang, gugur saat berjuang, memperjuangkan kalimat-Nya, adalah sebaik-baik dan semulia-mulia kembali kepada Rabb-nya. Karena, Rabb-nya pasti ridha kepadanya, dan dia pun ridha melakukan semuanya itu untuk-Nya. Maka, tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya terhadap kematian, karena justru itulah momentum perjumpaan dengan Allah, yang sangat dirindukan.

Begitulah mental yang ditunjukkan Abu Dujanah, Zubair, Hamzah, dan para sahabat yang lain. Mereka adalah singa-singa Allah. Setelah Hamzah memporak-porandakan pemegang panji perang kaum kafir, giliran Abu Dujanah merangsek ke barisan musuh tanpa kenal ampun. Sampai di barisan perempuan kafir Quraisy. *“Aku melihat sosok yang bernafsu mengalahkan musuhnya, sehingga aku mendekatinya. Begitu pedang hendak kuayunkan, ternyata dia perempuan. Kuurungkan niatku, karena pedang Rasulullah ini terlalu mulia untuk membunuh seorang perempuan.”*

Perempuan itu tak lain adalah Hindun binti 'Uthbah. Kata Zubair, *“Kulihat Abu Dujanah sudah siap mengayunkan pedangnya, hendak menebas kepala Hindun, tetapi tiba-tiba dia membelokkan ayunan pedangnya. Aku bergumam, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’”* Sementara itu, Hamzah terus mengamuk bagaikan singa terluka. Para jagoan musuh pun bergelimpangan, dan tewas, bagaikan dedaunan yang ditiup angin. Mereka terbunuh tidak seperti para ksatria, tetapi seperti orang yang tewas di tengah pekatnya malam.

Singa-singa Allah itu memang tidak takut sedikit pun dengan kematian, karena justru itulah yang mereka dambakan. Lihatlah, bagaimana Hamzah, singa Allah itu, saat menjemput kematiannya, sebagai penghulu syuhada' di medan Perang Uhud! Kata Wahsyi, pembunuh Hamzah, yang dijanjikan oleh Jubair bin Muth'im, akan di-merdekakan, jika bisa membunuh Hamzah, yang telah membunuh paman Jubair, yaitu Thu'aimah bin 'Adi, yang dibunuh Hamzah saat Perang Badar.

Kata Wahsyi, *“Aku adalah budak Habasyah (Ethiopia), yang ahli melempar lembing,*

sebagaimana keahlian orang Habasyah. Nyaris lemparanku tak pernah meleset. Maka, di tengah pertempuran sengit, aku mencari Hamzah. Akhirnya kutemukan dia sedang bertempur dengan ganas, bak seekor unta abu-abu yang lincah. Ancaman yang ditimbulkannya luar biasa.” Wahsyi terus berusaha mencari posisi bidikan yang tepat agar bisa membidik Hamzah.

Dia mencari persembunyian di balik pohon agar bisa mendapatkan posisi terdekat dengan Hamzah, tiba-tiba Siba' bin 'Abdil 'Uzza maju mendahului. Ketika melihatnya, Hamzah memanggil, *“Wahai anak-anak tukang sunat, ke sini!”* Begitu Siba' mendekat, pedang Hamzah pun berhasil menebas lehernya. Pada saat itulah, Wahsyi

nya. Tindakan ini membuat Nabi SAW luka hatinya. Bahkan sampai ketika Hindun masuk Islam pun, Nabi SAW belum bisa melupakannya. Kepedihan itu masih tampak, saat baginda SAW enggan bertutur kata dengan Hindun di awal-awal keislamannya.

Meski pasukan kaum Muslim telah kehilangan singa-singa Allah, masih banyak para ksatria pilih tanding. Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, Zubair, Mush'ab, Thalhah, 'Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin 'Ubadah, Sa'ad bin Rabi', Anas bin Nadhar, dan banyak lagi yang lain, mereka semua masih bisa mengobrak-abrik pasukan kaum kafir.

Di antara para ksatria yang bertempur tanpa rasa takut adalah Handzalah al-Ghasil. Ayahnya, Abu 'Amir, adalah orang fasik,

berhasil menikamnya dari belakang, dan selamatlah Abu Sufyan. Handzalah pun gugur sebagai syuhada', dan jenazahnya pun diangkat para Malaikat, dan dimandikan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Handzalah mendapatkan gelar, *“Al-Ghasil”* yang berarti, *“Al-Maghsul”* (yang dimandikan Malaikat).

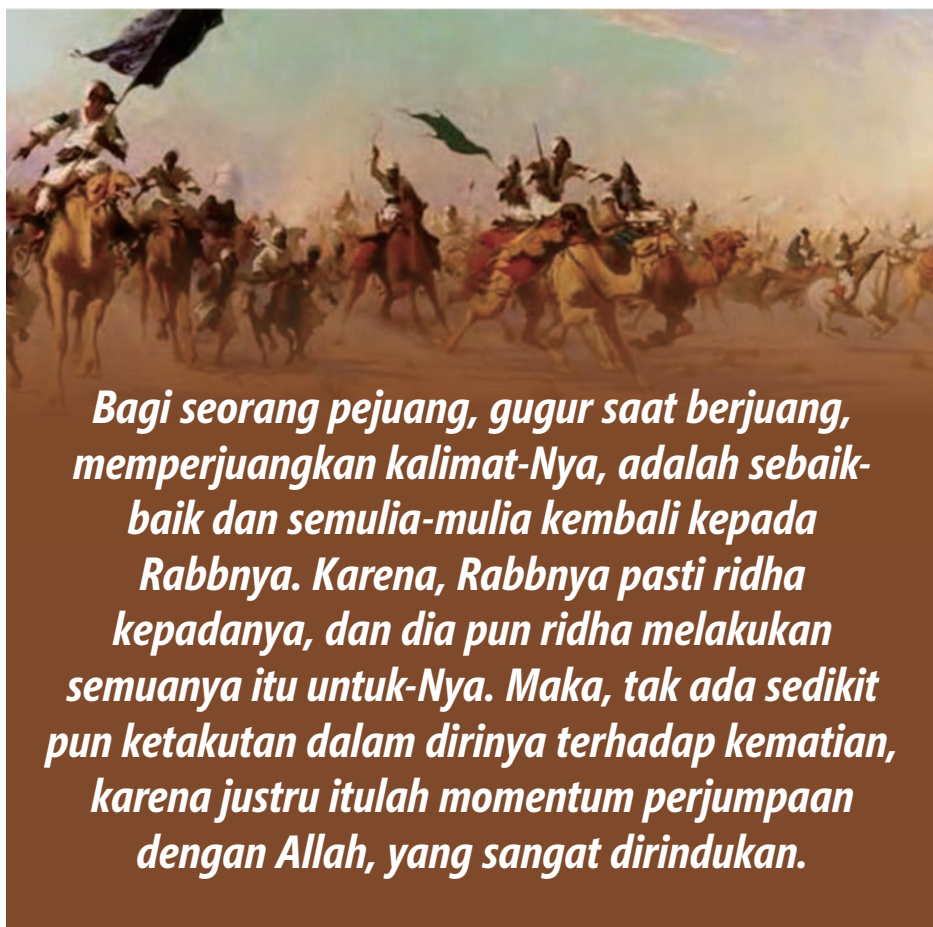
Selain pasukan ini, Rasulullah SAW juga menempatkan pasukan panah, yang ditempatkan di atas Jabal Rumat. Jumlah mereka ada 50 orang. Tugas mereka adalah melindungi pasukan kaum Muslim yang bertempur di bawah dari serangan musuh. Setiap pasukan kavaleri kafir di bawah komando Khalid bin Walid berusaha merangsek, menyerang pasukan di bawah, maka pasukan panah ini dengan sigap menyerang mereka. Setiap kali ada gelombang serangan, pasukan pemanah menghujani mereka dengan panah, sehingga tiga kali serangan yang mereka lancarkan selalu berhasil dipatahkan oleh pasukan panah yang luar biasa ini.

Begitulah, suasana pertempuran yang berkobar dengan dahsyat. Pasukan kaum Muslim, yang jumlahnya hanya sekitar 700 orang itu berhasil menguasai medan pertempuran, hingga moral pasukan kaum kafir runtuh. Pasukan mereka pun tercerai beraf, di kanan, kiri, depan dan belakang. Seolah-olah jumlah pasukan yang dihadapi oleh 3.000 pasukan kafir ini jumlahnya mencapai 3.000, bahkan lebih. Bukan hanya ratusan orang. Pasukan kaum Muslim berhasil menunjukkan mental baja, mental juara, mental ksatria sejati, yang berperang dengan gagah, tak takut mati.

'Abdullah bin Zubair, yang sejak usia 8 tahun sudah diajak berperang oleh ayahnya, Zubair bin 'Awwam, yang tak lain adalah menantu Abu Bakar, menuturkan bagaimana kisah Hindun saat itu. Hindun sampai menyingkap betisnya, karena harus lari tunggang langgang, bersama kawan-kawannya, tanpa membawa keuntungan sedikit pun. Kaum Muslim pun mengejar mereka, agar menyerahkan diri, dan menyerahkan *ghanimah*-nya.

Saat pasukan kaum Muslim berhasil memukul mereka dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa itu, maka terjadilah kesalahan fatal dari pasukan panah, yang berjumlah 50 orang, di atas Jabal Rumat itu. Kesalahan mereka adalah meninggalkan pos mereka, setelah menyaksikan kaum Muslim di bawah berebut mendapatkan *ghanimah*. Padahal, sebelumnya mereka sudah diinstruksikan oleh Nabi SAW agar tidak meninggalkan posisinya, apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah.

Inilah kesalahan tragis, yang menyebabkan terjadinya titik balik. *Wallahu a'lam.*



Bagi seorang pejuang, gugur saat berjuang, memperjuangkan kalimat-Nya, adalah sebaik-baik dan semulia-mulia kembali kepada Rabbnya. Karena, Rabbnya pasti ridha kepadanya, dan dia pun ridha melakukan semuanya itu untuk-Nya. Maka, tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya terhadap kematian, karena justru itulah momentum perjumpaan dengan Allah, yang sangat dirindukan.

mendapatkan bidikannya, ketika Hamzah lengah. Tepat, lembing yang dilemparkannya itu mengenai lambung Hamzah hingga tembus ke selangkangan. Dia terhuyung-huyung ke arah Wahsyi, hingga jatuh tersungkur, gugur sebagai syahid.

Wahsyi menungguinya hingga wafat, setelah itu baru lembingnya dicabut. Setelah itu, Wahsyi pun kembali ke barat, karena merasa tidak mempunyai kepentingan lain, selain misi untuk mewujudkan kemerdekaannya sebagai budak. *“Aku membunuhnya dengan tujuan agar aku bisa bebas.”* Begitulah penuturan Wahsyi. Malangnya, jenazah Hamzah itu dilihat oleh Hindun, yang sejak awal memang sudah kesetanan. Dia pun merobek jantung Hamzah, dan memakan

yang berada di pihak kaum kafir, yang sebelumnya digunakan Abu Sufyan untuk menghancurkan barisan kaum Muslim, tetapi tidak berhasil. Handzalah baru saja melangsungkan pernikahan, saat mendengar gemuruh perang, dia sedang menggauli istrinya, maka dia pun melepaskan pelukannya, dan langsung berangkat bergabung dengan pasukan kaum Muslim. Kehebatannya merangsek barisan musuh, membuatnya sampai di jantung lawan, sehingga dia berhadapan langsung dengan panglimanya, Abu Sufyan.

Sebenarnya, dalam duel itu, Handzalah sudah berhasil menjatuhkan Abu Sufyan, sayangnya pada waktu itu ada Syadad bin Aswad yang membantunya, sehingga

Sifat Malu, Mencegah Keburukan

"Inna minmâ adraka an-nâsu min kalâmi an-nubuwwati al-ûla idzâ lam tastahiy fa[i]sna' mâ syi'ta (Sesungguhnya di antara yang dipahami masyarakat dari perkataan kenabian yang dahulu: jika kamu tidak punya rasa malu maka perbuatlah sesukamu)" (HR al-Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya).

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Abi Mas'ud 'Uqbah bin Amru al-Anshari al-Badri. Imam an-Nawawi mencantulkannya di al-Arba'in hadits ke-20.

Sabda Nabi SAW, *"min kalâm an-nubuwwah al-ûlâ"* (dari perkataan kenabian yang dahulu) menunjukkan bahwa sifat malu itu merupakan sesuatu yang terpuji dan diperintahkan sejak di dalam syariah para nabi terdahulu. Dan di dalam syariah Islam, hal itu tidak dinasakh sehingga sifat malu itu merupakan sesuatu yang disyariatkan.

Menurut ash-Shan'ani di *Subul as-Salam* secara bahasa malu adalah perubahan yang terjadi pada manusia karena takut atas sesuatu yang dicela atau menjadi aib. Sedangkan secara syar'i, malu adalah sifat yang mendorong untuk meninggalkan yang tercela dan menghalangi dari melalaikan hak pihak yang memiliki hak.

Sabda Rasul SAW, *"idzâ lam tastahiy fa [i]sna' mâ syi'ta* -jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesukamu". Sabda beliau ini bisa dipahami dari tiga aspek. *Pertama*, disampaikan dengan redaksi perintah tetapi maknanya adalah celaan dan ancaman, yakni jika engkau tidak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu dan sesungguhnya

Allah akan memberi balasan apa yang kamu lakukan itu.

Kedua, sabda Rasul SAW itu meski disampaikan dalam redaksi perintah maknanya adalah berita (*khabar*). Yaitu maknanya "jika kamu tidak punya rasa malu maka kamu akan melakukan apa saja sesukamu". Hal itu untuk mengisyaratkan bahwa di antara yang menghalangi seseorang melakukan keburukan adalah sifat malu. Jika ia telah meninggalkan atau melepaskan sifat malu itu, tidak ada lagi yang menghalanginya dari keburukan dan sebaliknya justru ada faktor-faktor yang mendorongnya kepada keburukan sehingga seolah-olah ia diperintah untuk melakukan keburukan itu apa saja sesukanya. Dalam konteks sifat malu akan mencegah dari keburukan maka Rasul SAW menyatakannya sebagai bagian dari iman, sebab sifat malu itu berperan seperti iman yang mencegah seseorang dari keburukan. Rasul bersabda: *"al-hayâ'u min al-îmân* -Sifat malu itu bagian dari iman-" (HR Muttafaq 'alayh).

Dalam hal ini Ibnu Qutaibah mengatakan, "Maknanya bahwa sifat malu mencegah pemiliknya dari melakukan kemaksiatan sebagaimana iman, maka disebut bagian dari iman. Itu seperti sesuatu yang disebut dengan sebutan sesuatu yang digantikan posisinya. Dan sifat malu itu terbentuk dari *al-jubnu* (rasa takut) dan *'iffah* (menjaga kesucian diri)."

Ketiga, makna sabda Rasul SAW itu sesuai tekstualnya. Yaitu maknanya jika sesuatu yang ingin engkau lakukan termasuk sesuatu yang tidak perlu malu melakukannya baik kepada Allah ataupun kepada manusia, karena merupakan ketaatan, termasuk akhlak yang baik atau sopan santun yang dipuji, maka lakukan sesukamu. Seba-

liknya, jika termasuk sesuatu yang membuat malu baik kepada Allah atau kepada manusia, maka jangan engkau lakukan.

Maka yang harus diwujudkan adalah sifat malu yang sebenarnya. Itulah yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ibn Mas'ud ra menuturkan: Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *"Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya! Ibn Mas'ud berkata: "kami katakan, "Ya Rasulullah kami sungguh merasa malu dan alhamdulillah." Beliau bersabda: "Bukan yang itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah engkau jaga kepala dan apa yang diwadahnya dan engkau jaga perut dan apa yang dimuat/dikumpulkannya, dan engkau mengingat kematian dan kerentaan, dan siapa yang menginginkan akhirat ia tinggalkan perhiasan dunia. Siapa saja yang melakukan hal itu, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya"* (HR at-Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Maka sifat malu yang disyariatkan itu adalah sifat malu yang menjaga dan mencegah kita dan seluruh organ tubuh kita dari segala bentuk kemaksiatan. Adalah sifat malu yang mendorong dan membuat kita bergairah menunaikan kewajiban, melaksanakan kemanduban dan melaksanakan berbagai ketaatan. Adalah sifat malu yang terus menyemangati kita untuk merealisasi kewara'an. Itu adalah sifat malu yang membuat seorang hamba senantiasa terikat dengan syariah Rabbnya, menjadikannya sebagai abdullah, bukan budak dunia, hawa nafsu dan setan. [] **yahya abdurrahman**

LIVE ON AIR

DaktaFM

Secretan Dunia Islam

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM

SETIAP SENIN

JAM 07.30-08.00 WIB



BERSAMA:

UST MUJIYANTO

(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:



Masuk Islamnya Bangsa Tatar

Tatar berasal dari Gurun Gobi, di ujung Cina bagian utara. Mereka adalah kabilah penggembala, yang menyembah berhala, bintang dan sujud kepada matahari, ketika matahari terbit. Agama yang tersebar di kalangan mereka disebut Syamaniyah. Mereka mengagungkan arwah leluhur.

Kata Tatar digunakan untuk menyebut kabilah Mongol, Turki, Uygur, Saljuk, dan suku yang mendiami kawasan ini. Istilah Tatar digunakan untuk semua kabilah Mongol dan Turki, yang kelak menjadi tonggak berdirinya Khilafah 'Utsmaniyah. Istilah Mongol juga meliputi semua kabilah ini. Melihat cengkraman Jengis Khan, atas kabilah lain. Karena itu, etnis Mongol, digunakan untuk menyebut mayoritas penduduk di Benua Asia, yang berkulit kuning.

Pertanyaannya, apa pengaruh Mongol dalam sejarah kaum Muslim, selain pembunuhan dan pembantaian? Apa yang kita ketahui tentang Mongol, setelah mereka meluluhlantakkan Baghdad, dan mereka berhasil dikalahkan dalam Perang Ain Jalut?

Memori tentang Mongol yang hilang dari benak kaum Muslim, bahwa Mongol mulai masuk Islam, setelah 35 tahun mereka memasuki wilayah kaum Muslim. Belum sampai setengah abad mereka memasuki wilayah kaum Muslim, kecuali mayoritas mereka menjadi Muslim. Melalui tangan mereka, Allah muliakan kembali Islam. Mereka juga telah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, yang dengannya kekuasaan kaum Muslim kokoh untuk jangka waktu yang

lama. Bahkan, tak sedikit dari mereka memerangi sesama suku mereka, demi Islam.

Memang tidak dipungkiri, setelah peristiwa serangan mereka terhadap Baghdad, dan 35 tahun mereka di negeri kaum Muslim, karakter mereka tidak hilang, kecuali setelah



mereka memeluk Islam. Padahal, dari aspek akidah dan dakwah Islam, jelas tidak sehebat di masa generasi Muslim pertama. Tetapi, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sisi positif mereka dalam sejarah kaum Muslim, juga kontribusi mereka dalam meningkatnya wilayah Islam,

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, belum bisa diulang hingga sekarang.

Masuknya Islam ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah dijamah kaum Muslim. Pengaruh mereka di sana, meski berbagai upaya terus-menerus dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan memusnahkan mereka. Karena itu, bisa dikatakan, bahwa Mongol mewariskan negeri Islam yang begitu luas, dari ujung Timur hingga perbatasan wilayah Barat, dan perbatasan Asia-Eropa.

Wilayah Tatar itu meliputi kawasan Timur Eropa, dan Barat Siberia, kawasan Iran, Cina dan Mongolia, kawasan Turkistan Barat, dan India. Yang menarik, dakwah Islam justru tiba-tiba tersebar di kalangan bangsa ini. Melalui tangan-tangan para pengemban Islam terwujudlah apa yang belum pernah diwujudkan sebelumnya, baik dengan senjata, tekanan penguasa dan raja. Karena itu, Islam mulai merasuki jiwa-jiwa musuhnya, dan memikat hati mereka.

Karena itu, merupakan hal yang aneh, ketika bangsa pemenang perang ini justru tunduk kepada Islam, yang pemeluknya mereka kalahkan. Biasanya, bangsa yang menang, akan diikuti oleh umat yang kalah. Tetapi, tidak dengan Islam dan kaum Muslim. Justru, Tatar tunduk kepada Islam dan kaum Muslim, umat yang ditundukkan. Bahkan, bangsa Tatar ini memeluk agama mereka pada posisi yang paling kuat, dan puncak kekuasaannya. **har**

KRISTOLOGI

LGBT dalam Bibel

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center



Kalaupun dalam Islam, LGBT sudah jelas diharamkan. Bagaimana dengan Kristen? Bibel hanya memuat gay saja atau perilaku menyukai sesama jenis dari kalangan pria. Dan hal ini dikisahkan dalam Perjanjian Lama yakni peristiwa Sodom dan Gomorah, kampung tempat kaum Nabi Luth as (Lot) tinggal.

Kejadian 19:1-26

Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata: "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka: "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang."

Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke

dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu.

Mereka berseru kepada Lot: "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata: "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat.

Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang

untuk berlindung di dalam rumahku."

Ringkas cerita, kaum Sodom tetap sama memaksa untuk mendapatkan dua orang tamu Lot. Ketika mau mendobrak pintu, malaikat membutakan mata mereka. Setelah itu keduanya memerintahkan Lot dan keluarga untuk pergi karena bumi tersebut mau dihancurkan. Esok paginya, malaikat itu meminta Lot segera pergi.

Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang: "Larilah, selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di mana pun juga di Lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap."

Kata Lot kepada mereka: "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana; kota itu kecil; izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara."

Sahut malaikat itu kepadanya: "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik; yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggabalikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana."

Itulah sebabnya nama kota itu disebut

Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian TUHAN menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari TUHAN, dari langit; dan ditunggabalikkan-Nyalah kota-kota itu dan Lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.

Dan sanksi atas perbuatan gay dan penyimpangan lainnya, lebih tegas lagi dalam Kitab Imamat,

Imamat 18:22-23:

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.

Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apa pun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan ekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji.

Imamat 20:13

Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.

Maka sudah jelas sekali, Bibel memuat kisah kekejian kaum Nabi Luth as, dan menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan LGBT adalah perbuatan menyimpang yang dikatakan sebagai kekejian. Hukumannya pun sangat tegas: hukuman mati. **har**



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Kondisi Mesir pasca kudeta beberapa tahun lalu masih darurat militer. Namun demikian, Mesir masih menjadi kiblat ilmu. Jutaan orang dari



■ Al-Azhar, pabrik ilmuwan kelas dunia sejak 1000 tahun.

dunia Islam masih datang ke Mesir untuk berburu ilmu.

Berabad-abad Mesir memang negeri para ilmuwan, baik ilmuwan di bidang fiqh maupun di bidang sains dan teknologi. Kehebatan Mesir hanya tertandingi oleh Cordoba dan Baghdad. Rahasiannya ada pada Islam.

Memang, berabad-abad sebelum Islam hadir di Mesir, negeri ini pernah memiliki banyak matematikawan, astronom dan insinyur yang hebat. Para insinyur itu digunakan Fir'aun untuk membangun piramid raksasa dengan presisi yang tinggi. Sebelum datangnya Romawi, Alexandria pernah memiliki perpustakaan terlengkap di dunia. Namun Romawi lalu memusnahkan perpustakaan itu. Selama enam setengah abad sesudahnya, Mesir tenggelam dalam kegelapan peradaban. Sampai akhirnya cahaya Islam datang.

Ketika pasukan Amr bin Ash membebaskan Mesir dari tangan Romawi, pampasan perang yang diminta bukanlah emas, perak atau harta benda sejenisnya. Tetapi semua buku kuno yang telah ditelantarkan berabad-abad. Buku-buku itu lalu diterjemahkan, dipelajari dan dikembangkan. Tanpa upaya ini, mungkin kita hanya mengenal Ptolomeus sebagai seorang jenderal yang menjabat gubernur, bukan sebagai astronom yang menulis buku astronomi *Almagest*, yang dipelajari di seantero dunia Islam sebagai tafsir ayat "Dan langit bagaimana ditinggikan" (QS al-Ghasiyah:18).

Di Mesirlah sejak tahun 969 M berdiri universitas kelas dunia, Universitas al-Azhar. Dalam sejarahnya yang sangat panjang, dari universitas ini muncul tidak cuma orang-orang yang mumpuni dalam ilmu, tetapi juga rajin mengingatkan para penguasa yang lalai ataupun berdiri di garis depan dalam jihad fi sabilillah melawan tentara salib ataupun penjajah

Barat lainnya. Reputasi pabrik ilmuwan kelas dunia seperti itulah yang memanggil para agninya untuk wakaf dengan aset-aset produktif – seperti kebun, pabrik atau pasar – agar Al-Azhar dapat terus memberi beasiswa calon-calon ulama pejuang dari seluruh dunia.

Dalam sejarahnya yang panjang itu Mesir bertabur bintang-bintang sains. Inilah beberapa di antaranya:

Bidang Kedokteran

Pada 800 M didirikan rumah sakit jiwa pertama di dunia oleh seorang dokter di Kairo.

Pada 1118-1174 M, penguasa Mesir Nur ad-Dien Zangi memerintahkan membangun rumah sakit

pendidikan pertama di dunia. Dokternya, Abu al-Majid al-Bahili menyumbangkan perpustakaan.

Pada 1285 M di Kairo berdiri rumah sakit terbesar di dunia, atas perintah Sultan Qalaun al-Mansur. Menurut Willy Durant, rumah sakit ini dilengkapi dengan halaman-halaman terpisah untuk setiap kelompok pasien dengan penyakit yang berbeda, disejukkan dengan kolam-kolam



■ The Islamic Roots of the Modern Hospital

air mancur, laboratorium, apotek, kantin, pemandian, perpustakaan, sarana ibadah, ruang kuliah, dan untuk pasien gangguan jiwa ada akomodasi yang menghibur (musik yang lembut atau pendongeng profesional). Hebatnya lagi, pelayanannya diberikan gratis untuk seluruh pasien, tanpa memandang jenis kelamin, etnis atau penghasilan. Bahkan saat mereka boleh pulang diberikan tunjangan agar tidak harus segera bekerja.

Bidang Ilmu Kimia

pada 650-704 M, Khalid ibn Yazid adalah ahli kimia muslim pertama yang menerjemahkan ilmu kimia kuno (alkimia) Mesir kuno ke dalam bahasa Arab. Sejak itulah ilmu kimia berkembang di seantero dunia Islam.

Pada 1250 M, para insinyur di Mesir berhasil membuat senapan tangan

(midfa), yang merupakan prototype pistol atau senjata api yang portabel. Senjata ini digunakan oleh pasukan Mesir untuk mengalahkan tentara Mongol dalam

pertempuran di Ain Jalut. Menurut Syamsuddin Muhammad (wafat 1327 M), pistol ini memiliki bubuk mesiu yang terdiri dari 74 persen amonia, 11 persen belerang dan 15 persen karbon – sebuah komposisi yang ideal seperti di zaman modern. Pasukan Mesir juga dikabarkan sudah menggunakan pakaian yang tahan api agar tidak terluka oleh cartridge mesiu yang mereka bawa.

Bidang Matematika dan Fisika

Pada 850-890 M hiduplah Abu Kamil Syuja ibn Aslam ibn Muhammad ibn Syuja, yang merupakan simpul penting dalam pengembangan matematika, penghubung antara al-Khwarizmi (penemu aljabar) dengan al-Karaji (penemu geometri analitis). Abu Kamil lah

orang pertama yang menuliskan notasi dengan tanda pangkat seperti $x^n \cdot x^m = x^{m+n}$.

Sekitar tahun 1000-1009 M, Ibnu Yunus mempublikasikan hasil risetnya di bidang fisika dan astronomi *Al-Zij al Hakimi al Kabir*. Ini adalah deskripsi paling awal tentang gerak bandul (pendulum). Dia juga membangun tugu astrolab yang pertama.

Dalam dunia fisika, penemuan optika oleh Ibn al-Haitsam (1021 M) juga dapat dikatakan terjadi di Mesir, ketika al-Haitsam ini mengalami tahanan rumah, setelah insinyur yang berasal dari Iraq itu gagal menyelesaikan proyek bendungan sungai Nil, lalu pura-pura gila.

Pada 1312-1361 M, Tajuddin Ali ibn ad-Duraihim ibn Muhammad at-Tha'alibi al-Mausili menulis banyak hal tentang ilmu persandian (kriptologi). Karya beliau diungkap dalam salah satu bab dari ensiklopedi 14 jilid karya Syihabuddin Abu'l Abbas Ahmad ibn Ali bin Ahmad Abdullah al-Qalqasyandi (1356-1418 M). Di situ dijelaskan teknik substitusi dan transposisi, dari yang sederhana hingga yang rumit, sehingga mampu membuat suatu plain-text menjadi text yang tidak dapat dibaca kecuali dengan analisis kriptotingkat tinggi.



■ Ibn al-Haitham



Bidang teknologi rekayasa

Pada 860 M, astronom al-Farghani membangun Nilometer, sebagai alat peringatan dini tinggi air sungai Nil, baik untuk mengantisipasi banjir ataupun kekeringan.

Pada 953 M Ma'ad al Mu'izz, seseorang qadi di Mesir, menemukan fulpen yang tidak akan mengotori tangan atau bajunya, yang tintanya tersimpan dalam suatu reservoir dan turun oleh gaya gravitasi dan kapiler. Ini adalah penemuan fulpen yang tercatat pertama kali, seperti direkam oleh an-Nu'man al-Tamimi (wafat 974 M) dalam bukunya *Kitab al-Majalis wa'l Musayardh*.

Pada tahun 1000-an M, banyak penemuan teknik di Mesir seperti ventilator untuk pertambangan, penggilingan gandum bertenaga air sungai yang berbentuk jembatan (bridge mill) dan industri logam bertenaga air.

Pada 1551 M, insinyur Taqiyyuddin Asy-Syami (1526-1585 M.) yang disponsori pemerintah Utsmaniyah di Mesir menciptakan mesin uap, jauh lebih dulu dari James Watt (1736-1819) di Inggris. Di juga membuat teleskop tahun 1574 M, sebelum Galileo Galilei pada tahun 1609 M

Semoga kondisi darurat militer di Mesir saat ini cepat berlalu, dan di Mesir



■ Astronom Muslim dan teleskopnya.

muncul pemerintah yang baru yang menerapkan syariat Islam, agar Mesir meraih kembali kemuliaannya dalam sejarah peradaban selama berabad-abad.[]

Menentang Kewajiban Khilafah, Gelar 'Ulama' Raziq Dicopot

Saat ini ulama su' pengikut Ali Abdul Raziq banyak, bukunya yang berjudul Al-Islam wa Usul al-Hukm seakan menjadi blue print mereka. Padahal di tahun yang sama dengan penerbitan buku yang membebek ke Barat tersebut, Dewan Ulama Universitas Al-Azhar dengan tegas membantah argumen Raziq sekaligus mencopot gelar ulamanya.

Syeikh Muhammad Rashid Rida menjadi salah satu ulama pertama yang mencela Ali Abdul Raziq. Pasalnya, Raziq (1925) dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan) menjadi 'ulama' pertama yang menentang penegakan kembali khilafah yang telah runtuh pada 1924.

Dalam majalah *Al-Manar*, Rida menyebut gagasan Raziq sebagai "gagasan jahat" yang "sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh siapa pun yang mengaku Islam, apakah ia jujur atau tidak." Faktanya, "Khilafah Islam adalah sistem terbaik yang dikenal manusia."

Berbeda dari apa yang dikatakan Raziq, Rida menyatakan bahwa "Muslim merupakan bangsa terbesar ketika mereka menegakkan khilafah," dan kemunduran terjadi karena umat meninggalkannya. Ia kemudian mendorong ulama lain untuk mengecam Raziq karena telah "menolak khilafah yang sejatinya merupakan institusi Islam yang diwajibkan oleh syariah."

Raziq dipanggil oleh Dewan Ulama dan bukunya dikaji oleh dua puluh empat rekannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada 12 November 1925, sebuah putusan dikeluarkan dengan suara bulat untuk mengecam dan mengeluarkan Raziq dari jajaran ulama. Ia dijatuhi sanksi berupa pencabutan ijazah dan pelarangan bekerja sebagai hakim.

Berbagai klaimnya (bahwa Islam hanyalah agama spiritual, bahwa sistem pemerintahan Islam tidaklah jelas, atau bahwa aturan yang diterapkan oleh generasi awal para pemimpin Muslim tidak didasarkan pada agama) dianggap sesat.

Dewan memutuskan bahwa "gagasannya cukup untuk menempatkannya sebagai kelompok khawarij dan bukan bagian dari Muslim." Langkah itu semakin menegaskan pemahaman normatif tentang khilafah dan politik dalam Islam tradisional.

Raziq menyatakan pembelaannya dengan mengatakan bahwa ia hanya menciptakan "sebuah aliran pemikiran baru dalam masalah itu." Keluarga dan rekan-rekannya dari Konstitusional Liberal dan surat kabar, seperti corong partai itu, al-Siyassa, bersatu melawan putusan dengan mengklaim bahwa itu adalah bagian dari kebebasan berbicara.

Raziq dipandang oleh para pendukungnya sebagai "Luther dari Mesir," dan pandangannya dianggap sebagai seruan untuk mengembalikan kedaulatan kepada umat yang

menentang tipu daya Istana.

Politisi Mesir terkemuka lainnya, seperti Sa'ad Zaghloul, memiliki pendapat yang sangat berbeda. Ia mengatakan bahwa ia "terheran-heran melihat seorang ulama Islam menulis soal masalah khilafah." Meskipun "banyak membaca karya orientalis dan yang sejenisnya," ia "tidak pernah menemukan salah satu dari mereka menyerang Islam dengan amarah seperti itu."

Di akhir pernyataannya, Zaghloul merasa bahwa Raziq "tidak memahami dasar-dasar agama" karena "jika paham, bagaimana mungkin ia dapat mengklaim bahwa Islam bukanlah sebuah peradaban, dan bahwa Islam tidak memiliki sistem yang sesuai untuk memimpin?"

Bantahan Terus Bermunculan

Kemarahan terhadap buku itu terus berlanjut dengan terbitnya berbagai bantahan yang ditulis oleh para ulama di dalam dan luar Mesir. Di Mesir, ulama al-Azhar yang buta, Syeikh Yusuf al-Dijwi, menulis bantahan terhadap Raziq di koran Mesir, *al-Akhbar*.

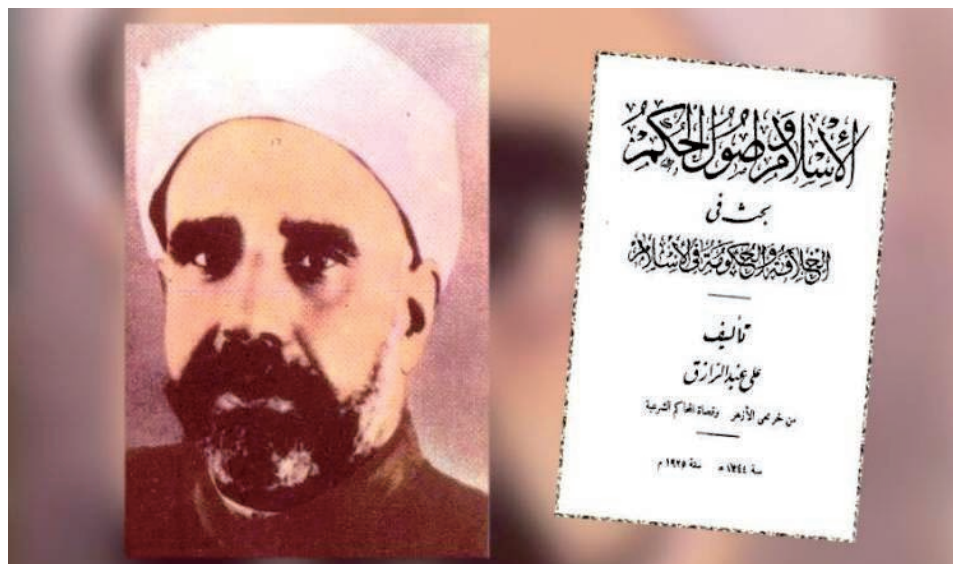
Penghinaan para pendukung Raziq terhadap bantahan itu semakin meningkatkan ketegangan. Syeikh Mohammad ibn 'Ashur dari Tunisia mengkritik klaim bahwa ada aliran pemikiran dalam Islam yang meyakini bahwa khalifah memperoleh kekuasaannya dari Allah. Ia juga membantah analogi para pemikir Eropa yang dirujuk Raziq seperti Hobbes dan Locke, karena tidak ada dikotomi semacam itu dalam pemikiran Islam.

Sebaliknya, ungkap Ibn 'Ashur, "Islam ditopang oleh negara" dan "negara adalah bagian dari Islam karena agama dan negara menyatu." Dengan demikian, khilafah adalah "pilar agama," atau lebih tepatnya "pelindung semua pilar agama."

Menurut Ibn 'Ashur, pernyataan Raziq bahwa khilafah hanya murni politik pada hakikatnya bertentangan dengan fakta bahwa baiat sejak generasi pertama Muslim dan seterusnya selalu diambil berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasul.

Dua bantahan yang paling komprehensif dan dinamis berasal dari Syeikh Muhammad al-Khidr Hussein, seorang ulama Tunisia yang menghabiskan waktu di penjara Suriah karena melawan rezim Prancis, dan Syeikh Muhammad Bakhit, kepala Universitas al-Azhar saat itu.

Bakhit menolak klaim Raziq karena tidak ada dalil islami yang mendukung berbagai klaim itu. Ia pun mengingatkan pembacanya bahwa "penggalan berbagai



isu tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pemikiran" karena ijtihad dalam hukum Islam wajib dilakukan dengan "berlandaskan pada Alquran, as-Sunnah, ijma', atau qiyas."

Ia juga mengecam pernyataan Raziq bahwa khilafah hanya menjadi "sumber malapetaka." Berbeda dengan Raziq yang begitu berkiblat terhadap bangsa Eropa, Bakhit justru berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasul, "kaum Muslimah yang pertama kali menerapkan aturan bahwa kekuasaan ada di tangan umat, dan bahwa umatlah yang memilih pemimpinnya," dan aturan itu ditetapkan oleh syariah.

Buku Bakhit dianggap sebagai kritik yang sangat tajam. Buku setebal hampir seratus halaman itu merinci beberapa aspek politik negara di bawah kepemimpinan Rasul (mulai dari penyelesaian sengketa hingga korespondensi diplomatik dan propaganda), dan dilengkapi dengan celaan yang begitu jelas terlihat terhadap Raziq.

Syeikh Al-Khidr Hussain, yang juga teman dekat Raziq, mengesampingkan urusan pribadinya dalam tulisannya berjudul "Refutation of the Book 'Islam and the Fundamentals of Ruling' (Bantahan terhadap Buku 'Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan')."

Tulisan itu membahas argumen Raziq dengan begitu detail. Menurutnya, "kekuasaan yang diberikan kepada khalifah tidak lebih besar dari kekuasaan kepala pemerintahan konstitusional" karena pilihannya "hanya untuk periode yang ditetapkan," yakni selama ia "menetapkan aturan syura yang semestinya" serta "mengerahkan segala upaya untuk melindungi hak-hak umat dan tidak menghalangi kebebasan mereka."

Seperti Ibn 'Ashur, ia juga menolak perbandingan dengan filsuf dan mazhab pemikiran Eropa, khususnya pemikiran Hobbes yang dijadikan rujukan Raziq.

Al-Khidr menjelaskan, Hobbes meyakini bahwa setiap individu harus tunduk pada otoritas raja, sedangkan para ulama Islam menyatakan bahwa penguasa tidak boleh dipatuhi kecuali jika ia memerintah dengan kebenaran.

Hobbes mengklaim bahwa ketundukan penguasa kepada rakyat bertentangan dengan hakikat sebuah hierarki. Sebaliknya, para ulama Islam justru menyatakan bahwa penguasa wajib tunduk bahkan kepada kalangan kelas bawah jika mereka mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan.

Selain itu, Hobbes menyatakan bahwa agama tunduk kepada raja, sedangkan para ulama Islam mengatakan bahwa para penguasa wajib tunduk pada aturan Islam, yang ditentukan dalam sumber-sumber hukum Islam atau yang berasal proses ijtihad.

Berbeda jauh dari sistem yang zalim, tegas Al-Khidr, "Islam justru mengobarkan perang melawan segala bentuk kezaliman" melalui khilafah yang telah "membebaskan" banyak negeri dan memberikan mereka kesempatan merasakan manisnya keadilan setelah mengalami berbagai siksaan, tekanan, dan penindasan."

Sama seperti Bakhit, proses ijtihad yang sahih juga ditekankan oleh Al-Khidr. Ia menyatakan bahwa "sumber-sumber hukum syariah hanya terdiri dari Kitabullah, as-Sunnah, ijma', dan qiyas."

Aturan khusus dari sumber-sumber itu juga dianggap sebagai dalil yang dapat diterima untuk setiap hukum yang digali. Dengan demikian, beber Al-Khidr, jika Alquran tidak menjabarkan dalil yang jelas tentang kewajiban khilafah, dalil itu dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum lain yang telah disepakati.

Setiap keputusan atau pendapat yang dilandasi oleh selain sumber-sumber hukum itu tidak dianggap ijtihad. Oleh karena itu, alih-alih dianggap sebagai "mazhab pemikiran baru," pendapat Raziq benar-benar dikecam sebagai hasil ijtihad yang bertentangan dengan Islam dan tidak memiliki kredibilitas religius sama sekali.

Raziq saja yang "menolak" menyatakan khilafah wajib" dianggap tidak memiliki kredibilitas religius sama sekali dan ijazah keulamaannya dicabut, lantas bagaimana dengan ulama hari ini yang malah mengkriminalisasi khilafah sebagai ancaman? **Septian AW | sejarawan**



Kasus Hikma-Aziz: Fakta Liberalisasi Perguruan Tinggi Islam

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Beberapa pekan lalu dua perguruan tinggi Islam di negeri ini menjadi sorotan publik. Yakni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang telah meluluskan disertasi doktoral Abdul Aziz yang mempromosikan keabsahan hubungan seksual di luar nikah. Serta IAIN Kendari yang memberhentikan seorang mahasiswanya, Hikma Sanggala, yang dituding menyebarkan paham radikalisme.

Ada hal penting yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenag RI tersebut telah menunjukkan sikap diskriminatifnya. Sebuah sikap yang tidak layak terjadi di sebuah perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi yang membawa label Islam.

Kedua, lolosnya disertasi Abdul yang mempromosikan zina di hadapan para dosen pe-

nguji itu menunjukkan bahwa pemikiran liberalisme begitu kuat di UIN Sunan Kalijaga. Perhatikan disertasinya yang berjudul *'Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital'*. Sangat jelas Aziz mengadopsi dan mendukung pemikiran Muhammad Syahrur, dedengkot gerakan Islam liberal dari Suriah.

MUI pun turut merespon disertasi kontroversial tersebut. Melalui *press-release* MUI menyatakan bahwa pemikiran dalam disertasi Abdul itu bertentangan dengan Alquran dan Sunnah serta pendapat para ulama yang *mu'tabar*. Bahkan masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang (*al-afkar al-munhariafah*) yang harus ditolak oleh umat Muslim.

Ketiga, tuduhan pada Hikma yang disebut menyebarkan paham radikalisme itu juga mengindikasikan secara kuat

bahwa penguasa IAIN Kendari telah terpapar paham liberalisme dan fobia Islam. Sebab bukan rahasia umum lagi, senjata utama kelompok liberal untuk melawan kelompok Islam memang melalui isu radikalisme itu. Misalnya mereka sudah terbiasa menuding radikal pada kelompok Islam yang dalam dakwahnya menyerukan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam sistem khilafah.

Apa yang dilakukan oleh penguasa IAIN Kendari itu dapat dikategorikan diktator. Pasalnya sampai saat ini belum ada definisi yang jelas tentang radikalisme. Juga tidak ada satu pun keputusan pemerintah, putusan pengadilan, dan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi radikalisme.

Keempat, isu radikalisme itu sebenarnya merupakan isu global. Berbagai lembaga penting, seperti perguruan tinggi, me-

mang sedang diseret untuk menjadi bagian dari agenda *"War on Radicalism"* itu. Isu tersebut dulu muncul bersamaan dengan isu terorisme. Keduanya sama-sama dimunculkan oleh Barat yang tujuannya sama yakni untuk melawan Islam dan kaum Muslim. Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump telah mengubah slogan *"Global War on Terrorism"* menjadi *"Global War on Radicalism"*.

Pada Tahun 2007 *Rand Corporation* menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul *Building Moderate Muslim Networks*. Riset yang dikomandani oleh orientalis Angel Rabasa dan Cheryl Benard itu berisi berbagai rekomendasi bagi Amerika Serikat untuk melawan kelompok Islam radikal. Salah satunya adalah pemberian dukungan dan bantuan finansial kepada kalangan intelektual dan akademisi Muslim yang sekuler dan liberal.

Jadi perang melawan radikalisme itu merupakan proyek Barat untuk menjaga kepentingannya, yakni untuk menguasai dunia dengan sistem kapitalisme-sekulernya. Seperti yang direkomendasikan *Rand Corporation* tersebut mereka menggunakan tangan intelektual dan akademisi Muslim liberal di berbagai negara untuk menghadang gerakan Islam.

Faktanya tidak ada yang bahaya dari ajaran Islam, termasuk ide khilafah, karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Hal itu bisa ditelusuri dari rekam jejak peradaban Islam yang eksis memimpin dunia selama 13 abad. Bahaya yang sesungguhnya justru datang dari para kelompok liberal itu. Karena merekalah sejatinya komprador negara penjajah yang hendak melanggengkan kolonialismenya di negeri-negeri Muslim. *Wallaahua'lam bi ash-shawaab.*[]

MEDIA GAUL



Apa Jadinya Jika Kementrian Agama 'Memerangi' Pendidikan Perang?

Oleh Ihsan Tampubolon, Aktivis Dakwah dan Youtuber Ideologis

Boro and sis, kelakuan para pejabat negeri +62 ini memang membuat kita mengernyitkan dahi berkali-kali, khususnya 5 tahun terakhir. Dan baru-baru ini, salah satu pejabat Kemenag menyatakan di depan awak media akan mempertimbangkan untuk mencampakkan Pendidikan Jihad dalam kurikulum madrasah.

Menurutnya Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menghapus materi tentang perang dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah. Hal itu diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2020.

"Kita akan hapuskan materi tentang perang-perang di pelajaran SKI tahun depan. Berlaku untuk semua jenjang, mulai dari MI (madrasah ibtidaiyah) sampai MA (madrasah aliyah)," kata Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Umar, di Jakarta, Jumat, (13/9).

Masih dari dia, sebagai gantinya, akan dimasukkan materi mengenai masa-masa kejayaan Islam. Meliputi kejayaan Islam di dunia dan Indonesia. Langkah tersebut, kata dia, dilakukan agar Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang selalu dihubungkan dengan perang.

Ngga usah ahli sejarah, ngga usah para ulama dan kiai, setiap Muslim yang pernah mengenal bagaimana sirah perjalanan Rasulullah dan para sahabat pasti akan mengernyitkan dahi dengan logika Kemenag yang ter-

bolak-balik *begini*. Mengapa? Penulis ingin mengangkat tiga hal untuk menjawab narasi ini,

Pertama, perang adalah bagian dari syariat Islam. Banyak sekali ayat Alquran yang mulia memerintahkan umat Islam untuk berperang. Misalnya Allah berfirman dalam at-Taubah ayat 41, yang artinya, *"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

Juga firman Allah dalam Ali Imran ayat 142, yang artinya, *"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar."*

Kedua, perang adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, generasi setelahnya hingga sampainya Islam termasuk ke Indonesia. Jika kita membaca sirah Nabi SAW, kita akan menemukan bahwa perang merupakan jalan untuk mengemban Islam ke seluruh dunia, membebaskan ummat dari keterpurukan, serta menjadikan mereka menyembah satu-satunya zat yang layak dan wajib disembah yaitu Allah SWT.

Rasulullah SAW sendiri berdiri di tengah-tengah pasukan perang, mengkoordinir mereka, mengangkat para panglima, meminta saran dan strategi jihad, serta ikut ber-

perang bersama mereka. Rasulullah terluka, giginya patah, pipinya sobek, puluhan tombak dan panah mengarah pada tubuh beliau. Tapi Rasul tidak pernah menyerah walau jumlah pasukan musuh tiga kali lipat dengan persenjataan yang lebih lengkap. Rasul SAW dan para sahabat memanjatkan doa dengan khusyuk pada malam hari, serta berperang dengan luar biasa pada siang hari demi menyebarkan *kalimatul haq*, *Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasulullah*.

Jika pendidikan perang akan dihapuskan dari kurikulum madrasah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sebagian besar kehidupan Rasulullah yang mulia?

Ketiga, sesungguhnya perang dalam Islam bukanlah sesuatu yang *barbar*, menyengsarakan manusia, ataupun kejahatan. Jihad adalah perintah Allah, yang dengannya umat Islam akan mulia dan mendapatkan rahmat. Jihad bukan untuk menjajah manusia, tetapi menaklukkan negeri yang setelah itu masyarakat di dalamnya justru akan mendapatkan kesejahteraan yang tidak mereka dapatkan saat dikuasai oleh rezim diktator dan para agen kapitalis. Insya Allah, kelak pada saatnya tiba, kita akan berdiri di barisan terdepan dalam jihad demi menyongsong janji Allah berupa kejayaan di dunia dan surga di akhirat kelak. Aamiin.[]



INDONESIA DARURAT ZINA

Padahal ini negeri mayoritas Muslim. Tapi mengapa berita-berita "lendir" tak pernah habis menghiasi media?

Bencana moral melanda Indonesia. Sayang, tak banyak yang menyadari. Bahkan tidak ada perhatian serius dari penguasa. Apa itu? Zina merajalela. Sebuah dosa besar yang dilakukan kian terang benderang. Namun, terlihat samar karena disembunyikan di balik istilah yang memabukkan. Seks pranikah, seks nonmarital, seks sejenis, seks suka sama suka, *samen leven* (kumpul kepo), LSL (laki-laki suka laki-laki), dsb. Semua itu intinya: zina.

Belum lagi yang namanya video mesum, pesta seks, tukar menukar pasangan (*swinger*) dan nikah *mut'ah*. Semua itu intinya: zina. Pintu masuk menuju perzinahan juga dikemas dengan istilah menipu: pacaran, teman tapi mesra, hubungan tanpa status, dan tahu sama tahu.

Kementerian Kesehatan pada 2009 pernah merilis perilaku seks bebas remaja dari hasil penelitian di empat kota: Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya. Hasilnya, sebanyak 35,9 persen remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan, 6,9 persen responden telah melakukan hubungan seksual pranikah (*metronews.com*). Itu data sepuluh tahun lalu. Bagaimana saat ini? Bagaimana pula tahun-tahun mendatang jika perzinahan tidak menjadi perhatian serius untuk diatasi?

Sakit Mental

Masyarakat semua paham bahwa zina adalah dosa besar. Haram. Namun mengapa zina merajalela? Penyebabnya tak lain karena kian permisifnya sikap masyarakat. Pandangan bahwa zina itu buruk, dosa besar dan haram, semakin luntur. Masyarakat semakin cuek. Kalaulah mereka bukan pelaku zina, tapi mereka juga tidak peduli ketika zina tercium di

sekitarnya.

Bahkan, sebagian masyarakat diam-diam ikut menikmati zina. Buktinya, ketika beredar video zina, bagaimana reaksi mereka? Boro-boro marah. Menghapus. Jijik atau sejenisnya. Tidak. Mereka malah minta *link*. Ikut mengunduh. Menonton dan menikmatinya. *Astaghfirullah*.

Apalagi pelakunya, juga makin cuek. Tak peduli lagi akan keburukan yang mereka lakukan. Tak lagi malu-malu berzina. Bahkan terkadang bangga. Hal ini tak lepas dari tontonan yang diakses. Lihat saja, artis dan aktor idola, banyak dari kalangan pezina.

Tayangan *talkshow* di televisi atau *Youtube* demikian vulgar mengumbar tentang persetubuhan. Pewawancara tak segan bertanya pada sang pezina (yang labelnya artis): masih perawan tidak? Siapa yang menjebol pertama kali? Sudah tidur dengan berapa mantan? Penonton pun tersenyum dan tertawa. Alih-alih merasa muntah. Malah menyanjung dan memuji pengakuan jujur si pelaku maksiat. *Na'udzubillahi mindzalik*.

Tampaknya masyarakat telah terjankit sakit mental. Bagaimana bisa sebuah kebobrokan diapresiasi. Dijadikan hiburan. Dinikmati *massal*. Masyarakat telah terjankit kelainan seksual *massal*. Menyukai hal-hal berbau seksual di ranah publik. Mematikan kepekaannya terhadap perilaku amoral.

Liberalisasi Seksual

Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah yang bersih. Cenderung berbuat baik. Tidak akan tenang jiwanya jika berbuat buruk. Orang berzina itu sebenarnya tidak tenang jiwanya. Buktinya, mereka cari tempatnya yang tersembunyi. Janjiannya diam-diam. Takut ketahuan. Takut hamil. Takut kena penyakit menular seksual. Dihantui rasa berdosa. Normalnya seperti itu.

Tapi, memang masyarakat sudah banyak yang tidak normal. Sudah mengalami gangguan syahwat. Artinya, hidupnya dipenuhi urusan bawah perut itu saja. Seolah-olah tidak pernah ada puasnya. Aturan agama dan adat masyarakat, akhirnya dilanggar juga. Tanpa rasa takut, yang penting syahwat terpuaskan.

Benar, Allah SWT menciptakan *naluri nau'* yang berhubungan dengan gejala syahwat. DiaturNya pemenuhan naluri itu melalui lembaga suci pernikahan. Dijadikanlah kenikmatan bagi pasangan yang berkomitmen dalam berumah tangga demi melahirkan keturunan.

Namun, komitmen suci ini dirusak oleh paradigma berpikir menyesatkan tentang naluri seksual. Paradigma itu berasal dari ideologi Barat yang liberal. Yang bertujuan menjadikan syahwat bebas merdeka. Bebas dari aturan agama. Membebaskan manusia untuk memenuhi syahwat kapan saja, di mana saja dan dengan cara apa saja atau berpasangan dengan siapa saja. Bebas seperti binatang.

Berlindung di balik istilah: hak asasi manusia atau hak reproduksi, setiap insan bebas melampiaskan syahwatnya. Begitu ajaran Barat yang kini merajalela di Indonesia. Padahal ini negeri mayoritas Muslim. Tapi pemenuhan syahwat masyarakat sedemikian liberal. Bahkan ada upaya untuk melegalkan zina. Terkuaknya disertasi sampah mengonfirmasi akan hal itu.

Apalagi jika kita mengakses media, mengapa berita-berita "lendir" (maaf) tak pernah habisnya? Coba saja tengok judul berita di media. Pasangan mobil goyang digerebeg. Murid bersetubuh dengan gurunya di ruang kelas. Seorang taruna sekolah militer membunuh pacarnya yang mengaku hamil. Ia biasa bersetubuh pula dengan teman perempuan yang naksir dia. Adalagi berita, wanita membunuh bayinya karena tak tahu ayahnya siapa.

Sebab, dua pacarnya sama-sama pernah berzina dengannya. Inilah fakta Indonesia darurat zina.

Tanpa Zina

Lantas bisakah Indonesia tanpa zina? Sangat bisa. Syaratnya cuma satu, tegakkan sistem Islam. Sebab hanya Islam yang punya mekanisme yang jelas dan tegas untuk memberantas zina. Sistem Islam bila diterapkan secara *kaffah* akan mengusir ajaran ideologi Barat yang liberal. Ideologi inilah biang kerok utama merebaknya zina dan penyakit mental masyarakat. Maka harus disingkirkan bila ingin menghentikan kejahatan zina.

Ya, zina dalam pandangan Islam adalah kriminalitas (*jarimah*). Karena itu pelakunya dihukum berat. Bila belum menikah dia harus dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jika sudah menikah, pelaku harus dirajam sampai mati. Tubuhnya ditanam dalam tanah sehingga hanya kepalanya yang tampak, lalu dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman tegas ini dilakukan di lapangan terbuka agar masyarakat melihat. Pelaku kapok, masyarakat juga takut menirunya.

Beda dengan sekarang. Pezina kian eksis karena setelah zina malah diennakkan hidupnya. Kalau dia artis, akan diorbitkan melalui dunia hiburan. Mengaku tak perawan saja, rupiah bisa mengalir deras. Sedangkan pezina dari kalangan orang biasa, minimal akan dinikahkan segera. Tanpa rasa malu.

Padahal zina adalah salah satu pengundang azab Allah SWT. *"Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri"* (HR Al-Hakim, al-Baihaqi dan Ath-Thabrani). *Innalillahi*. Semoga Allah SWT menjauhkan umat ini dan anak cucu keturunan kita dari bencana zina.[] **kholda**

Mencegah Zina dalam Keluarga

Banyak kasus perzinahan dalam keluarga. Ada suami yang menjual istrinya untuk berzina dengan orang lain. Ada ayah tiri yang berzina dengan anak tirinya. Ada paman berzina dengan ponakannya. Ada pelakor yang berzina dengan suami orang. Ada suami yang selingkuh dengan istri orang. Bahkan ada kakak berzina dengan adik kandungnya. *Na'uzubillahi minzalik.*

Semua itu fakta yang ada di masyarakat. Sekumpulan gunung es yang tampak di permukaan, tetapi jauh lebih luas dan dalam angka sebenarnya. Menunjukkan betapa zina demikian merajalela. Lantas bagaimana mencegah terjadinya zina dalam sebuah keluarga?

1. Kuatkan Rasa Takut pada Allah SWT

Keluarga seluruhnya harus *ngaji*. Harus paham Islam. Kuat akidahnya sehingga memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah SWT. Memiliki pemahaman yang utuh bahwa zina dan bahkan sekadar mendekatinya adalah tindakan kemaksiatan yang dilarang Allah SWT.

Rasa takut pada Allah, yang digambarkan seperti kita berdiri di tepian jurang yang dalam, akan mengerem diri. Rasa takut yang mengalahkan bayangan nikmat sesaat akibat berbuat zina. Takut yang tidak mudah membuat goyah dan terjerumus dalam godaan setan.

Ya, salah satu kelemahan manusia adalah urusan syahwat. Ingat, setan akan terus mengganggu manusia agar terjerumus dalam maksiat yang satu ini. Maka itu perbanyak mendekatkan diri pada Allah SWT.

2. Kuatkan Kepemimpinan Suami

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang juga wajib menjaga dan mengamankan seluruh anggota

keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan di pundaknya. Suami harus memastikan seluruh anggota keluarganya selamat dari bencana zina. Istri dan anak-anaknya harus dia ayomi. Tidak dirusaknya, tapi dilindungi.

Jika suami memiliki hasrat, ia harus tegas membicarakan kepada istri dengan cara yang baik. Komunikasi mesra, agar istri melayani dengan gembira. Jangan diam-diam memendam kecewa. Bosan sama istri. Jenuh. Malas. Tapi diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami adalah pemimpin. Ia berhak tegas dalam kepemimpinan. *Toh* di sisi lain, Allah SWT sudah mengajarkan para istri agar taat pada suami. Termasuk taat dalam urusan pemenuhan kebutuhan syahwat.

3. Kuatkan Ketaatan Istri

Istri adalah representasi dari kebahagiaan keluarga. Jika istri bahagia, pancaran bahagia itu niscaya akan menular pada suami dan anak-anak. Kebahagiaan istri harus dipupuk dengan taat pada suami. Jangan ada kata bosan, malas dan enggan melayani suami. Apalagi merasa benci.

Tanpa bermaksud menyalahkan para istri, namun munculnya fenomena pelakor dan suami yang selingkuh, harus jadi bahan introspeksi. Jangan-jangan juga karena andil istri. Dimana, istri tidak taat pada suami. Istri kurang bersemangat melayani suami. Entah karena kelelahan mengurus anak-anak, atau memang suami yang juga kurang bisa membuatnya bergairah mesra. Jangan sampai terbalik. Pasangan zina saja begitu giat ingin bercinta, tapi pasangan halal malah enggan melakukannya.

4. Bersihkan Rumah dari Pemicu Syahwat

Selamatkan anggota keluarga dari rangsangan seksual yang bisa memicu tindakan perzinahan. Baik dalam obrolan maupun dalam mengakses media. Jangan sampai rumah dimasuki konten-konten berbau syahwat. Seperti tayangan video mesum, gambar mengumbar aurat, sinetron, film, bacaan cabul, berita-berita mesum di media dan sejenisnya.

Misal, orang tua tidak mengumbar nafsu di depan anak-anak. Tidak mengajak mereka nonton ke bioskop. Tidak membiarkan anak nonton film-film yang ada adegan *romance*-nya. Tidak berbicara seputar hubungan jinsi, walau sekadar candaan. Seperti, menggoda anak dengan istilah pacaran.

5. Bersikap Tegas dan Berani Mempertahankan Harga Diri

Seluruh anggota keluarga harus ditanamkan sikap tegas untuk membela harga diri. Kalau perlu, harga diri harga mati. Maksudnya, tidak takut pada ancaman apapun dan dari siapapun. Kalau menyangkut kehormatan diri, harus dibela.

Tidak pula mudah tergiur dengan iming-iming apapun bila kehormatan diri jadi taruhan. Jadi, anak, istri dan suami tidak tunduk untuk berbuat maksiat. Walau diancam nyawa sekalipun. Bahkan, antaranggota keluarga harus saling mengingatkan. Bukan saling menjerumuskan. Berani berteriak jika ada tanda-tanda anggota keluarga yang berlaku tidak senonoh. Berani melaporkan jika menjadi korban perilaku penyimpangan seksual dalam keluarga. Berani mengingatkan jika anggota keluarga berlaku melanggar syariat-Nya. Semia demi keselamatan seluruh keluarga, baik di dunia maupun akhirat. **kholda**



Perilaku Berulang

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, saat saya diajak bermain ke rumah teman suami, saya menemui perilaku anaknya yang tidak biasa. Teman ini punya anak usia 8 tahunan, dan punya adik usia 2 tahun. Si kakak ini saya amati agak "nakal". Suka mukul, merebut, mendorong dan pelit. Waktu si adik minta jajan ke kakaknya, sama kakaknya tidak boleh dan adik tersebut dipukul sampai menangis.

Saya pernah dikasih tahu teman tentang pola fraktal dalam pola asuh, jelasnya saya lupa. Cuma katanya pola itu adalah pola yang terjadi berulang. Saya mencoba mendekati si kakak, saya bertanya kenapa memukul adik? Kan adik masih kecil belum tahu apa-apa. Lalu saya menasihatinya. Saya kaget dengan jawaban si kakak. Katanya, "Umi pas waktu aku kecil suka pukul-pukul aku". Apakah si kakak sudah merekam perlakuan itu, dan akan menjadi pola sampai ia dewasa?

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

SA-Malang

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu SA yang baik,

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kebiasaan buruk pada anak yang menunjukkan perilaku kekerasan, salah satunya adalah lingkungan. Perilaku

yang kasar bisa diadaptasi dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Dalam hal ini pola asuh sangat berpengaruh pada tingkat emosi seorang anak dan bagaimana ia bersikap. Orang tua apalagi ibu adalah model terdekat anak yang merupakan panutan baginya. Darinya ia mempelajari dan mencontoh perilaku. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak kepada siapa pun, baik kepada anggota keluarga ataupun orang lain. Jangan sampai kita kecolongan sehingga anak melihat dan meniru perilaku kita yang mungkin tanpa disadari kasar terhadap orang lain.

Ibu SA yang baik,

Dampak kekerasan ini bisa berkepanjangan, bahkan bisa memengaruhi bagaimana ia mengasuh anaknya kelak. Jika anak merekamnya dengan cermat, bisa jadi akan menjadi perilaku yang berulang. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan bisa menjadi orang tua yang melakukan kekerasan semacamnya kepada anaknya kelak. Bahkan, siklus ini sangat mungkin terjadi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung hal ini, kekerasan dilakukan sejak dini, dalam waktu yang lama, dilakukan oleh orang yang berhubungan dekat, misalnya orang tua, terjadi dengan suasana emosional yang kurang harmonis di lingkungan keluarga. Anak yang terbiasa

mendapatkan kekerasan saat kecil tidak dapat melihat bagaimana seharusnya orang tua mengasahi dan memperlakukannya dengan baik. Sehingga, kemungkinan besar ia akan tumbuh dengan kemampuan "menjadi orang tua" yang kurang baik dalam berperilaku.

Ibu SA yang baik,

Memang, tidak selamanya anak yang sering diperlakukan kasar orang tuanya juga akan melakukan kekerasan kepada orang lain atau anaknya kelak. Ada juga anak yang menyadari bahwa apa yang ia terima bukanlah hal baik. Sehingga, pada akhirnya ia termotivasi untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang ia terima dan justru lebih melindungi anak-anaknya. Disinilah pentingnya merubah perilaku anak agar terbiasa berperilaku yang baik. Selain keluarga, perilaku anak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Baik lingkungan di sekitar rumah (teman sebayanya) ataupun di sekolah (jika anak sudah bersekolah), juga media. Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk yang menyerang mental anak. Meremehkan atau memperlakukan anak misalnya, berteriak depan anak, mengancam, memberikan label buruk pada anak dan sebagainya. Terkadang, mungkin orang tua dengan sengaja melakukan itu pada anak dengan maksud untuk

mendisiplinkan. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak selalu harus menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik ataupun verbal.

Ibu SA yang baik,

Anak belajar banyak hal dengan melakukan proses peniruan. Untuk itu, berikan contoh cara berperilaku dan bersikap yang baik agar ia dapat menirunya. Mulailah dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Ajak anak berbicara dari hati ke hati tentang perilaku buruknya, seperti apa yang Anda lakukan dengan menasihati kakak. Beri tahu bahwa apa yang ia terima merupakan hal yang salah dan tidak baik dilakukan, sehingga ia tidak akan berlaku seperti itu kepada siapapun. Tanamkan padanya bahwa berbicara kasar, memukul bukanlah hal yang baik dan patut dilakukan. Ingatkan padanya terus-menerus dengan cara yang halus dan lembut tanpa harus memarahi dan menghakiminya. Beri pengertian dan persetujuan mengenai apa yang akan diterima dan menjadi konsekuensinya jika ia masih melakukannya. Dan jangan lupa, berikan pujian atau penghargaan jika ia berhasil mengontrol emosinya dan tidak mengeluarkan kata-kata atau perilaku yang kasar saat ia sedang marah. "*Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.*" (HR. at-Tirmidzi).[]

KONSULTASI

Diasuh oleh:

Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Hukum *Fee* bagi Perantara Investasi



Diasuh Oleh: **Ustadz M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustadz, mohon diterangkan bagaimana hukum *fee* bagi perantara investasi. Faktanya, seorang perantara bekerja mempertemukan seorang pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) yang akan melakukan akad syirkah. Kemudian pemodal memberikan *fee* kepada perantara sebesar 5% dari nilai modal. Bolehkah *fee* tersebut menurut syariah? (Eri Taufik, Bandung)

Jawab:

Cara penetapan *fee* berupa persentase dari nilai modal seperti kasus yang ditanyakan di atas hukumnya tidak sah menurut syariah, karena bertentangan dengan cara penetapan *fee* yang dibolehkan syariah pada kasus tersebut, yaitu berupa jumlah nominal uang yang tetap.

Menurut kami, akad perantara dalam kasus di atas adalah akad *ijaarah*, tepatnya *ijaarah al ajiir* (mempekerjakan pekerja dengan upah), bukan akad *samsarah* (peran-

taaran dalam jual beli). *Ijaarah* sendiri adalah akad atas manfaat dengan imbalan (*'aqdun 'ala al manfa'ah bi-'iwadh*). Sedangkan *ijaarah al ajiir* adalah akad *ijaarah* untuk mendapat manfaat dari seorang pekerja (*ajiir*) dengan memberi imbalan kepadanya. (Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 84).

Dalam hukum *ijaarah al ajiir*, penetapan upah (*ujrah*) bagi pekerja tidak boleh dalam bentuk persentase (*nisbah mi'awiyah*) tertentu, misal 5% dari apa yang dihasilkan dari suatu pekerjaan, karena penetapan seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan (*al jahaalah*).

Jadi penetapan upah dalam akad *ijaarah* wajib dalam bentuk jumlah nominal yang tertentu, misal Rp5 juta per bulan, dsb, agar terwujud kejelasan (*al ma'lumiyyah*) yang dituntut oleh syara', sesuai sabda Rasulullah SAW, "Jika salah seorang dari kamu mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya upahnya." (*idza 'stajara ahadukum ajiiran fal-yu'limhu ajrahu*). (HR Dara-quthni). (Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 90).

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan hadis di atas dengan berkata, "Apa saja yang boleh menjadi harga (*tsaman*), boleh menjadi imbalan (*'iwadh*), dengan syarat diketahui dengan jelas jumlahnya (*ma'lum*). Adapun jika imbalannya tidak jelas (*majhuul*), maka hukumnya tidak sah. Kalau seorang buruh tani memanen dengan upah berupa sejumlah tertentu dari panen [misal setengah atau seper-

tiga dari hasil panen], maka hukumnya tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*al jahaalah*). (Taqiyuddin an-Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 90).

Pada kasus yang ditanyakan, akad antara perantara dengan pemodal bukanlah *samsarah* yang membolehkan *fee* berupa persentase tertentu (*nisbah mi'awiyah*). Karena pekerjaan sebagai perantara investasi tidak sesuai dengan definisi *samsarah* itu sendiri. Syaikh Rawwas Qal'ah Jie mendefinisikan *samsarah* (*brokerage*) sebagai suatu profesi yang pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli (*as samsarah hiya hirfatun yakuunu muhtarifuhaa al waasithah bayna al baa'i wa al musytari*). (Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat Al Fuqaha*, hlm. 191).

Dari definisi tersebut, jelaslah *samsarah* adalah perantara untuk akad jual beli. Dalam hukum *samsarah*, memang penetapan *fee* untuk perantara dibolehkan dalam bentuk persentase (*nisbah mi'awiyah*) tertentu, misal 5% dari harga barang. (Yusuf Al Qaradhawi, *Al Halal wa Al Haram fi Al Islam*, hlm. 226).

Namun faktanya, perantara pada kasus di atas bukanlah perantara dalam akad jual beli, melainkan perantara dalam akad syirkah antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Implikasinya, hukum yang diterapkan untuk kasus itu bukan hukum *samsarah* yang membolehkan *fee* berupa persentase, melainkan hukum *ijaarah* yang mewajibkan penetapan *fee* secara nominal. *Wallahu 'alam*.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat tabloid
mediaumat.news | Memperjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks

BPJS Kesehatan Vs Kesehatan di Era Khilafah

Oleh: **Ummu Atqiya**, Praktisi Kesehatan di Kota Bandung

Defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahunlah yang disinyalir sebagai penyebab terseok-seoknya BPJS dalam melakukan pelayanan. Maka mau tidak mau kita pun harus mencari jalan keluarnya. Bukan dengan meminta bantuan asing (utang luar negeri) tentunya, atau dengan membiarkan sistem IT BPJS diperbaiki asing juga. Karena dengan begitu maka asing akan terus mendikte kita atau lebih parah lagi semua data-data vital kesehatan kita mudah mereka retas.

Kondisi serupa juga diidap oleh banyak lembaga bisnis keuangan kapitalisme asuransi kesehatan wajib, termasuk *National Health System (NHS)* di Inggris, yang berusia puluhan tahun dan *Gesetzliche Kranke Versicherung (GKV)* di Jerman yang berusia hitungan abad.

Ini menunjukkan satu garis benang merah pada kita semua, bahwa kebijakan apa pun kalau lahir dari sistem kapitalis sekuler, pasti menuai banyak masalah sebagai cerminan dari kerusakan dan kegagalan peradaban Barat sekuler.

Kita yakini bahwa BPJS lahir bukan lahir dari akidah Islam, tapi dari ide pemisahan agama dan kehidupan termasuk kesehatan (sekuler) yang kapitalistik dengan menjadikan uang, keuntungan atau manfaat sebagai standarnya.

Ketika kesehatan hanya dijadikan objek bisnis maka hasilnya sungguh mengkhawatirkan, tidak sedikit jiwa me-

layang sia-sia, akibat rumah sakit, dokter dan para medis bekerja di bawah tekanan bisnis BPJS kesehatan.

Adapun manfaat yang dirasakan sebagian orang itu hanyalah manfaat semu. Manfaat di atas penderitaan orang lain, yang bersusah payah membayar premi tapi belum tentu butuh dan saat butuh pun belum tentu mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berbeda dengan pelayanan kesehatan khilafah. Ia adalah pelayanan kesehatan terbaik sepanjang masa, dilingkupi atmosfer kemanusiaan yang begitu sempurna. Hal ini karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kaffah, termasuk yang bertanggung jawab langsung dalam pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu publik.

Negara hadir sebagai garda terdepan melayani dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Sebab Rasulullah SAW telah menegaskan:

"Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya" (HR Al-Bukhari).

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang pagi hari aman lagi tenteram hatinya, sehat badannya dan mempunyai makanan pokok hari itu, maka seolah dunia telah dihimpun untuk dirinya" (HR Ibn Ishaq).

Di sini jelas sekali, Nabi SAW menyebut keamanan,

kesehatan dan pangan sebagai kebutuhan dasar yang secara otomatis sebagai tanggung jawab negara karena Nabi menetapkan tanggung jawab tersebut dengan "*hashr*" sebagai tanggung jawab negara tidak boleh dialihkan kepada siapa pun yang lain, baik dalam bentuk badan maupun individu. Negara akan memberikan layanan terbaik berdasarkan kaidah dalam melaksanakan kewajiban, "*aqsha al-wus'i wa aqsha as-sur'ah*" (dengan kemampuan terbaik dan secepat mungkin)."

Dalam hal ini negara menyediakan rumah sakit, puskesmas, klinik, termasuk rumah sakit keliling agar bisa memastikan, bahwa tak ada satu pun rakyat yang sakit. Baik yang sanggup pergi ke rumah sakit maupun tidak (tidak bisa mengakses layanan ini), semuanya diberi pelayanan kesehatan secara gratis; mulai dari jasa dokter, perawat, ruang opname, obat dan tindakan medis yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarananya pun disediakan selengkap dan secanggih mungkin. Hal ini pernah dipraktikkan pada era khilafah, sebut saja era Harun ar-Rasyid. Hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi apakah mau atau tidak kita menerapkannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu..." (TQS Al Anfaal: 24).[]



Oleh: **Hadi Sasongko**, Direktur Political Grassroots (Poros)

Demokrasi dan Ancaman Disintegrasi

Titik didih gerakan makar Papua menciptakan kontraksi sosial. Dalang-dalang kerusuhan hendaknya segera 'distop' total. Namun bicara solusi, sejatinya tak cukup sampai di situ saja. Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di wilayah paling timur Indonesia. Padahal di sisi lain, wilayah ini adalah memiliki kekayaan alam yang melimpah-ruah.

Papua adalah penghasil emas terbesar di dunia. Ini belum termasuk mineral dan tambang lainnya, serta hasil hutan. Ketimpangan inilah yang mendorong sebagian rakyat Papua menginginkan kemerdekaannya. Mereka melakukan dua upaya sekaligus untuk mendorong Papua agar lepas dari Indonesia, yakni secara persuasif dan fisik.

Aksi fisik dilakukan dengan mengangkat senjata. Sudah puluhan kali kelompok bersenjata Papua menyerang aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) serta warga sipil. Jumlah korban meninggal dan luka-luka sudah sangat banyak. Ada tentara, polisi, tukang ojek, pegawai negeri sipil, sampai sopir. Hampir setiap bulan ada penyerangan oleh OPM ini. Serangan-serangan sporadis paling tidak terus mengangkat isu Papua ke level nasional. Beberapa kali serangan terjadi di sekitar lokasi tambang PT Freeport, menjadikan isu Papua ini terangkat ke dunia internasional.

Bersamaan dengan aksi fisik 'pemberontakan' ini, sebagian warga Papua melakukan kampanye baik nasional maupun internasional untuk referendum. Mereka membuat perwakilan di beberapa negara seperti Inggris, Belanda, dan Australia. Tak hanya itu, mereka terus men-

cari dukungan ke Amerika dan Eropa.

Di dalam negeri ini, aksi kampanye mereka semakin terbuka. Kebanyakan ini dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Mereka menginginkan referendum untuk penyelesaian persoalan di Papua.

Munculnya semangat disintegrasi di wilayah ini tak lepas dari sistem politik demokrasi. Demokrasi memberikan jaminan kepada semua warganya untuk menyatakan pendapatnya, berserikat dan berkumpul, bahkan melepaskan diri dari sebuah wilayah—hak menentukan nasibnya sendiri. Contoh yang paling nyata adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI setelah suara terbanyak—terlepas hasil curang atau tidak—memilih lepas dari NKRI.

Di sisi lain, sistem kapitalisme dan liberalisme di bidang ekonomi menjadi biang terjadinya kemiskinan struktural. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, sistem kapitalisme justru memunculkan kesenjangan yang kian menganga antara si kaya dan si miskin. Orang-orang kaya—pemilik modal—mendapatkan akses yang lebih luas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kaum miskin justru kian sulit mendapatkan penghidupan.

Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak asing dan kalangan tertentu untuk mendorong munculnya disintegrasi. Sudah menjadi pengetahuan umum, keinginan referendum di Papua mendapat dukungan dari dunia internasional dan gereja. Bahkan sebagian anggota Kongres Amerika pun secara nyata menyatakan dukungan tersebut dan pernah berkunjung ke



Papua.

Demikian pula LSM-LSM internasional ada di balik aksi tuntutan referendum Papua. Dukungan gereja terlihat ketika hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 yang mendorong hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi World Alliance of Reform Church 2004.

Itulah ancaman disintegrasi yang merongrong NKRI. Ironisnya demokrasi melegalkan itu dengan dalih referendum menentukan nasib sendiri.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Blunder Taliban Setelah Ditolak AS, Berharap ke Rusia

Rusia bukanlah sahabat, bagi negeri-negeri Islam. Di samping pernah memporakporandakan Afghanistan saat masih menjadi negara komunis, saat ini Rusia melakukan kejahatan yang luar biasa keji di Suriah.



Tidak lama setelah Amerika Serikat (AS) membatalkan dialog perdamaian dengan Taliban, pimpinan Taliban melakukan kunjungan ke Rusia. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Sabtu (14/9) lalu. "Utusan khusus dari Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov menerima seorang delegasi Taliban di Moskow," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip dari AFP, Ahad (15/9).

Juru bicara tersebut tidak membeberkan kapan tepatnya pertemuan itu berlangsung. Namun, di dalam pertemuan itu, Rusia menekankan bahwa negosiasi antara AS dan Taliban sepatutnya dimulai kembali. "Taliban mengonfirmasi bahwa mereka bersedia untuk menuju dialog ulang dengan Washington DC," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat ber-

niat untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Afghanistan menjadi 8.600 orang untuk mengakhiri keterlibatan AS di negara Asia Tengah tersebut. Asal, Taliban juga menjamin tidak melindungi kelompok teroris yang diburu AS. Untuk itu, Trump berencana bertemu dengan petinggi Taliban dan pemerintah Afghanistan secara terpisah pada 8 September lalu. Namun, Trump berubah pikiran setelah salah satu tentara AS menjadi korban serangan bom di Kabul beberapa waktu lalu.

Taliban telah bersumpah untuk terus berperang melawan pasukan AS di Afghanistan, sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan para pemberontak telah menjadi "mati". Taliban menambahkan Washington akan menyesal meninggalkan negosiasi. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada AFP, "Kami memiliki dua cara untuk mengakhiri

pendudukan Afghanistan, pertempuran atau negosiasi". Zabihullah menambahkan, "Jika Trump ingin menghentikan pembicaraan, kami akan mengambil jalan pertama, dan mereka akan segera menyesal."

Trump berjanji selama kampanye presiden 2016 bahwa ia akan mengakhiri perang AS di Afghanistan. Namun dia baru-baru ini mengatakan bahwa dia ingin menurunkan jumlah pasukan menjadi 8.600 –hampir sama dengan level ketika dia memasuki kantor –dan kemudian "membuat keputusan dari sana". Dia mengatakan AS akan mempertahankan kehadiran militer di Afghanistan. Banyak orang di Washington khawatir bahwa penarikan penuh AS akan membuat negara itu sangat tidak stabil dan rentan terhadap kelompok-kelompok yang dituding Barat sebagai militan. Barat khawatir negara itu digunakan sebagai pangkalan untuk menyerang Barat.

Taliban sekarang menguasai lebih banyak wilayah daripada kapan pun sejak invasi AS 2001. Mereka bersikukuh bahwa mereka tidak akan berbicara secara resmi dengan pemerintah Afghanistan sampai jadwal penarikan pasukan AS disetujui. Hampir 3.500 anggota pasukan koalisi internasional tewas di Afghanistan sejak invasi tahun 2001, lebih dari 2.300 di antaranya adalah orang Amerika. Dalam laporan Februari 2019, PBB mengatakan bahwa lebih dari 32.000 warga sipil Afghanistan tewas. Institute Watson di Universitas Brown mengatakan 58.000 personel keamanan Afghanistan dan 42.000 pejuang oposisi tewas.

Blunder

Sikap Taliban melakukan kontak dengan Rusia dianggap blunder oleh Budi Mulyana. Pengamat politik luar negeri dari Bandung ini menyebut Rusia tidak lebih baik dari Amerika Serikat yang telah bertahun-tahun menduduki Afghanistan. Apalagi, menurutnya, Rusia saat masih menjadi Soviet pernah menduduki Afghanistan dan melakukan tindakan keji terhadap penduduk Afghanistan.

"Bukankah, sebelum Amerika masuk, rakyat Afghanistan, telah dengan susah payah berjuang mengusir Soviet, sekarang malah kembali kepada Rusia yang merupakan induk utama Soviet," ujar Budi Mulyana.

Ia menyebutkan, Rusia bukanlah sahabat, bagi negeri-negeri Islam. Di samping pernah memporakporandakan Afghanistan saat masih menjadi negara komunis, saat ini Rusia melakukan kejahatan yang luar biasa keji di Suriah. Negara ini melakukan pembunuhan terhadap rakyat Suriah dengan pesawat-pesawat tempur dan bom-bomnya yang mematikan.

Budi juga menilai sikap Taliban melakukan perundingan dengan Amerika, bunuh diri secara politik. Mengingat *track record* Amerika dalam berbagai perundingan damai, kerap mengambil keuntungan sendiri.

"Kerja sama dengan Taliban, akan jadi 'exit strategy' bagi Amerika untuk mengurangi pasukannya di Afghanistan dan di sisi lain akan menggunakan Taliban untuk memerangi mujahidin yang masih melakukan perlawanan terhadap Amerika. Taliban justru akan digunakan Amerika untuk memerangi kawannya sendiri dengan alasan mengacau perdamaian," ujar Budi.

Kesepakatan damai dengan Amerika, menurutnya, adalah bagian dari politik belah bambu. Amerika sudah melakukannya saat membentuk pemerintahan boneka Afghanistan. Rezim boneka ini digunakan untuk menghentikan perlawanan terhadap Amerika namun tidak berhasil.

"Sekarang Amerika menggunakan Taliban, setelah berdamai kemudian memerangi kelompok mujahidin yang tidak sejalan dengan perdamaian, Taliban bisa digunakan sebagai ujung tombak," ujarnya. **af**

Amir Hizbut Tahrir: Wajib Melawan Pendudukan Salibis Amerika dan NATO

Wajib bagi gerakan Taliban dan semua mujahidin yang melawan pendudukan salibis Amerika dan NATO, tidak memberikan konsesi kepada Amerika dan rezim yang mengekornya. Dan agar tidak terjebak di dalamnya dan tetap melawan sampai Amerika terpaksa keluar secara hina dan kalah.

Perang adalah kesabaran sesaat. Amerika tidak menerima perundingan kecuali setelah tidak mampu mematahkan kehendak para mujahidin. Hendaknya mereka berhati-hati agar tidak jatuh dalam jerat perundingan yang bagi Amerika dan Barat berarti konsesi dari pihak lain agar dengan perundingan itu mereka bisa meraih apa yang tidak bisa diraih dengan perang, yakni kekalahan lawan di atas meja tanpa mengalirkan setetes darah dan membelanjakannya uang sedikitpun!

Ini sesuai konsepsi politik pragmatisme mereka ... Amerika adalah penyerang jahat yang harus dimintai pertanggungjawaban atas serangannya dan kejahatan-kejahatannya. Amerika telah membunuh, melukai, meninggalkan banyak orang cacat, mengusir jutaan warga Afghanistan dan menghancurkan negeri. Kejahatan-kejahatan Amerika tak terhitung, menyaingi bahkan melebihi kejahatan-kejahatan Uni Soviet di Afghanistan...

Sebagaimana Uni Soviet terusir secara hina dan kalah,

maka demikian juga adalah mungkin membuat nasib Amerika begitu juga jika gerakan Taliban teguh di atas tujuan mereka keluar dalam perang Amerika dan bersabar di atasnya.

Allah SWT telah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar dan teguh hingga meskipun mereka lebih sedikit dari jumlah musuh. Allah SWT berfirman: "Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar". (TQS al-Baqarah [2]: 249).

Mereka wajib tidak menerima bergabung di dalam rezim agen yang tegak di Afghanistan. Tetapi mereka wajib menghancurkan rezim itu dan menegakkan pemerintahan Islam, al-Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang telah disampaikan berita gembira atas kedatangannya oleh Rasulullah SAW: "Kemudian ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian". "Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang berjuang" (TQS ash-Shaffat [37]: 61).[]

Sumber: <http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/57833.html>

Wafatnya Syeikh Yusuf Motala Sang Pelopor Islam di Inggris



Darul Uloom, memakamkan salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan Islam di Inggris yang telah wafat. Maulana Yusuf Motala, 73 tahun, wafat pada hari Ahad malam, 8 September 2019, di Toronto, Kanada, setelah menderita serangan jantung pada bulan Agustus.

Syeikh Motala bukanlah seorang publik figur tetapi akan dikenang sebagai pendiri Darul-Uloom al-Arabiyya al-Islamiyya di Holcombe dekat Bury pada tahun 1973, mungkin sebuah lembaga Deobandi terpenting di Barat. Lembaga yang dikenal sebagai "Dar al-Uloom Bury" ini telah menghasilkan ratusan orang lulusan yang telah melayani masyarakat di Inggris, Eropa, Amerika Utara, Afrika, dan di tempat-tempat lain.

Dilahirkan di Distrik Surat di Gujarat pada tahun 1946, Syeikh Yusuf menyelesaikan hafalan Alqurannya pada usia muda, dan kemudian belajar di Jamia Husayniyya di Gujarat dan di Mazahir al-Ulum Saharanpur di Uttar Pradesh. Setelah lulus pada tahun 1968 (1387), Syeikh Yusuf pergi ke Inggris pada Juni 1968 untuk menikah. Ayah mertuanya, Haji Yaqub Sulaiman Limbādā dari London mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk visa dan memberikan dukungan besar pada kedatangannya. Setelah itu, selama beberapa tahun berikutnya Syeikh Yusuf menetap di Bolton dan diangkat menjadi Imam Masjid Zakariyya Jame.

Pada tahun 1973 Syeikh Yusuf memutuskan untuk membeli rumah sakit di Holcombe Hall, Ramsbottom, Bury untuk mendirikan Darul Uloom dan seminari Islam pertama di Inggris. Pembelian tersebut diselesaikan dengan saran dan berkah dari Syeikh al-Hādīth Mawlānā Muḥammad Zakariyyā Kāndhelwī. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1979 dan 1981, ia melakukan dua kunjungan ke Darul Uloom ini. Dia memiliki banyak kekhawatiran dan kepedulian terhadap Darul Uloom yang terlihat dari surat-suratnya yang diterbitkan dan juga dua kunjungannya tak lama sebelum kematiannya meskipun kesehatannya buruk dan usia lanjut.

Selama beberapa dekade pengabdianya, Syeikh telah membangun jaringan siswa yang luas serta lembaga pendidikan di seluruh dunia. Dia merupakan salah satu siswa utama Syeikh Hādīth Muḥammad Zakariyya al-Kandhlawi, seorang ulama Hadits Sunni Hanafi terkemuka dari sekolah pemikiran Islam Deobandi di India. Maulana Yusuf

adalah pendiri banyak lembaga Islam di seluruh dunia, serta banyak institusi di Inggris, termasuk: Darul Uloom Al Arabia Al Islamia, Bury; Madinatul Ulum Al Islamia, Kidderminster; Jamiatual Imam Muhammad Zakariya, Bradford; Markazul Ulum, Blackburn; Madrasatul Imam Muhammad Zakariya, Bolton; Madrasatul Imam Muhammad Zakariya, Preston

Moulana Yusuf Shabbir, seorang lulusan Darul Uloom Bury yang berpusat di Blackburn, mengatakan kepada *Asian Image*: "Ini adalah kerugian besar bagi umat Islam. Kami semua berutang budi kepada guru kami yang terhormat, Syeikh Yusuf Motala, atas upaya dan pengorbanan sepanjang hidupnya. Warisannya mencakup pendirian sekolah agama kaum Muslim pertama di Dunia Barat yang telah menghasilkan lebih dari seribu orang lulusan.

Sejak awal, lebih dari seribu siswa telah lulus sebagai sarjana dari Darul Uloom Bury dan banyak lagi sebagai ustadz. Sebagian besar lulusannya mahir berbahasa Inggris bersama dengan bahasa lain. Ia mendorong siswa untuk mengejar pendidikan lebih lanjut baik dalam studi Islam dan disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, beberapa lulusan melakukan perjalanan ke India, Arab Saudi dan Mesir sementara yang lain didorong untuk mendaftar di universitas di Inggris. Ini telah menghasilkan beragam lulusan dengan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu yang sekarang berkontribusi dan memberi manfaat bagi komunitas Muslim dan komunitas yang lebih luas di Inggris dan sekitarnya.

"Sejumlah besar cendekiawan Muslim Inggris yang aktif di berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi pada masyarakat adalah murid-muridnya secara langsung atau tidak langsung. Banyak dari muridnya yang telah mendirikan sekolah agama, sekolah, badan amal dan lembaga lainnya.

"Dia adalah salah seorang cendekiawan Islam terkemuka di Inggris yang kontribusinya dan upayanya telah memberikan dampak besar pada masyarakat tidak hanya di Inggris, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Kami memohon kepada Allah SWT untuk memberinya tempat tinggal berupa taman surga dan memberikan kesabaran kepada semua anggota keluarga dan rekan-rekannya."

Ketua Yayasan Ramadhan Syeikh Muhammad Umar dan CEO Mohammed Shafiq mengatakan: "Ketika sejarah komunitas Muslim Inggris ditulis, dia akan berada di jantung cerita itu. Dia adalah salah seorang yang pertama mendirikan lembaga pendidikan di Inggris di mana saat ini ribuan orang telah lulus menjadi sarjana Muslim yang melayani kemanusiaan di seluruh dunia. Kerendahan hati, sikap welas asih, dan cintanya telah jelas bagi semua orang dan wafatnya beliau akan diratapi oleh banyak orang di seluruh dunia."

"Kami berdua mendapat kehormatan untuk bertemu dengan beliau beberapa kali selama dua puluh tahun terakhir dan benar-benar tersentuh oleh kepribadian dan martabatnya. Kami ingin menyampaikan belasungkawa secara pribadi kepada keluarga, teman, kolega, dan muridnya, ini merupakan kehilangan yang sangat besar. Semoga Allah meninggikan kedudukannya di Jan-nah." [] **riza dari berbagai sumber**

KRONIK MANCANEGARA

Pakistan Peringatkan Ancaman Genosida di Kashmir

Pemerintah Pakistan memperingatkan pendudukan militer ilegal oleh India di wilayah mayoritas Muslim di Kashmir dapat memicu timbulnya ketakutan akan terjadinya genosida.

"Orang-orang di Jammu dan Kashmir yang diduduki India telah melihat yang terburuk.. Saya merinding menyebut kata genosida di sini, tapi saya harus," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi di hadapan forum hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (10/9/2019) seperti diberitakan *rueters* dan dikutip *kompas.com* pada hari yang sama.

"Kesedihan dan trauma dari kota-kota, pegunungan, dataran, dan lembah di Jammu dan Kashmir yang diduduki India menggema hari ini, dengan kengerian tentang Rwanda, Srebrenica, Rohingya, dan pogrom di Gujarat, sebagai pengingat," kata Qureshi, kepada Dewan HAM PBB.

"Orang-orang Kashmir di wilayah pendudukan, sebagai kelompok orang-orang satu negara, etnis, ras, dan kepercayaan, menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan, cara hidup, dan mata pencaharian mereka dari rezim pembunuh, misoginis, dan xenofobik," lanjutnya.

Otoritas India telah membanjiri lembah Kashmir dengan pasukan militer, membatasi pergerakan, serta memutus layanan komunikasi, setelah Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan penghapusan status otonomi khusus wilayah itu pada 5 Agustus lalu. []

Israel akan Bangun Permukiman di Lembah Yordan

Pemerintah Israel akan menyetujui pembangunan permukiman baru di wilayah Lembah Yordan. Kabar itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji menganeksasi wilayah tersebut jika partainya, Likud Party, memenangkan pemilu Israel.

Menurut Jerusalem Post, seperti dikutip *republika.co.id* pada Jumat (13/9), kabinet Israel akan mengonfirmasi keputusan atau izin pembangunan permukiman di Lembah Yordan pada Ahad (15/9). Jerusalem Post menyebut, izin terbaru itu akan menandai ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir pemerintah menyetujui pembangunan permukiman baru di Tepi Barat.

Surat kabar itu melaporkan, selama sekitar 10 tahun masa pemerintahan Netanyahu, kabinet Israel telah menyetujui enam permukiman baru. Sebanyak lima permukiman di antaranya merupakan pos terdepan yang telah ada. []

Sejak Awal 2019, Sekitar 350 Ribu Orang Yaman Terlantar



Sekitar 350.000 orang telah terlantar akibat konflik yang sedang berlangsung di Yaman pada tahun 2019, kata PBB sebagaimana dilansir *Memo*, Kamis (12/9/2019) dan dikutip *arrahmah.com* esoknya.

Dalam cuitannya di *Twitter*, Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB mengatakan bahwa Matriks Pelacakan Pemindahan tubuh mencakup lebih dari 42.000 situs, untuk membantu memahami kebutuhan, jumlah, lokasi, dan kondisi populasi di Yaman, termasuk pengungsi, pengungsi yang kembali dan migran.

Ditemukan bahwa pada tahun 2019 saja, sekitar 350.000 orang mengungsi di Yaman.

Perang Yaman telah berkecamuk selama lima tahun dengan hampir 100.000 orang tewas dalam proses itu, menurut angka PBB.

Konflik pecah setelah teroris Syiah Houthi menguasai ibukota Sana'a dan kantor-kantor pemerintah di sana pada tahun 2014, memaksa otoritas yang didukung internasional untuk pindah ke kota selatan Aden. Koalisi Arab yang didukung Saudi melakukan intervensi berbulan-bulan kemudian untuk membalikkan posisi Houthi.

Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan untuk tujuan ini dan kedua belah pihak telah dituduh melakukan "kejahatan perang" oleh PBB dan kelompok hak asasi lainnya. [] **joy dari berbagai sumber**

Seruan Hijrah Menuju Syariah Kaffah Semarak di Dunia Nyata dan Trending di Twitter

Tak kurang dari 50 kota di Indonesia melakukan pawai sambut Tahun Baru 1441 Hijriah dengan tema Hijrah Menuju Syariah Kaffah, Ahad (1/9/2019). Massa melakukan konvoi di jalan-jalan protokol sembari mengibarkan liwa dan rayah. Tampak juga sejumlah massa mengacungkan berbagai macam poster, di antaranya bertuliskan "Islam Harga Mati". Dalam orasinya di Kota Solo, Ustadz Felix Siauw menyampaikan pesan-pesan ukhuwah yang dilandasi kalimat tauhid. Menurutnya hanya iblis yang tidak suka persatuan umat Islam.

Sehari sebelumnya, massa di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan dan ratusan kota lainnya berkumpul di berbagai masjid untuk mengikuti tabligh akbar dengan tema yang sama. Di sela-sela acara, massa mengunggah foto acara seraya menuliskan tanda pagar #HijrahMenujuSyariahKaffah, #HijrahSelamatkanIndonesia dan #WeAreTheWorldKHILAFAH. Tak ayal lagi, ketiga tanda pagar tersebut menjadi tiga besar trending Indonesia dan empat besar dunia. []

Indonesia trends	Worldwide trends
#VHEARTBEAT_in_JKT HARI INI! 15:30 WIB, Free live streaming MONSTA X, MAMAMOO, AFGAN dll Promoted by V LIVE INDONESIA	#VHEARTBEAT_in_JKT HARI INI! 15:30 WIB, Free live streaming MONSTA X, MAMAMOO, AFGAN dll Promoted by V LIVE INDONESIA
1 - Trending #HijrahMenujuSyariahKaffah 68.9K Tweets toembal is Tweeting about this	1 #HijrahMenujuSyariahKaffah 33.8K Tweets
2 - Trending #HijrahSelamatkanIndonesia 65K Tweets toembal is Tweeting about this	2 #HijrahSelamatkanIndonesia 32.9K Tweets
3 - Trending #WeAreTheWorldKHILAFAH 59.8K Tweets toembal and dimas_setiawan are Tweeting about this	3 Paul Aguilar 3,366 Tweets
	4 #WeAreTheWorldKHILAFAH 31.7K Tweets



Ambon



Bandung



Banjar Patroman



Banjarmasin



Banyumas



Buton



Cilacap



Cirebon



Gresik



Kendari



Lampung



Majalengka



Makassar



Malang



Medan



Padang



Palembang



Palu



Pangkalpinang



Pasuruan



Pekanbaru



Purwakarta



Samarinda



Semarang



Serang, Banten



Solo



Sumbawa



Surabaya



Tangerang



Tasikmalaya



Ketentuan Iklan

- ✓ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: iklan.tabloidmu@gmail.com
- ✓ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ✓ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ✓ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ✓ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ✓ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ✓ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
¼ Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advtorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

**DAPATKAN
DISCOUNT
SPECIAL**

Informasi :
0857.1713.5759